PEMIMPIN YANG DIPILIH TUHAN

WAWANCARA GUBERNUR LEMHANNAS

BERITA INDONESIA

EDISI 75 TAHUN V ★ APRIL 2010

Rp 16.000 (Luar Jabodetabek Rp 17.500)

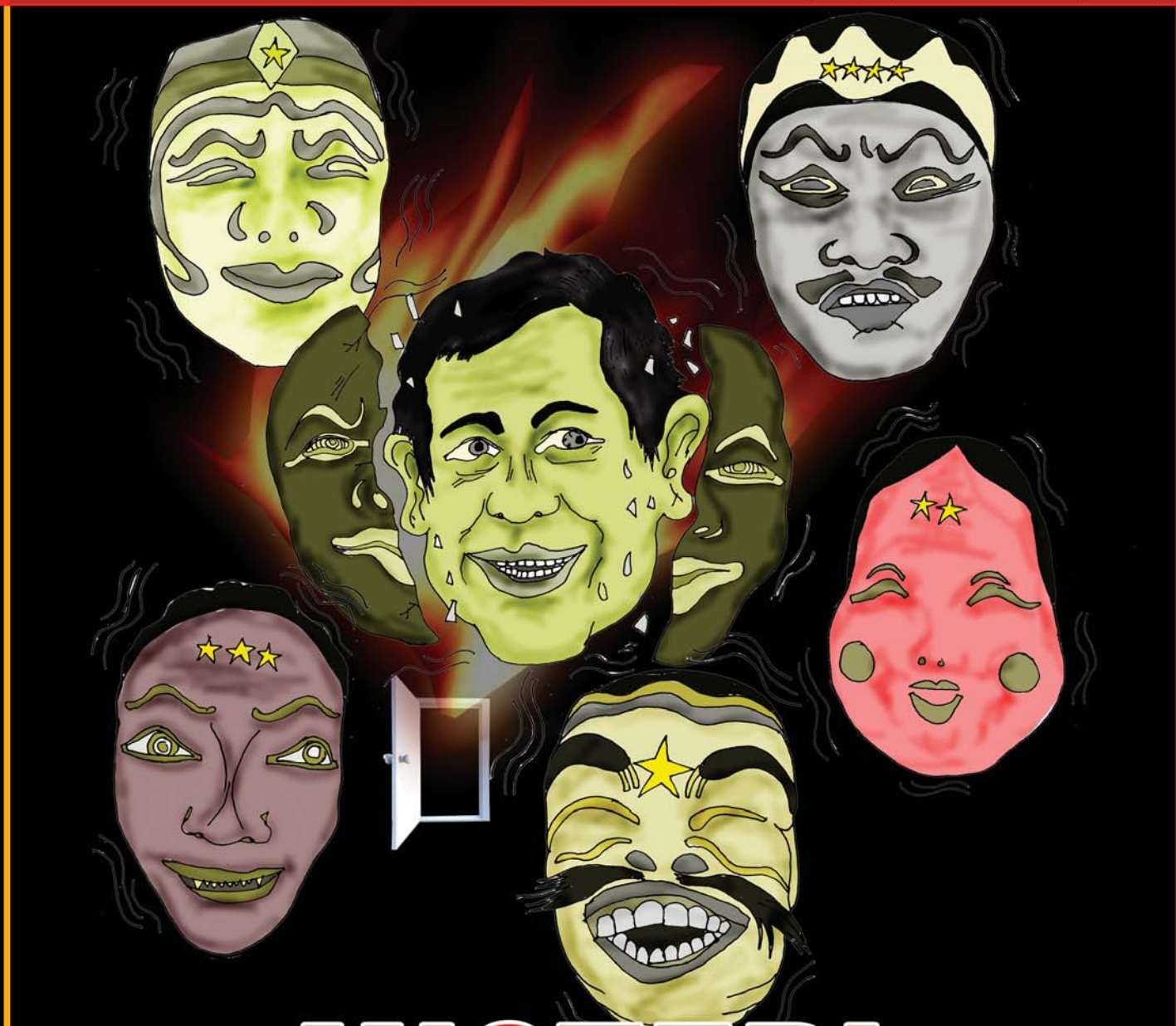

MISTERI MAKELAR KASUS

POTRET MAFIA PENEGAK HUKUM DAN PEGAWAI PAJAK

LENTERA DEMOKRASI, TOLERANSI DAN PERDAMAIAN

ISSN 1907-977X

www.beritaindonesia.co.id

VARIETAS : NUMBU

Umur : 105 - 110 hari

Harga :

1. *Packing 5 kg : Rp. 100.000*
2. *Packing 1 kg : Rp. 30.000*
3. *Packing 250 gr : Rp. 15.000*
4. *Packing 100 gr : Rp. 10.000*

VARIETAS : KAWALI

Umur : 110 Hari

Harga :

1. *Packing 5 kg : Rp. 100.000*
2. *Packing 1 kg : Rp. 30.000*
3. *Packing 250 gr : Rp. 15.000*
4. *Packing 100 gr : Rp. 10.000*

VARIETAS : IGARI

Umur : 75 - 80 hari

Harga :

1. *Packing 5 kg : Rp. 100.000*
2. *Packing 1 kg : Rp. 30.000*
3. *Packing 250 gr : Rp. 15.000*
4. *Packing 100 gr : Rp. 10.000*

Kampus Al-Zaytun : Desa Mekarjaya, Gantar, Indramayu , Indonesia
Telp : 0234 - (742815, 742816) Fax : 0234 - 742833 E-mail :zaytun99@yahoo.com

Sampul
desain:esero
karikatur:dendy

Edisi No.75/Th.V/April 2010

DARI REDAKSI 4
VISI BERITA 5
BERITA TERDEPAN 6
BUNG WARTO 8
HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 9

BERITA UTAMA

MEMBUKA MISTERI MAKELAR KASUS | 12

Ini berita hebat. Markus dan mafia hukum itu sungguh-sungguh nyata (terbukti), rakus dan jahat. Seorang jenderal polisi (bintang tiga) aktif, mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, tampil gagah berani (nekad) sebagai *whistleblower*. Dia yang tampaknya sedang 'terluka' membuka rahasia mafia makelar kasus (markus) atau mafia hukum di tubuh Polri (institusinya sendiri) dan lembaga peradilan lainnya, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan pengadilan pajak, yang selama ini penuh misteri.

Whistleblower Malah Jadi Tersangka 16
Emas dan Berkah Terselubung 22
Who is Who Susno Duadji 24
Sebuah Potret Pegawai Pajak 27

BERITA KHAS
Puncak Tragedi Pendidikan 28

BERITA NASIONAL
Isyarat Kegagalan Renumerasi 30

LENTERA

REPORTASE KUNJUNGAN HKBP TEBET KE AL-ZAYTUN (2)

SYAYKH AL-ZAYTUN, PEMIMPIN YANG DIPILIH TUHAN

Setelah rombongan HKBP Tebet berkeliling meninjau berbagai fasilitas infrastruktur serta sistem tata kelola pembelajaran, ekonomi dan lingkungan hidup di Al-Zaytun, kekaguman tertinggi akhirnya termuarakan kepada Syaykh AS Panji Gumilang yang diapresiasi sebagai pemimpin yang telah dipilih Tuhan.....34

BERITA POLITIK
Cuma Sekadar Bunga Politik 31

INDEPTH NEWS
Ajakan Lecehkan DPR 32

BERITA WAWANCARA
Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Muladi, SH
Makelar Kasus itu Sangat Buruk 46

BERITA HUKUM
Grasi Demi Kemanusiaan 50

KPK Sepeninggal Tumpak 51

BERITA EKONOMI
Menyiasati ACFTA 52

BERITA PUBLIK
Solusi yang Dinamis 53
Kereta Regional 53
Lebih Cepat dengan Smart Card 54

BERITA DAERAH
Mempertanyakan SK Menhut 55
Tanpa Izin Tapi Bisa 56
Lebih Cepat dari Biasanya 57

BERITA MANCANEGARA
Obama dan UU Reformasi Kesehatan 58

BERITA IPTEK
Layanan Berbasis Lokasi Buatan Lokal 60

Teknologi di Balik Avatar 61

BERITA KESEHATAN
Menikmati Teknologi LASIK 62

BERITA OBITUARI
Selamat Pulang Sobat 64

BERITA HIBURAN
Pertempuran Dewa "Kosmopolit" 65

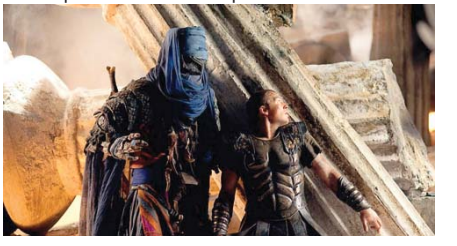

BERITA BUKU
Potret Bahasa Generasi "Ilfil" 66

BERITAINDONESIA

Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

PEMIMPIN UMUM:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

PEMIMPIN REDAKSI:
Ch Robin Simanullang

REDAKTUR SENIOR:
MYR Agung Sidayu
Imam Prawoto
Dendy Hendrias
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (LIPUTAN, LITBANG & PUSDAT):
Mangatur Lorielcide Paniroy (Redaktur Eksekutif)

REDAKTUR:
Samsuri, Marjuka Situmorang, Dian Gina Rahayu

SEKRETARIS REDAKSI
Bantu Hotsan

STAF REDAKSI:
Nawawi, Ikhwan Triatmo, Sarjiman,
Doan Adikara Pudan, Budi Rahardjo

WARTAWAN FOTO:
Wilson Edward

KARIKATURIS:
Dendy Hendrias

KONTRIBUTOR:
Syahbuddin Hamzah, Anis Fuadi, Chusnato,
Retno Handayani

DESAIN GRAFIS:
ESERO Design, Arief Maulana

BIRO REDAKSI:
Medan: Bontor Simanullang, Humbahas: Parasian Manalu, Palembang: Sri Windayani, Jawa Barat: Ade Wiharyana (Kepala), Bernard Sihite, Tarakan: Sudirman Leonard Pohan, Amerika Serikat: Mibsam Bahanan (Maryland), Rukyal Basri (Philadelphia)

PENERBIT:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT. Asasira

KOMISARIS:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

DIREKTUR/PEMIMPIN PERUSAHAAN:
Ch Robin Simanullang

WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN:
Samsuri

IKLAN DAN PROMOSI:
Imam Prawoto, Dian Gina Rahayu, Budi Rahardjo

KEUANGAN DAN UMUM:
Mangatur Lorielcide Paniroy

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI:
Abdul Halim, Marjuka Situmorang, Bantu Hotsan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:
Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan.
Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474
Fax. (021) 83787235

E-MAIL:
redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

WEBSITE:
www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X
MEREK: Ditjen HAKI Sertifikat IDM No. 000.108.028

PERCETAKAN:
PT Gramedia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Pemred Berita Indonesia (tengah) saat mewawancarai Gubernur Lemhannas, Prof. DR. Muladi, SH di ruang kerjanya, Kantor Lemhannas.

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera

Sidang Pembaca,

Dukacita menghampiri kami di akhir Maret lalu. Di sela-sela suasana *deadline* di dapur redaksi, kami mendapat kabar kalau Redaktur Senior yang merangkap tugas sebagai ilustrator dan karikaturis Majalah Berita Indonesia, Dendy Hendrias telah berpulang ke hadirat Allah, pukul 6.30 Wib, Selasa, 30 Maret 2010, dalam usia 59 tahun. Serta merta kami menundukkan kepala dan bersujud kiranya Sobat kami diterima Allah di sisiNya dan keluarga yang ditinggalkan dilindungi dan diberi penghiburan. Kami ikhlaskan keberpulanganmu Sobat!

Ketidakhadiran Pak Dendy, saat *deadline* kali ini, terasa sekali ada sesuatu yang hilang. Siapa yang akan mengisi karikatur dan ilustrasi? Rupanya, Pemred sebelumnya sudah mengantisipasi dengan mengajak bergabung seorang sobat muda, Ichida Sonny, berdarah campuran Jepang dan Jawa, yang bertalenta dan berlatarbelakang pendidikan grafika. Memang, ia masih memerlukan penyesuaian.

Pembaca yang budiman, terpaan angin negatif datang silih berganti melanda institusi penegak hukum di negeri kita. Yang terbaru soal makelar kasus di institusi penegak hukum (polisi dan kejaksaan) dan birokrasi pemerintah (Ditjen Pajak). Komjen Pol. Drs. Susno Duadji (mantan Kabareskrim) membuka aib adanya makelar kasus dalam tubuh Polri, institusi yang membesarkan namanya. Aib ini ikut menyeret nama pegawai Ditjen Pajak golongan IIIA Gayus Halomoan Tambunan yang memiliki uang Rp 28 miliar dalam rekening pribadinya. Uang itu diduga hasil pencucian uang. Hal ini jelas menunjukkan betapa korupnya aparat penegak hukum dan birokrasi. Di sisi lain, kejadian ini bisa menjadi momentum dan berkah terselubung untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan birokrasi pemerintah yang sudah bobrok. Uraian selengkapnya bisa Anda baca dalam *Berita Utama*.

Dalam rubrik *Lentera*, kami mengangkat reportase kedua tentang kunjungan rombongan HKBP Tebet ke Al-Zaytun. Setelah rombongan HKBP Tebet berkeliling meninjau berbagai fasilitas infrastruktur serta sistem tata kelola pembelajaran, ekonomi dan lingkungan hidup di Al-Zaytun, kekaguman tertinggi akhirnya termuarakan kepada Syaykh AS Panji Gumilang yang diapresiasi sebagai pemimpin yang telah dipilih Tuhan. Rombongan HKBP Tebet juga mengaku sangat terkesan dan mengagumi budaya toleransi dan perdamaian yang dibangun dan dikembangkan di Al-Zaytun.

Sementara dalam *Rubrik Wawancara*, Anda bisa membaca pandangan Gubernur Lemhannas, Prof Dr Muladi tentang demokrasi dan penegakan supremasi hukum di Indonesia. Dalam rubrik Berita Khas, kami mengulas tentang plagiat karya tulis dalam dunia pendidikan Indonesia yang makin marak.

Masih banyak rubrik lainnya yang bisa Anda baca seperti analisis Pemred Berita Indonesia mengenai sikap Presiden SBY yang melecehkan keputusan DPR soal bailout Bank Century dalam *IndepthNews*, ulasan lebih detail tentang teknologi LASIK dalam rubrik Berita Kesehatan, atau bagi Anda pecinta buku bisa membaca resensi buku 'Geliat Bahasa Selaras Zaman'.

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca, semoga Anda berkenan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

foto: dok.berindo

Kata Kuncinya Kebenaran

Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri, kini tengah bergulat melawan diri sendiri. Keguncangan terjadi setelah seorang jenderal berbintang tiga aktif, Komjen Susno Duadji, membuka aib sendiri dalam tubuh Polri, yang diistilahkan sebagai *whistleblower*. Keberanian (kenekatan) si *whistleblower* membuat sekujur tubuh (institusi) Polri merasa sakit, malu dan marah.

Kondisi galau ini muncul justru pada saat Polri patut dipuji atas keberhasilannya memperlemah jaringan terorisme. Tapi, sayang, kabar citra baik tentang keberhasilan Polri menghajar teroris itu hanya sepekan menjadi berita utama media massa. Kabar citra baik itu kemudian ditindih munculnya kabar buruk yang diawali berita dugaan penjebakan dan rekayasa pidana oleh Polri tentang kepemilikan ganja yang menimpa pedagang asongan.

Disusul ulah si *whistleblower*, membuka aib adanya makelar kasus pencucian uang dan pajak Rp25 miliar di Mabes Polri yang diduga melibatkan sekurangnya tiga jenderal. Bagai palu godam menghantam batok kepala oleh tangan sendiri (*whistleblower)* yang sedang terluka akibat merasa dikorbankan dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK.

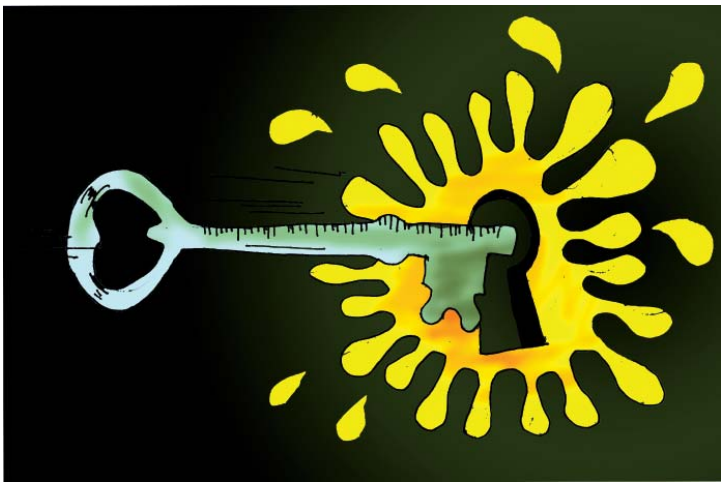

Kabar perihal citra buruk Polri ini kemudian tampil bertalu-talu di halaman muka *(headline*) hampir semua media di tanah air.

Keriuhan semakin menjadi tatkala para petinggi Polri menanggapi pengungkapan si *whistleblower* dengan 'amarah' berlebihan untuk menutupi rasa malu. Dengan sangat terburu-buru, si *whistleblower* ditetapkan sebagai tersangka (terperiksa) pelanggaran disiplin dan etika profesi. Bahkan menetapkannya sebagai tersangka pencemaran nama baik, walaupun sehari kemudian penetapan tersangka ini diralat.

Kemarahan ini, di satu sisi, memang bisa dimaklumi. Bayangkan, seorang Komisaris Jenderal (bintang tiga) aktif nonjob yang baru dipecat dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri, terbilang sebagai orang ketiga paling berkuasa di Mabes Polri, berbicara cuap-cuap di muka umum membuka aib Polri sendiri. Dimana etika profesinya sebagai polisi, apalagi dia seorang jenderal.

Bukankah seharusnya semua anggota Polri yang masih aktif terikat dengan disiplin keprajuritan, tribrata, kode etik, dan kehormatan Polri? Bukankah hal ini akan sangat berpotensi merusak disiplin, tribrata, kode etik dan kehormatan seluruh jajaran Polri, dari tingkat tertinggi sampai terendah? Bagaimana jadinya institusi kepolisian bila kejadian seperti ini dibiarkan?

Pertanyaan berikutnya, kenapa begitu lemah penerapan aturan internal (etika profesi) terhadap Susno. Dan kenapa pula Susno, jenderal aktif, tidak terlihat kehendaknya untuk mau tunduk pada aturan internal kepolisian? Ada apa? Adakah hal ini sekadar menyangkut masalah ketegasan kepemimpinan dalam tubuh Polri, atau ada masalah lain? Tentang hal ini, kita sependapat dengan Menkopolhukam Djoko Suyanto, selaku Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mempersilakan Kapolri untuk mengkaji apakah dalam tindakan Susno Duadji itu terdapat indikasi pelanggaran disiplin, kode etik, atau kehormatan.

Namun, di sisi lain dari mata uang yang sama, kita memandang substansi pengungkapan makelar kasus pencucian uang dan pajak Rp25 miliar dan kasus-kasus lain yang diungkapkan Susno dibuka dengan seterang-benderangnya. Untuk substansi masalah ini, dimana Susno bertindak sebagai *whistleblower*, sebaiknya janganlah dilawan dengan amarah dengan malah mengancam akan menghukumnya dan sempat buru-buru menetapkannya sebagai tersangka pencemaran nama baik.

Marilah memandang hal ini sebagai obat pahit, berkah terselubung, dalam upaya mengungkap kebenaran dan penegakan hukum. Sebuah kesempatan emas untuk menciptakan kepolisian yang profesional. Sebuah momentum menegakkan hukum dengan benar dan seadil-adilnya.

Kata kuncinya untuk mengubah rasa malu dan amarah adalah keikhlasan mencari dan menegakkan kebenaran. Dengan memandang pada koleksi normatif tekad Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal penegakan hukum, kita pantas berharap bahwa keikhlasan menegakkan hukum dan kebenaran itu bukanlah barang amat mahal. Keikhlasan yang mampu mengubur amarah, rasa malu bahkan pencitraan diri sendiri.

Sebab, kebenaran jauh lebih berharga dari upaya penutupan rasa malu (aib), pencitraan dan kehormatan semu. Apalagi, pada gilirannya secara otomatis (tanpa pamrih), kepercayaan, kehormatan dan citra baik itu akan datang sendiri jika (polisi kita) secara sungguh-sungguh dan ikhlas mencari, menegakkan dan membela kebenaran. Itulah kehormatan polisi kita, menjadi institusi terdepan dalam menegakkan kebenaran. ***Redaksi***

ilustrasi: sonny p

Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan 12840
  Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474
  Fax. (021) 83787235

Musnahkan Markus sampai Telur-Telurnya

Kesamaan antara makelar kasus (markus) dan teroris sama-sama jahat menghancurkan dan memberi ancaman nyata dan korbannya kepentingan rakyat. Markus atau calo ini mirip dengan teroris, keberadaan dapat dideteksi tapi sulit untuk dibuktikan. Sama dengan teroris dapat diendus, tetap tidak gampang untuk menangkapnya. Teroris beraksi langsung membunuh orang, sedangkan makelar kasus membunuh kepentingan masyarakat luas. Teroris tidak memilih korban, makelar kasus juga demikian adanya, tidak peduli pribumi atau nonpribumi yang penting berani menawarkan ongkos yang tinggi, dialah yang menjadi tuannya. Teroris berafiliasi kepada kelompok tertentu seperti Jamaah Islamiyah, sedangkan makelar kasus berafiliasi pada kepentingan atau kantong pribadi. Namun selama pejabat publik dan birokrasi masih tetap kotor, makelar kasus akan tetap hidup. Kemungkinan markus juga tidak hanya di kepolisian, namun di setiap tempat pelayanan publik seperti pembuatan SIM, pembuatan KTP, pembuatan surat akta tanah juga demikian, bahkan tiket kereta api tidak surut dari aksi calo yang semuanya perlu dimusnahkan. Layaknya memberantas teroris, hancurkan makelar kasus sampai ke telur-telurnya sehingga tidak menjadi gurita.

Hendriwan Angkasa
angkasa_h@yahoo.com

Hukum Mati Koruptor Kakap

Meskipun sejumlah penyelenggara negara ditangkap dan dipenjara karena kasus suap, korupsi masih marak terjadi. Tidak adanya efek jera bagi koruptor kelas kakap maupun kelas teri, perlu disikapi semua pihak secara serius demi memutus kasus suap. Selain membuktikan terbalik harta kekayaan mereka, hukuman mati perlu dipertimbangkan. Pembuktian terbalik ini terutama dilakukan bagi presiden, wakil presiden, menteri, pemimpin badan usaha milik negara, Kepala Polri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, dan pejabat strategis lainnya. Pejabat harus siap menjelaskan dari mana mereka dapatkan harta itu. Bilamana terbukti kekayaan pegawai yang didapat tidak bisa dijelaskan darimana sumbernya dan ada kemungkinan dari tindakan korupsi maupun suap, seharusnya bisa disita oleh Negara. Korupsi harus dihilangkan dari bumi pertiwi. Para koruptor jelas-jelas telah memakan uang Negara yang pada dasarnya dari uang rakyat. Pembuktian terbalik harus dilakukan, bila tidak jera juga, bisa diterapkan dengan hukuman mati.

T. Daud Yusuf
daud_ys@yahoo.com

Warnet Bisa Tangkal Teroris

Aksi terorisme yang terjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Pamulang, Tangerang, Banten hingga tewasnya gembong terorisme sekaliber Noordin M Top yaitu Dulmatin menjadi keprihatinan kita bersama. Untuk mencegah aksi terorisme yang semakin lama semakin brutal, tanpa mengesampingkan aparat keamanan, termasuk intelijen, diperlukan partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan tetap mewaspadai daerah tempat tinggalnya masing-masing. Hal ini dapat terpantau saat pengaktifan kembali pendataan antar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Terutama untuk warga baru yang harus lapor kepada Ketua RT setempat. Di samping itu juga, para pelaku teror dalam berkomunikasi sering menggunakan jasa internet. Karena internet adalah sesuatu yang menarik bagi para teroris dibandingkan dengan telepon seluler karena penggunaan internet aman tanpa mudah terlacak. Oleh karena itu, untuk mencegah terorisme, aturan agar pengunjung warnet mengisi daftar indentitas diri harus kembali digalakkan. Sebenarnya peraturan di atas terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menyebutkan setiap pengunjung harus mendaftarkan diri setiap kali menggunakan jasa warnet. Pendaftaran seperti ini besar kemungkinan untuk mencegah teroris.

Jennifer Woworuntu
jenifer_w@plasa.com

Aneh, MA Tidak Tahu Pengadilan Pajak

Berdasarkan referensi Wikipedia, Peradilan Pajak adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap seng-

keta pajak. Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan berkedudukan di ibu kota negara. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas, pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang wakil ketua. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Sungguh aneh bin ajaib, mengutip penjelasan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Ahmad Santoso, yang mengatakan lembaga Mahkamah Agung (MA) mengaku tidak tahu menahu tentang Pengadilan Pajak karena berada di wilayah abu-abu. MA mengaku dan menyadari Pengadilan Pajak masih perlu dibenahi terkait objeknya, bagaimana pengawasannya, dan bagaimana nasibnya ke depan. Kalau MA tidak tahu menahu tentang Pengadilan pajak. Kalau penegak hukum tidak mengetahui kinerja Pengadilan Pajak berikut segala bentuk markus-markusnya. Lantas bagaimana tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, terkait kinerja Pengadilan Pajak sebagai lahan yang basah namun rawan penyimpangan hukum. Kita jadi maklum, pantas saja tokoh kunci kasus mafia pajak, Gayus Tambunan, kabur setelah mengungkapkan informasi mengenai praktik makelar kasus (markus) yang melibatkan oknum-oknum di Ditjen Pajak, Departemen Keuangan, kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Bisa saja, Gayus nekat menghilang, kemungkinan besar karena takut terhadap keselamatan diri dan keluarganya. Dalam benak orang awam, markus saja takut, konon pula rakyat kecil.

Widyawati, SH
widya1983@yahoo.com

Susno, Kenapa Tidak dari Dulu?

Dugaan praktek makelar kasus dalam penyidikan kasus penyimpangan pajak di Mabes Polri khususnya di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, kini bergulir terus bagai bola panas. Kasus itu kian jadi sorotan setelah mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Polisi Susno Duadji melaporkannya ke satgas mafia hukum (18/03/10), meskipun Susno tidak menyertakan bukti-bukti. Susno Duadji melaporkan dugaan pegawai pajak yang menerima suap saat bertugas mengawasi pembayaran pajak beberapa perusahaan. Ia mengungkapkan kasus ini melibatkan dua jenderal dan 3 pamen Polri ke satgas mafia hukum. Kasus jenderal 'markus' hanya satu dari beberapa kejutan dari Susno Duadji. Sebelumnya, mantan Kapolda Jawa Barat ini jadi tokoh sentral dalam kasus Cicak Vs Buaya, bersaksi di sidang Antasari Azhar, bahkan menyebut penyidikan kasus Bank Century tak berlanjut demi Boediono. Jika pengakuan Susno itu benar, kita pasti akan mendukungnya. Tetapi kenapa baru sekarang itu disebut. Kenapa tidak dari dulu?

Reza Sanubari
J1 Bukit Duri Selatan, Tebet, Jakarta Selatan

Tempat Anda untuk Berlangganan

Majalah BERITAINDONESIA

Anda yang berada di luar Pulau Jawa dapat menghubungi alamat di bawah ini :

BANDA ACEH : BTN Ajuen, Lr Melati No. 118 Kec, Peukan Bada, Banda Aceh 23351. Tlp (0651)41093, MEDAN : Komplek Vila Palm Kencana Blok R No. 10 KM 12, Medan-Binjai 20351. Tlp (061)8460646, SIANTAR : Jl. Rambing No. 18, Pematang Siantar, LABUHAN BATU : Jl. Padang Bulan No. 28, Rantau Prapat. KARO : Jl. Sangab Enlau No. 51 Kaler Jahe. RIAU : Jl. Ababil No. 15B Rt 07 Rw. 07, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru 28124, Riau. Telp (02761) 26578, RIAU UTARA : Perum Beringin Patra Gg. Poros No. 3 Rt 02/09, Bukit Datuk, Dumai 28825. Telp (0765)36219. RIAU SELATAN : Jl. Pattimura No. 28C Rt. 06/02, Kel. Skip Hilir, Rengat Timur, INHU, Riau. Telp (0769)21932, RIAU KEPULAUAN : Jl. Sri Pulau Gg. Kayu Manis No. 129W Rt. 03/02, Kel. Bengkalis Riau. Telp (0766)22924, PADANG : Jl. Pamancingan I No. 1Rt. 006/02 Kel. Pasar Gadang, Padang Selatan, Sum-Bar 25210. Telp (0751)27289, JAMBI : Jl. Depati Purbo, Komplek Karya Telawai Permai II No. 06 B, Kel. Pematang Sulur RT 16, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Telp 081366106709, BENGKULU : Jl. Kemang Manis No. 8 Rt. 08/Rw. 2, Kel. Sawah Lebar, Kec. Gading Cempaka, Kodya Bengkulu 38228. Telp (0736)20663, PALEMBANG : Perum Mas Karebet Blok A1 No. 15 Palembang 30154. Telp (0711)416545, MUARA ENIM : Perum Gunung Ibul Blok C2 No. 8 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan Telp (0713)322420, PANGKAL PINANG: Achmad Effendi, Jl.Sriwijaya RT.001/001, Gedung Nasional, Taman Sari. LAMPUNG : Jl. Wiraswasta No. 23 Rt. 02 Lk. I Kel. Gedong Meneng, Kec. Kedaton, Bandar Lampung 35145. Telp (0721)701281, KOTABUMI : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara. Telp (0724)328369, PONTIANAK : Jl. Karimata No. 19, Kelurahan Sui Bangkong Pontianak 78116, SINGKAWANG : Jl. Pembangunan Gg. Sukaramah No. 27A Singkawang Kal-Bar, SINTANG : Jl. Imam Bonjol No. 54 Sintang 78611. Telp (0562)21544, KETAPANG : Jl. Kol. Sugiono No. 48 Ketapang, BALIKPAPAN : Jl. Sepinggan XI, Rt 33 No. 6, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan 76115. Telp (0542) 764365, PASIR : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Rt. 05 Rw. 02 Tanah Grobot Kab. Pasir, Kal-Tim. Telp (0543)22335, SAMARINDA : Jl. Latsitarada III, Perum Bukit Indah Blok B No. 6, Kel. Sel Kunjang Samarinda. Telp (0541)273035, BERAU : Jl. SM Aminuddin No. 749 Tanjungredep Kab. Berau Kal-Tim. Tlp (0554)23130, BANJARMASIN : Komplek Kayu Tangi I No. 28 Rt. 45, Kec. Banjar Utara Banjarmasin 70123. Telp (0511)304396, PALANGKARAYA : Jl. Karanggan No. 1 Kelurahan Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya 73113, Kalimamtan Temgah. Telp (0536)38958, PANGKALAN BUN : Jl. Perwira No. 1 Rt/Rw 05, Kel. Mendawai, Kec. Arsel, Pangkalan Bun Kal-Teng. Telp (0532)24452, KAPUAS : Jl. Seroja No. 2 Selat Dalam, Kuala Kapuas, Kal-Teng. Telp (0513)24082, BUNTOK : Jl. Ampah Buntok, No. 24 Rt. 40. Ampah, Barito Selatan, Kal-Teng. Telp (0622)31334, MANADO : BTN Nusantara Permai Blok C No. 11 Mapanget Barat, Manado 9524, MAKASSAR : Komplek Mangasa Permai Jl. Tallasalapang II Blok J1 No. 12, Makassar, Sul-Sel. Telp (0411)863655, PAREPARE : Jl. Wakke'e No. 5 Parepare Sul-Sel. Telp (0421)22785, GOWA : Jl. Syekh Yususf V/I Gowa. Telp (0411)861661, BONE : Jl. Hussain Jeddawi Baru No. 9A, Bone, Sul-Sel. Telp (0481)2000041, PALOPO : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palopo. Telp (0471)24310, PALU : Jl. Tulip II No. 1, Perumnas Balaroa, Palu, Sul-Teng. Telp (0451)460717, Fax. (0451)460717, E-mail: ypi_calebaswustho@yahoo.com. KENDARI : Jl. A. Yani 204 Kendari, Telp (0401) 390913, HP. 081320696320 a/n. S. Edi Nurrahman. BUTON : Jl. MH. Thamrin No. 32A, AMBON : BTN Kanawa Indah Blok C-3 No. 12 Air Kuning, Ds. Batumerah Kodya Ambon, Maluku 97128. Telp (0911)310427, TIMIKA : Jl. Pendidikan No. 10, Desa Kopra Kopa, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika/Timika, Irian Jaya, KUPANG : Jl. Trikora No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Air Mata, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 85000, BELU : Perum Ray Belu Permai A/9, Belu. Telp (0389)22408, MATARAM : Jl. R. Suprapto No. 37 Ampenan, Kodya Mataram 83000. Telp (0370)632331, LOMBOK : Jl. Pejanggik No. 66 Pancor. Lombok. Telp (0376)21718, SUMBAWA : Jl. Hasanuddin Gg. Teratai, Sumbawa. Telp (0371)21070, BALI : Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerti No. 3 Pd.Sambian Denpasar Barat 80117. Telp (0361)485890, MALAYSIA : 32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor. Telp (03)55137009, NEW ZEALAND : Ikhwan Triatmo. JAWA BARAT : Ade Wiharyana, Jl. Purnawarman No.5, Bandung – TARAKAN : S.L. Pohan, Jl. Gereja Rt.17 No.59, Markoni, Tarakan - Kaltim 771211 – PURWAKARTA : Bernard Sihite, Kantor Perwakilan PWI, Jl. KK Singawinata No.23, Purwakarta, Tlp. (0264) 205081

Pidato dengan Hati

Megawati Soekarnoputri

Pidato Megawati menggetarkan bukan hanya bagi kader PDIP, tapi juga di luar PDIP. Ia menekankan pentingnya politik dengan prinsip dan bukan menangis karena pencitraan.

Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada kongres tanggal 6 hingga 8 April 2010 di Hotel Inna Bali Beach, Sanur, Bali, telah berakhir. Seperti diperkirakan sebelumnya, Megawati Soekarno Putri kembali terpilih sebagai Ketua Umum. Ia dibantu 27 pengurus lainnya. Kongres kali ini sungguh menarik perhatian publik. Bukan hanya oleh kader PDI-P, tapi juga partai lainnya.

Kongres ini dianggap fenomenal terkait pidato Megawati. Pidato tersebut sangat hidup dan memiliki daya persuasi tinggi yang membuat pendengar, baik kader PDI-P maupun di luar partai itu tergetar. Pidato politik kali ini pun dianggap merupakan pidato Mega paling menggigit selama sepuluh tahun terakhir. Bahkan dianggap lebih unggul dibanding pidato ketua umum partai lainnya.

Dari isi pidatonya, tiga hal yang sangat menarik untuk diperhatikan yaitu, penegasan kembali tentang PDI-P sebagai partai ideologis berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Ini dipilih sebagai pondasi, arah, tujuan, sekaligus bingkai perjuangan partai yang memihak kepada rakyat. Dalam hal ini, dia menyoroti politik belakangan ini yang sangat pragmatis dan hanya berorientasi jangka pendek semata.

Megawati juga secara tegas mengatakan pilihan PDI-P menjadi partai penyeimbang bagi pemerintahan yang berkuasa dengan tidak memasuki kursi kekuasaan, melainkan sebagai mitra pemerintah yang kritis yang berada di luar pemerintahan.

Pilihan politik ini fenomenal, karena selain strategis, pilihan itu juga problematis. Dimana dengan pilihan itu, ia tidak saja mensyaratkan kecakapan dan keterampilan kepemimpinan parpol yang kuat, strategi implementasi yang terencana dan jelas, juga konsistensi dari seluruh anggota partai untuk menaatinya. Padahal, salah satu persoalan internal yang mengemuka di PDIP belakangan ini adalah belum satunya pendapat tentang posisi ini. Contohnya, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Taufik Kiemas yang notabene adalah suami Mega sendiri hendak menarik-narik partai ini merapat dengan pemerintah yang sedang berkuasa.

Berikutnya, Megawati juga bicara soal regenerasi di PDI-P. Walaupun tidak detail, ia mengatakan partainya telah melakukan regenerasi itu di tingkat DPP hingga ranting, dengan 70 persen diisi orang muda.

Satu hal lagi yang membuat publik merasa tergetar mendengar pidato Megawati itu adalah tatkala ia menegaskan fenomena pencitraan dalam dunia politik sekarang. "Kita harus bekerja di dalam situasi 'citra' menjadi daya tarik baru yang jauh lebih kuat ketimbang ideologi," katanya.

Menurutnya, moralitas negara demokrasi yang dibangun melalui partai, idealnya dimaksudkan agar pendidikan politik warganegara dapat diwujudkan. Partai menurutnya adalah "taman sari" untuk menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa dan negara guna mengisi sirkulasi kekuasaan secara damai. "Tugas etis partai di atas dalam kenyataannya disubkontrakkan kepada segelintir konsultan politik yang menghasilkan deretan angka yang menghegemoni masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, prinsip telah dikalahkan oleh citra, dan pendidikan politik digantikan dengan indeks kepuasan publik. Survei dan indeks kepuasan menjadi instrumen baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Citra dikedepankan, tetapi saat sama, membiarkan tugas sejarah mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta melahirkan Indonesia yang bermartabat menjadi sekadar pekerjaan seolah-olah," ujarnya.

"Saya sering merenung dan menertawakan diri saya, bagaimana saya bisa belajar pada suatu partai yang dalam waktu begitu cepat bisa naik sampai 300 persen. Saudara-saudara, saya ingin belajar kiatnya karena PDI-P juga berkeinginan seperti itu," katanya seakan menyindir partai yang sedang berkuasa sekarang ini.

Menanggapi pidato tersebut, hampir semua pengamat politik mengapresiasi. Pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali misalnya, menyatakan, jarang menjumpai pidato panjang yang bernas di sepanjang isinya seperti itu. Ia bahkan mengatakan, hal yang juga direfleksikan dalam pidato itu adalah Megawati masih dibutuhkan negeri ini. "Kita butuh pemimpin yang tegas dalam bersikap, tidak mencla-mencle," katanya.

Presiden PKS, Luthfie Hasan Ishaq, juga mengapresiasi pidato tersebut. "Bagus. Sikapnya menarik. Kita memberi apresiasi tehadap sikap tersebut," katanya (6/4). Yudi Latief pada acara seminar di Bali, Rabu (7/4) juga mengatakan bahwa ia yakin ideologi yang dipegang PDIP akan membawa partai itu tetap bertahan di pemilu 2014. "Itu pentingnya politik dengan hati. Biasa seorang revisioner memang selalu seperti itu, bukan menangis karena pencitraan. Ini sikap pemimpin yang bisa mengaktualisasikan keinginan rakyat," ujarnya.

Dengan telah ditegaskannya partai ini sebagai partai ideologis, kini publik menunggu implementasinya dalam karya nyata. PDI-P harus dapat mengejawantahkan prinsipnya dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. ■ **SIT**

foto: vivanews.com

Nyepi Tanpa Siaran Radio dan Televisi

16/03 - Untuk pertama kali, semua stasiun radio dan televisi, baik lokal maupun nasional, menghentikan siaran mereka di Bali berkenaan dengan pelaksanaan perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1932 di Pulau Bali, Selasa (16/3). Ketua Komisi Penyiaran dan Informasi Daerah Bali Komang Suarsana mengatakan, langkah itu mengakomodasi permintaan warga Bali sebagai bentuk penghormatan terhadap Nyepi, khususnya konsep amati lelanguan (larangan menikmati hiburan). Permintaan itu dipertegas dengan rekomendasi Gubernur Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali. Permintaan itu pun telah disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika serta KPI Pusat di Jakarta. Di Bali, saat umat Hindu khidmat melaksanakan Nyepi, umat agama lain menghormati pelaksanaan Catur Brata Penyepian dengan ikut menjaga larangan menghidupkan cahaya (amati geni), larangan bekerja (amati karya), larangan bepergian (amati lelungan), dan larangan menikmati hiburan (amati lelanguan).

Rapat DPR Ricuh

02/03 - Rapat Paripurna DPR, dengan agenda pembacaan hasil penyelidikan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century berakhir ricuh. Kericuhan dipicu akibat penutupan rapat secara tiba-tiba oleh Ketua DPR Marzuki Alie saat masih banyak anggota Dewan ingin berbicara. Namun, Marzuki Alie mengaku telah melaksanakan tugas sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPR dan Peraturan Tata Tertib DPR. Belakangan, protes bermunculan baik di internal DPR maupun kalangan di luar parlemen. Kurangnya pengalaman politik menjadi penyebab kericuhan tersebut.

Kekayaan Presiden dan Wapres Naik

05/03 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono mengumumkan harta kekayaannya yang telah diverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengumuman yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta ini dihadiri Pimpinan KPK dan semua anggota kabinet. Total harta kekayaan SBY pada tanggal 23 November 2009 sejumlah Rp 7.616.270.204 dan 269.730 dollar AS. Dalam pelaporan sebelumnya pada tanggal 14 Mei 2009, total harta kekayaannya mencapai Rp

Karikatur Berita

ilustrasi: sonny p

6.848.949.611 dan 246.389 dollar AS. Sementara total harta kekayaan Wapres Boediono, pada 30 September 2009 sejumlah Rp 28.082.373.823 dan 16.000 dollar AS. Dalam pelaporan sebelumnya pada tanggal 30 April 2009, total harta kekayaannya mencapai Rp 22.067.815.019 dan 15.000 dollar AS. Pengumuman ini dikritik oleh Indonesia Corruption Watch. "Pengumuman LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) di Istana yang dihadiri pimpinan KPK belum pernah terjadi sebelumnya," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho di Jakarta.

Teroris di Aceh dan Jakarta

09/03 - Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf menegaskan, kelompok terorisme di Aceh bukan murni berasal dari Aceh. Mereka berasal dari Pulau Jawa dan bukan dari kelompok mantan Gerakan Aceh Merdeka. Mereka hendak menjadikan Aceh sebagai basis perlawanan teroris di Asia Tenggara. Hal itu disampaikan Irwandi di Jakarta, didampingi mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf. Ia mengaku sudah mengetahui gerakan teroris tersebut setahun yang lalu. Kelompok tersebut bergerak dari kampung ke kampung dan membuat ceramah keagamaan. Mereka juga merekrut sekitar 50 orang untuk kemudian dilatih menembak. Sementara itu, selain 17 orang yang ditangkap di Aceh, polisi sudah menahan 9 orang. Mereka berasal dari Jakarta, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten dan Bogor. Di Pamulang, polisi menembak mati tiga orang, yakni Dulmatin, Hasan Nour (29), dan Ridwan (29). Hasan dan Ridwan adalah pengawal Dulmatin. Sementara itu, jenazah Dulmatin, Kamis (11/3) malam, dibawa pulang ke kampungnya di Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah.

Satu Jam demi Bumi

27/03 - Berbagai kota dari 92 negara mematikan lampu selama sejam untuk memperingati Hari Bumi dan mendukung gerakan penyelamatan lingkungan terhadap perubahan iklim. Tahun lalu, acara ini diikuti oleh 88 negara. Daerah-daerah baru yang turut serta pada tahun 2010 termasuk Kosovo, Madagaskar, Nepal, Arab Saudi, Mongolia, Kamboja, Ceko, Paraguay, Ekuador, dan Kepulauan Marina Utara di Samudra Pasifik. Kota Jakarta sendiri sudah ikut ambil bagian untuk kedua kalinya dimana tahun ini kota Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar ikut untuk pertama kalinya melakukan pemadaman lampu. Jam Bumi (Earth Hour), yakni kesepakatan mematikan lampu selama sejam, awalnya adalah inisiatif dari WWF, dimulai pada 2007 di Sydney, Australia, saat dua juta warga mematikan lampu mereka selama sejam. Pada 2008, jumlah peserta yang terlibat sudah melompat menjadi 50 juta orang di seluruh dunia. Pada 2009, ratusan juta orang berpartisipasi, di mana lebih dari 4.000 kota mematikan lampu.

Ujian Nasional 2010

26/03 - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sekolah dipercepat menjadi minggu ke-3 Maret 2010. Jadwal tahun 2010 ini lebih cepat dari UN yang biasanya berlangsung pertengahan April. Hal ini disebabkan UN 2010 akan dilaksanakan 2 kali yakni terdiri dari UN utama dan UN ulangan. Siswa yang tidak lulus pada UN utama, bisa mengulang pada UN tahap kedua. UN ulangan dilaksanakan

Karikatur Berita

ilustrasi: sonny p

setelah pengumuman UN utama. UN Tingkat SMA/MA, SMALB, dan SMK berlangsung 22-26 Maret 2010 dengan UN ulangan 10-14 Mei 2010. UN Tingkat SMP/MTs dan SMPLB berlangsung 29 Maret-1 April 2010 dengan UN ulangan 7-20 Mei 2010. Sedangkan untuk tingkat SD/MI UN Utama dilaksanakan 4-6 Mei 2010. Pelaksanaan ujian nasional pada Senin (22/3) sampai 26 Maret 2010 diwarnai kesalahan-kesalahan seperti, soal yang tertukar, berita acara keliru, dan lembar soal rusak. Isu kebocoran soal UN juga kembali merebak. Untuk menangani berbagai pelanggaran dan dugaan itu, kementerian membentuk tim khusus untuk menelusuri dan meneliti kesalahan atau pelanggaran pelaksanaan ujian. Pada hari pertama dan kedua pelaksanaan UN, Posko UN mendapatkan 417 laporan dan 1.090 laporan, sebagian besar terkait kebocoran soal.

Tumpak Diberhentikan dari KPK

22/03 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menerbitkan keputusan tentang pemberhentian dengan hormat Tumpak Hatorangan Panggabean dari jabatan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Tumpak menerima keppres (keputusan presiden) tentang pemberhentian selaku pimpinan dan ketua sementara. Menurut Tumpak, tidak perlu diajukan calon pengganti setelah ia tidak lagi berada di KPK. Pasalnya, empat unsur pimpinan KPK tetap bisa berjalan optimal. Penggantian pimpinan baru justru dirasakan kurang efektif karena waktu yang tersisa tinggal 1,5 tahun. Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah mengatakan, sepeninggal Tumpak, empat unsur pimpinan KPK tetap bekerja seperti biasa dan kinerjanya tidak akan terganggu. "KPK tetap melakukan tugasnya secara independen, tidak diintervensi," ujarnya.

Bali Tetap Tolak UU Pornografi

26/03 - Uji materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi akhirnya ditolak Mahkamah Konstitusi. Namun warga Bali tetap konsisten dengan sikapnya, menolak UU tersebut. Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, Bali tidak bisa melaksanakan UU Pornografi karena UU itu tidak memenuhi unsur sosiologis dan psikologis. Menurutnya UU tersebut bisa dilaksanakan bila memenuhi tiga aspek atau unsur, yakni aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis. Dalam hal ini, secara yuridis UU Pornografi sudah terpenuhi karena mendapat pengesahan DPR. Namun di Bali, secara sosiologis dan psikologis, materi dalam UU tersebut tidak bisa dilaksanakan.

KH Sahal dan KH Said Aqil Pimpin NU

28/03 - KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh terpilih sebagai Rais Aam Syariah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan KH Said Aqil Siradj sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU periode 2010-2015. Dengan terpilihnya kedua tokoh tersebut menunjukkan masih terpeliharanya tradisi demokrasi ala ulama ahlussunnah wal jamaah. Khusus untuk posisi rais aam, senioritas keulamaan, baik dari sisi keilmuan, wawasan, maupun usia, tetap menjadi pertimbangan pilihan peserta muktamar untuk memilih pimpinan tertinggi NU. Sedangkan posisi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU yang ditempati KH Said Aqil Siradj menunjukkan figur ulama masih dipilih warga NU untuk memimpin organisasi itu dibandingkan dengan sosok politisi. "Saya tak akan menarik NU dalam politik praktis, siapa pun yang mengajak saya. Bagi saya, menjadi Ketua Umum PBNU sudah di atas segalanya, "kata Said.

Gempa 7,2 SR Guncang Aceh

07/04 - Gempa bumi berpotensi tsunami dengan kekuatan 7,2 SR terjadi di Aceh pada pukul 05:15:03 WIB subuh. Pusat gempa berada pada lokasi 2,30 derajat Lintang Utara dan 96,87 derajat Bujur Timur dengan pusat gempa sekitar 60 km tenggara Sinabang, Aceh, pada kedalaman 24 km. Gempa juga dirasakan di Meulaboh, Sibolga, Padang Sidempuan, Medan, Tarutung, dan Samosir. Setelah gempa pertama, sempat juga terjadi gempa susulan dengan kekuatan lebih rendah sekitar 5,1 SR. Sedikitnya tercatat 17 orang luka-luka dan kini dirawat di RSU Simeulue.

Membuka Misteri Makelar Kasus

Ini berita hebat. Markus dan mafia hukum itu sungguh-sungguh nyata (terbukti), rakus dan jahat. Seorang jenderal polisi (bintang tiga) aktif, mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, tampil gagah berani (nekad) sebagai *whistleblower.* Dia yang tampaknya sedang 'terluka' membuka rahasia mafia makelar kasus (markus) atau mafia hukum di tubuh Polri (institusinya sendiri) dan lembaga peradilan lainnya, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan pengadilan pajak, yang selama ini penuh misteri.

Pengungkapan misteri mafia hukum oleh seorang jenderal itu membuat pihak-pihak terkait heboh bak kebakaran jenggot. Terutama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang merasa 'dikhianati' berusaha membantah, berputar-putar dan berusaha dengan berbagai cara membidik balik si *whistleblower*.

Kasihan Polri yang patut dipuji atas keberhasilannya memperlemah jaringan terorisme. Tapi, sayang, di sisi lain, wajah Polri belum begitu baik akibat belum gemilang memberantas korupsi bahkan masih terus dirusak maraknya praktik tercela, seperti salah tangkap, penjebakan dan rekayasa pidana serta makelar kasus.

Hampir bersamaan dengan kabar keberhasilan Polri membongkar dan melemahkan jaringan teroris di Pamulang dan Aceh, antara lain dengan tewasnya Dulmatin, teroris yang diburu beberapa negara, kabar perihal citra buruk Polri yakni penjebakan dan rekayasa pidana serta makelar kasus juga tampil di halaman muka (headline) hampir semua media di tanah air.

Kabar citra baik tentang keberhasilan Polri menghajar teroris hanya sepekan menjadi berita utama media massa. Kabar citra baik itu kemudian ditindih munculnya kabar buruk yang diawali berita dugaan penjebakan dan rekayasa pidana oleh Polri tentang kepemilikan ganja yang menimpa pedagang asongan Usep Cahyono bin Asep Saipudin (20). Kendati Polri dengan tegas

Susno Duadji

membantah dugaan penjebakan dan rekayasa pidana ini, ternyata publik tidak mudah mempercayainya.

Kekurangpercayaan publik terhadap Polri memang bukan hal baru. Apalagi belum hilang dari ingatan publik tentang riuhnya kasus kriminalisasi pimpinan KPK (Bibit dan Chandra, bahkan Antasari). Kendati tidak pernah diakui secara terbuka tentang adanya upaya kriminalisasi pimpinan KPK itu, tetapi publik telah memandangnya sebagai salah satu aib besar. Kasus yang ditimpakan kepada Bibit dan Chandra sudah dihentikan, sudah cukup bagi publik untuk tidak lagi mempersoalkannya. Walaupun belakangan, setelah terkuaknya banyak fakta di persidangan, publik masih menunggu vonis banding kasus pembunuhan berencana yang didikwakan kepada Antasari.

Dalam suasana riuh kabar baik dan buruk tentang Polri itu, lalu menyusul sebuah kabar baru, yang sekali lagi, menghentak publik. Kabar makelar kasus

foto-foto: ist

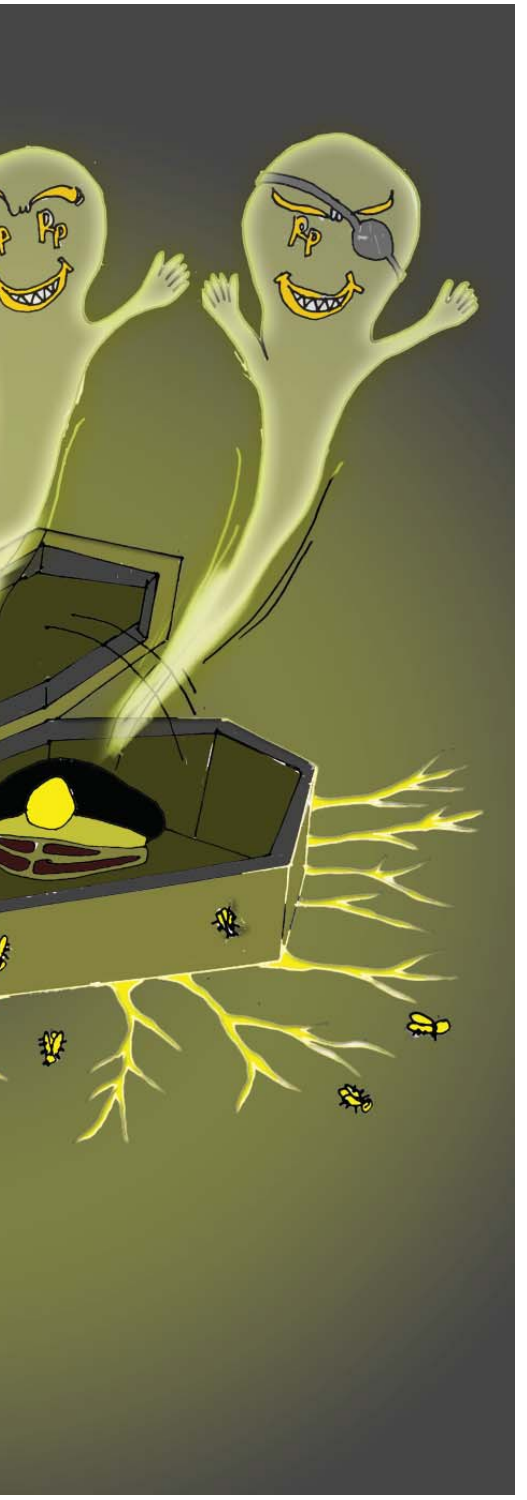

di Mabes Polri, terkuak dari seorang jenderal polisi (bintang tiga), mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji. Bagai palu godam menghantam batok kepala oleh tangan sendiri (*whistle blower)* yang sedang terluka akibat merasa dikorbankan dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK.

Susno Duadji yang sebelumnya telah memberi kesaksian dengan sebuah fakta baru dalam persidangan Antasari yang didakwa sebagai otak pembunuhan berencana, kemudian membuka tabir aib makelar kasus (markus) di Mabes Polri menyangkut kasus *money laundering* dan pajak senilai Rp.25 miliar yang diduga melibatkan nama tiga jenderal polisi.

Tiga Jenderal Polisi

Pengungkapan aib makelar kasus di Mabes Polri itu, dikumandangkan Susno Duadji, selain dalam diskusi bukunya, *Bukan Testimoni Susno*, Rabu (10/3/2010) di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pria yang tampaknya merasa dikorbankan dalam kasus kriminalisasi KPK dengan pencopotan dari jabatannya 24 November 2009 itu juga telah melaporkannya kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada Kamis (18/3/2010).

Susno mengungkapkan, ada markus untuk *money laundering* dan pajak di Mabes Polri yang "jatahnya" mencapai Rp 25 miliar. Dia berharap kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, agar jangan hanya melihat tempat tidur Arthalyta.

Menurut Susno, memberantas makelar kasus di institusi penegak hukum bukan pekerjaan sulit. Tak perlu menggunakan kamera pengintai yang kini banyak dipasang di sejumlah institusi. "Tangkap markus kok pakai CCTV, memangnya orang halus? Mereka itu kalau datang pasti telepon, koq," ujar Susno.

Khususnya di Mabes Polri, menurut Susno, para pemainnya mulai dari pejabat di bawah Kabareskrim hingga yang levelnya di atas Kabareskrim. Dia mengaku hanya bisa mengungkap markus di bawah Kabareskrim. Sementara markus di atas Kabareskrim ke atas tidak bisa dia ungkap. Dia pun menyebut nama dua brigadir jenderal polisi yang berada di bawah Kabareskrim, terlibat di balik praktik makelar kasus dalam penanganan kasus money laundering dan korupsi dana wajib pajak di Polri.

Keterlibatan para jenderal itu, menurut Susno, terjadi saat Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengusut dugaan kasus pencucian uang yang dilakukan seorang pegawai pajak bernama Gayus Tambunan bersama kelompoknya yang beranggotakan empat sampai enam orang mengawasi kewajiban pembayaran pajak di empat sampai enam perusahaan. Di rekening Gayus, berdasar hasil penelusuran PPATK sebagaimana dilaporkan ke Bareskrim, masuk aliran dana mencurigakan senilai lebih kurang Rp 25 miliar.

Berdasarkan laporan itu, Susno pun memerintahkan Direktur II Ekonomi Khusus, yang kala itu dijabat Brigjen Edmon Ilyas, untuk memprioritaskan pengusutan kasus itu hingga tuntas. Bersamaan dengan itu, uang senilai Rp 25 milliar yang diduga sebagai hasil kejahatan itu pun dibekukan oleh Susno selaku Kabareskrim.

Selain kasus pajak Rp.25 miliar itu, Gayus Tambunan juga diduga terlibat kasus pencucian uang kurang lebih Rp.395 juta. "Waktu saya mau turun dari Kabareskrim, kasus kecil (pencucian uang) itu sudah selesai, tinggal dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang. Yang besar (pajak) masih disidik. Saya masih sempat tanyakan kepada anak buah saya

POLRI DAN KEJAKSAAN: *Jaksa Agung Hendarman Supanji dan Kapolri Bambang HD belum menyatakan bertanggung jawab.*

ilustrasi: sonny p

RENUMERASI: *Menteri Keuangan Sri Mulyani, reformasi birokrasi yang gagal*

sebelum turun (dari Kabareskrim) bagaimana kelanjutan penanganan kasus itu," ujar Susno.

Saat itu, Susno juga masih memerintahkan agar kasus pajak itu diungkap korupsinya hingga tuntas. "Bayangkan saja pegawai kecil saja dapat begitu besarnya, apalagi yang jabatannya lebih besar. Dia bisa begitu kan karena pasti dapat izin dari atasannya. Kan selalu harus melapor dan minta tanda tangan pimpinannya," logika Susno.

Kemudian, di tengah pengusutan kasus tersebut, Susno dilengserkan (dikorbankan) dari jabatan Kabareskrim pada 24 November 2009, sebagai respon atas rekomendasi Tim Delapan tertanggal 16 November 2009. Tim Delapan adalah Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yang populer di publik sebagai kasus kriminalisasi KPK. Tim itu beranggotakan delapan orang, sehingga disebut Tim Delapan, dipimpin Adnan Buyung Nasution.

Waktu itu, Tim Delapan meyakini Kabareskrim Susno Duadji terlibat, bahkan paling bertanggung jawab, dalam upaya rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK, setelah mendengar rekaman percakapan telepon Anggodo Widjojo yang dibuka dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Dalam rekaman itu, Anggodo menyebut Truno 3 yang langsung disimpulkan oleh Tim Delapan sebagai Kabareskrim Susno Duadji. Kendati Susno menjelaskan bahwa di Mabes Polri yang disebut Truno 3 itu adalah kode untuk Direktur III Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Sedangkan kode untuk Kabareskrim adalah Tribrata 5.

Selain, itu kendati Susno juga telah menjelaskan bahwa dia sebagai Kabareskrim tidak dilibatkan dalam pengusutan dugaan suap dan pemerasan yang dituduhkan kepada pimpinan KPK (Bibit-Chandra), untuk menghindari konflik kepentingan, tetapi publik, terutama Tim Delapan, tetap tidak percaya.

Disebut untuk menghindari konflik kepentingan, karena pada saat bersamaan KPK tengah mengusut kasus pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century serta kasus korupsi Masaro yang melibatkan Anggoro Widjojo, kakak Anggodo Widjojo. Karena dalam kasus pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century, disebut ada surat yang ditandatangani Susno dan rekaman percakapan telepon antara Susno Duadji dan Lucas (pengacara Budi Sampoerna) menyebut angka 10 yang diasumsikan sebagai pemberian Rp.10 miliar kepada Susno atas keluarnya surat itu. Sedangkan dalam kasus korupsi PT Masaro, Susno pernah menemui Anggoro (bos Masaro) di Singapura.

Kendati Susno telah menitikkan air mata ketika menjelaskan bahwa dia tidak permah menerima Rp.10 miliar dari Budi Sampurna atau siapapun dalam kasus Bank Century, serta keberangkatannya ke Singapura menemui Anggoro adalah dalam rangka tugas resmi atas perintah Kapolri, tetapi publik, terutama Tim Delapan, tidak percaya bahwa Susno tidak terlibat.

Tim Delapan antara lain merekomendasikan kepada Presiden, untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaaan SKRT Departemen Kehutanan; hendaknya dituntaskan.

Bahkan sebelum rekomendasi itu disampaikan, Tim Delapan telah terlebih dahulu mendesak (mengultimatum) agar Susno Duadji dinonaktifkan selama masa kerja Tim Delapan. Susno sendiri meresponnya dengan secara sukarela menyatakan diri mengundurkan diri dari jabatan Kabareskrim pada tanggal 5 November 2009. Namun, Kapolri hanya menyetujui penonaktifan. Lalu setelah nonaktif, Susno diaktifkan kembali pada 9 November 2009 setelah proses pemeriksaan Tim Delapan atas dirinya selesai.

Namun setelah rekomendasi akhir Tim Delapan disampaikan kepada Presiden pada 16 November 2009, delapan hari berikutnya, tepatnya 24 November 2009, Kapolri secara resmi mengumumkan kepada publik pemberhentian Susno Duadji dari jabatan Kabareskrim. Boleh mungkin Susno merasa dihukum (dipecat) walau bukan dia yang salah. Dia digantikan Komjen Pol Ito Sumardi Djunisanyoto.

Hanya Dua Hari Setelah Susno Lengser

Menariknya, hanya dua hari setelah Susno dilengserkan, tepatnya 26 November 2009, uang Rp.25 miliar yang diblokir Susno sebagai Kabareskrim, karena diduga sebagai hasil kejahatan pencucian uang dan penggelapan pajak di rekening Gayus, blokirnya dibuka dan langsung

foto: matanews.com

LAPOR PAJAK: *Masyarakat dipaksa bayar pajak, di lain pihak petugas pajak menilap pajak itu*

dicairkan.

Lalu, setelah lengser dari jabatan Kabareskrim, Susno yang mengaku masih mempunyai jaringan ke dalam Bareskrim suatu saat menanyakan kelanjutan penanganan kasus pajak itu. Anggota Bareskrim menjelaskan bahwa kasus yang kecil sudah dinyatakan P-21 (lengkap) oleh kejaksaan. Tapi kasus yang besar (pajak Rp.25 miliar) uangnya sudah dicairkan. "Saya tanya kenapa dicairin atau dibuka uang senilai Rp 25 milliar yang dibekukan itu? Katanya karena uang itu diakui sebagai milik Andi Kosasih," ungkap Susno.

Susno pun menelusuri siapa Andi Kosasih itu. Ternyata Andi Kosasih itu seorang pengusaha di Batam yang memiliki kedekatan hubungan dengan orang nomor dua di tubuh Polri. "Dia dibekingi orang kuat. Orang nomor dua (di Polri). Karena kalau bekingnya kompol atau kombes, dia enggak bakal berani main-main dengan direktur. Kalau bekingnya direktur, dia enggak bakal berani main-main sama Kabareskrim. Karena bekingnya orang nomor dua di Polri, makanya Kabareskrim juga enggak berani," ujar Susno kepada pers.

Rupanya, uang senilai Rp 25 milliar itu akhirnya dinyatakan sebagai milik Andi Kosasih yang dititipkan di rekening Gayus T Tambunan, pegawai pajak, untuk dana pembelian sebidang tanah. Sebagai mantan Kabareskrim, Susno merasa ada keganjikan. "Masa mau beli tanah pakai menitipkan uang segala ke rekening orang. Itupun menitipkannya sejak satu tahun yang lalu lagi. Logikanya, kalau mau beli tanah, ya titip saja dicarikan tanah. Kalau sudah dapat tanahnya baru dikasih uangnya atau dibayarkannya sendiri ke yang punya tanah," ujar Susno mengungkap keraguannya bahwa dana itu milik Andi Kosasih.

Susno menduga ada keterlibatan orang nomor dua di tubuh Polri kala itu, selain mengungkap keterlibatan nama beberapa mantan jajarannya di Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim yakni Kompol A, Kombes E, AKBP M, Brigjen EI, dan Brigjen RE. Susno menduga mereka turut menikmati uang senilai Rp 25 milliar yang diduga merupakan hasil kejahatan korupsi dana wajib pajak tersebut.

Menurut dugaan Susno, uang Rp 25 milliar itu dicincai, dibagi-bagi oleh mereka. Makanya uang itu dibuat sebagai milik Andi Kosasih. Namun Susno mengaku tak bisa bilang mereka masing-masing dapat berapa, dan siapa-siapa saja yang menerima. "Nanti saya dibilang nuduh lagi. Biarkan saja itu jadi tugas tim pemburu malaikat, eh mafia hukum. Percuma mereka (Satgas Pemberantas Mafiah Hukum) digaji untuk itu," kata Susno.

Menurut Susno Duadji, sebelum membuka kasus ini ke publik dan Satgas Pemberantas Mafia Hukum, dia telah terlebih dahulu melaporkannya kepada Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Namun, pimpinan Polri tidak merespon dan menindaklanjutinya. "Tidak ada respons. Sebaliknya, kasus itu seolah-olah tidak pernah terjadi dan saya yang ngarang. Sehingga saya buka ke publik, yang memiliki Polri," ungkap Susno dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (18/3/2010).

Susno menjelaskan, pembukaan kasus ini ke publik untuk membantu Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mereformasi Polri sekaligus untuk menghilangkan pengkhianat di tubuh Polri. "Pengkhianat yang merusak citra Polri sesuai dengan amanat Kapolri saat serah terima jabatan para Kapolda yang intinya ada pengkhianat di tubuh Polri," Susno mengutip Kapolri. ■ **BI/CRS**

SIAP MUNDUR: *Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan siap mundur dan mendukung upaya membersihkan Ditjen Pajak dari para makelar kasus.*

foto-foto: kompas.com, matanews.com

Whistleblower Malah

Susno Duadji boleh mungkin sedang terluka karena merasa dikorbankan (dipecat walau bukan dia yang salah) dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK dan kasus Bank Century. Namun, keberaniannya sebagai *whistleblower* membuka makelar kasus pajak di tubuh Polri dan Direktorat Jenderal Pajak malah menjadikannya sebagai terperiksa atau tersangka, walaupun kemudian buru-buru diralat.

Komjen Susno Duadji: *Sang Whistleblower Kepolisian RI*

Kejadian yang menimpa mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, yang 'dikorbankan' dan kemudian malah lebih dulu dijadikan tersangka pencemaran nama baik dan terperiksa pelanggaran disiplin karena mengungkap dan melaporkan adanya makelar kasus di Mabes Polri, berantai ke Kejaksaan dan Pengadilan (hakim) serta Ditjen Pajak dan Pengadilan Pajak, boleh mungkin sebagai sebuah cermin betapa mengguritanya jaringan koruptor dan mafia hukum (makelar kasus) di negeri ini. Sehingga Indonesia masih menjadi 'juara' terkorup di Asia-Pasifik.

Hasil survei terbaru (2010) yang diadakan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), membuktikan Indonesia menempati urutan teratas dalam daftar negara terkorup di antara 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Dalam survei itu, Indonesia mendapat skor 9,27 dari total skor 10. Semakin terkorup dibanding tahun 2009, walau Indonesia kala itu juga menempati urutan teratas, tapi skornya masih lebih baik yakni 8,32.

Survei PERC yang berbasis di Hong Kong ini menunjukkan korupsi di Indonesia semakin hebat dan merajalela, nyaris 'paripurna' atau skor 10. Bukan turun, malah semakin meningkat. Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai pidato dan kampanyenya selalu mengatur penampilan dan berapi-api menyatakan akan menumpas korupsi. Eh, malah skornya makin naik sebagai negara terkorup di Asia Pasifik.

Boleh mungkin kecanggihan korupsi dalam skandal Bank Century yang diduga melibatkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani juga memengaruhi hasil survei ini. Termasuk kasus dugaan pelemahan KPK dan kriminalisasi pimpinan KPK tahun lalu. Apalagi bila ditambah lagi dengan terkuaknya dugaan makelar kasus di Mabes Polri dan Pengadilan Pajak yang justru buru-buru disikapi dengan menetapkan pelapornya (Susno Duadji) sebagai tersangka pencemaran nama baik. Bukan mendahulukan pengungkapan makelar kasus dan aliran dananya.

Reaksi awal (19/3/2010) dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jendral Edward Aritonang justru membantah adanya makelar kasus seperti diungkap Susno. Juga, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, menyikapi tudingan Susno tentang adanya makelar kasus yang melibatkan petinggi Polri, justru segera memberi perintah agar memanggil dan

foto-foto: repro

Jadi Tersangka

memeriksa Susno. Kapolri pada Rabu (17/3/2010) pagi memerintahkan Kadit Propam, Kadit Binkum, dan Kabareskrim untuk mengundang Susno. "Apa fakta yang dimilikinya?" kata Kapolri menjawab pertanyaan pers seusai menghadiri pembukaan seminar tentang pertahanan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/3/2010). Tidak terkesan bahwa sebelumnya Kapolri sudah dilapori oleh Susno tentang kasus ini sebelum diungkap ke publik. Padahal Susno mengaku sudah lebih dulu melaporkannya kepada Kapolri, tapi tidak mendapat respon.

Mabes Polri pun segera membentuk tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang dipimpin oleh Wakil Kepala Polri Komjen Jusuf Manggabarani. Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi di Mabes Polri, Rabu (17/3/2010), yang dikejar pers menanggapi pernyataan Susno itu mengatakan, jika hasil penyelidikan terbukti adanya oknum-oknum pejabat Polri yang terlibat markus, pihaknya akan mengambil tindakan hukum.

Namun, kemudian Ito Sumardi buru-buru menegaskan setelah mengecek ke penyidik, tidak ada stafnya menjadi makelar kasus. "Jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan," tegasnya. Ito juga menyatakan bahwa dia tak tahu-menahu perihal pencairan dana sebesar Rp 25 miliar di rekening milik Gayus Tambunan, staf Ditjen Pajak. Saat pembukaan blokir dana itu, Ito Sumardi baru dua hari menjabat Kabareskrim menggantikan Komjen Susno Duadji.

Sementara itu, Direktur Direktorat II Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Radja Erizman membantah keterangan Susno terkait dugaan makelar kasus di Mabes Polri. Malah Erizman menyebut itu namanya maling teriak maling. Menurut Radja, markus ada saat Susno menjadi Kabareskrim. "Markus itu sarangnya di tempat Susno. Itu namanya maling teriak maling," tuding Radja di Mabes Polri, Kamis (18/3/2010.

Maka, Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal (Pol) Edmon Ilyas dan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Raja Erizman, Jumat (19/3/2010) membuat pengaduan pencemaran nama baik oleh Susno, mantan atasannya di Bareskrim, ke Bareskrim. Radja juga mengaku memiliki data aliran dana yang menunjukkan bahwa Susno terlibat dalam kasus korupsi. "Nanti saya akan tunjukkan aliran dananya," katanya. Namun, sejauh ini pernyataan ini hanya isapan jempol.

Susno pun dipanggil. Setelah, Selasa (18/3/2010) Susno tidak memenuhi panggilan pertama Propam Polri, karena memprioritaskan panggilan Satgas Pemberantasan mafia hukum, maka pada Senin (22/3/2010) Komisaris Jenderal Susno Duadji memenuhi panggilan kedua. Susno diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada pagi hingga siang, lalu disambung pada malam hari. Setelah itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jendral Edward Aritonang, Selasa (23/3/2010) malam memberi konfirmasi bahwa Susno Duadji sudah berstatus tersangka dalam dua kasus.

Pertama, dari sisi internal karena pelanggaran disiplin sebagai anggota Polri. Pelanggaran etika dan disilpin karena yang bersangkutan selama 78 hari tak masuk kantor tanpa penjelasan. Kedua, sebagai pelaku pencemaran nama baik sesuai pengaduan Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal (Pol) Edmon Ilyas dan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Raja Erizman, Jumat (19/3/2010). Susno dinilai tidak bisa menunjukkan bukti ucapan tentang makelar kasus di Mabes Polri.

DICOPOT: *Brigjen Edmon Ilyas yang sempat melaporkan Susno, akhirnya dicopot dari jabatan Kapolda Lampung*

Mengejutkan Publik

Penetapan Susno Duadji sebagai tersangka, ternyata mendapat reaksi yang mengejutkan dari berbagai pihak. Aktivis Petisi 28, Haris Rusli menyatakan hal ini sebagai langkah mundur. Menurut Haris, Polri telah melakukan contoh tidak baik dengan menetapkan Susno menjadi tersangka, apalagi di tengah maraknya visi dan misi reformasi birokrasi di tubuh Polri. Hal demikian, menurut Haris Rusli kepada wartawan di Dokoen Coffee, Rabu (24/3/2010), justru semakin menegaskan keberadaan markus di tubuh Polri.

Menurut aktivis Petisi 28 itu, sosok Susno penting dalam beberapa kasus yang banyak menyita perhatian publik belakangan ini, seperti skandal Bank Century dan kasus Rp 24,6 miliar. Mengingat Susno pernah menduduki posisi Wakil Kepala PPATK sebelum menjadi Kabareskrim, dia yakin, Susno tahu persis skandal uang rakyat mengalir ke kantong siapa saja. "Ini yang mejadi landasan kami mendorong Pak Susno untuk maju," ujarnya.

Setelah penetapan Susno sebagai tersangka oleh Mabes Polri, tim kuasa hukumnya lantas mempertimbangkan untuk meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Apalagi saat ini Susno dalam kondisi waspada satu," Efran Helmi Juni, anggota Tim Kuasa Hukum Susno di Jakarta, Rabu (24/3/2010)

Menurut Efran, seharusnya Susno mendapat perlindungan dari Propam Mabes Polri, karena telah mengungkap dugaan praktik makelar kasus di tubuh Polri. Tetapi Susno malah dijadikan tersangka kasus pencemaran nama baik. "Seharusnya Polri mengusut dugaan praktik makelar kasus yang sudah lebih dulu terungkap. Bukan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan kemudian," ujar Efran.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim bahkan mengimbau LPSK bekerja lebih aktif dalam kasus Susno Duadji. Menurutnya, LPSK harus menawarkan perlindungan kepada Susno.

Melihat gelagat perlakuan buruk yang ditimpakan kepada Susno, sebanyak 96 pengacara menyatakan siap membela mantan Kabareskrim itu. Hal ini diungkapkan pengacara Susno, Husni Maderi, di DPD RI, Jakarta, Rabu 24 Maret 2010.

Selain itu, Husni juga mengungkapkan bahwa dukungan juga datang dari pihak lain yang bersimpati atas keberanian Susno mengungkap secara terbuka fenomena markus di kepolisian. Dalam hal ini, menurut Husni, Susno bukan sekadar ingin mencari sensasi, apalagi atas dasar sakit hati. Dia juga menegaskan bahwa Susno tidak bermaksud menghina kepolisian, tetapi justru ingin memperbaiki institusi kepolisian. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri sebelumnya yang mengingatkan anak buahnya agar menjaga kehormatan institusi.

Pandangan senada dikemukakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim. Menurut Ifdhal, Susno Duadji seharusnya tidak bisa dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Dia melihat Susno Duadji sebagai *whistle blower* (orang dalam yang memberikan informasi mengenai dugaan penyimpangan hukum di dalam institusinya) sehingga yang bersangkutan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan dan kesaksiannya.

Menurut Ifdhal, hal itu semacam kompensasi dari informasi yang dia berikan. Ketentuan tersebut, jelas Ifdhal, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama Pasal 10, yang berlaku untuk Susno. Disebutkan, saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan dan kesaksian yang diberikan. Ketentuan Pasal 10 menafikan ketentuan tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHP.

Pernyataan lebih mendasar dikemukakan ahli hukum tata negara, Irmanputra Sidin, kepada pers di Jakarta, Rabu (24/3/2010). Irmanputra Sidin mengusulkan sudah saatnya pasal pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dicabut.

Sidin berpendapat, Pasal 310 dan 311 KUHP sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam sistem kenegaraan Indonesia. Karena pasal ini justru menghambat demokrasi dan sering digunakan untuk melindungi kekuasaan. Dalam pengamatannya, tidak sedikit pihak yang dirugikan atas penerapan pasal pencemaran nama baik, seperti aktivis pergerakan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan pers.

Sidin memandang penetapan Susno Duadji sebagai tersangka pencemaran nama baik bisa dijadikan momentum untuk mencabut Pasal 310 dan 311 KUHP. Pencabutan pasal itu, menurutnya, bisa sebagai salah satu solusi untuk membebaskan Susno dari sangkaan. Sejalan dengan pandangan Irmanputra Sidin itu, anggota tim kuasa hukum Susno, Efran Helmi Juni, menyatakan akan mempertimbangkan usulan uji materi atas pasal pencemaran nama baik tersebut.

POPULARITAS: *Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menangguk popularitas dari whistleblower Susno Duadji, namun tak memberi perlindungan kepada Susno.*

Satgas dan Jaksa Agung

Sementara itu, sikap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, sempat juga masih berbeda dengan sikap Mabes Polri atas laporan dan pengungkapan Susno tentang dugaan makelar kasus pajak Rp.25 milar tersebut. Untuk menyikapi laporan Susno tersebut digelar Rapat pleno Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dipimpin Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto di Jakarta, Selasa (23/3/2010). Rapat Satgas itu memutuskan menindaklanjuti dan mendalami kasus itu hingga tuntas dan seterang-terangnya.

Sekretaris Satgas Denny Indrayana menjelaskan bahwa Satgas menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus yang diungkapkan mantan Susno Duadji tentang dugaan makelar kasus terkait dana Rp 25 miliar di Markas Besar Polri. Kejanggalan itu mengindikasikan adanya penyimpangan dalam penyidikan kasus pajak yang diproses Polri.

Kejanggalan pertama adalah soal dana Rp 25 miliar yang pada berita acara pemeriksaan Polri seolah-olah milik AK (Andi Kosasih) yang dititipkan ke GT selama setahun. Kejanggalan lain, GT (Gayus Tambunan) sebagai tersangka tak ditahan, padahal terkait dana senilai Rp 25 miliar. Kejanggalan lain adalah pengangkatan pemblokiran dana atas nama GT itu. Kedua, Satgas juga menemukan kejanggalan dalam materi tuntutan jaksa yang mendakwa GT hanya dengan kasus penggelapan.

Kemudian, Selasa (23/3/2010) sore, Satgas menemui Jaksa Agung Hendarman Supandji. Seusai pertemuan, Jaksa Agung Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan melihat sesuatu yang tidak pas dalam penanganan perkara, terutama dalam penuntutan yang dilakukan jaksa. Ia meminta berkas perkara dan prosesnya dieksaminasi.

Jaksa Agung Hendarman Supandji juga mengemukakan tidak akan memberikan izin kepada empat jaksanya untuk melaporkan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.

Sebelumnya, empat jaksa (Cirus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia, dan Ika Safitri) yang meneliti berkas perkara milik Gayus dari kepolisian membantah tuduhan Susno bahwa mereka diduga menerima sebagian uang dari Rp 24,6 miliar di rekening Gayus. Atas dugaan Susno itu, keempat jaksa itu menyatakan akan melaporkan Susno ke polisi setelah mendapatkan izin dari Jaksa Agung.

Hendarman memberi pertimbangan tidak memberi izin kepada empat jaksanya, karena akan diadakan eksaminasi terlebih dulu terhadap berkas perkara Gayus Tambunan yang ditangani oleh anak buahnya itu.

Setelah menemui Jaksa Agung, Satgas juga menemui Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Rabu (24/3/2010). Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, kasus ini akan diteliti lebih lanjut oleh tim independen.

Akhirnya Kapolri Akui

Setelah ditemui Satgas Pemberantas Mafia Hukum, akhirnya Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengemukakan hasil temuan Tim Independen Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang adanya kejanggalan dalam penyidikan atas kasus dugaan korupsi, pencucian uang, dan penyuapan dengan tersangka pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan yang di dalam rekeningnya sempat ada dana sebesar Rp 25 miliar.

Menurut Bambang Hendarso Danuri

foto: matanews.com

kejanggalan tampak dari tidak ditahannya tersangka. Padahal perintah Kepala Polri tentang penanganan tindak pidana korupsi, narkotika dan terorisme, sangat jelas bahwa tersangka harus ditahan. "Pada kasus korupsi mutlak ditahan, tetapi tersangka tidak ditahan. Siapa yang menangani kasus itu akan diperiksa," tegas Kapolri di Jakarta, Rabu (24/3/2010).

Kapolri menyebut indikasi pelanggaran sangat terang-benderang, yaitu tidak ditahannya Gayus setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, pencucian uang, dan penggelapan hingga proses penyidikan selesai. Indikasi lain, adalah tidak dilanjutkannya perkara tersangka Roberto Santonius. Saat itu, perkara Gayus dan Roberto ditangani bersamaan oleh penyidik Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri. Roberto tidak ditahan tidak juga diperiksa.

Roberto adalah seorang konsultan pajak. Menurut penyidik, dia mengirimkan uang Rp25 juta ke rekening milik Gayus. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai ada unsur pidana dalam pengiriman uang dari Roberto kepada Gayus. Akan tetapi, kasus Roberto hilang bak ditelan bumi.

Untuk mengusut tuntas pelanggaran itu, Kapolri telah mempercayakannya kepada Tim Independen yang tak melibatkan anggota Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan akan bekerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.

Kapolri juga mengemukakan telah meminta kepada Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto agar mempercepat pemeriksaan. "Bahkan, saya juga menyurati Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar disertakan untuk menyaksikan secara langsung jalannya pemeriksaan," ungkap Bambang. Menurut Kapolri, hal yang akan diselidiki tim termasuk sisa dana di rekening Gayus sebesar Rp 24,6 miliar, yang dikabarkan uangnya dibagi-bagi setelah blokir dibuka.

Perihal pemeriksaan terhadap Komisaris Jenderal Susno Duadji, yang mengungkap dugaan makelar kasus itu, Kapolri meminta perhatian semua pihak agar bisa membedakan oknum dengan institusi. Menurut Bambang, Susno melanggar kode etik dan disiplin anggota polisi. "Hak prerogatif institusi tak bisa dicampuri pihak lain. Polri memiliki sekitar 400.000 anggota yang harus mematuhi rambu-rambu sebagai polisi. Jika etika profesi tak dipatuhi, mereka bisa bertindak sendiri-sendiri, apa jadinya. Apalagi polisi bersenjata," jelas Kapolri.

Sementara, perihal penetapan Susno sebagai tersangka, Sekretaris Satgas Denny Indrayana seusai menemui Kepala Polri untuk mengoordinasikan beberapa pengaduan terkait dugaan mafia hukum di kepolisian mengatakan sesuai surat edaran Kepala Polri tahun 2005, seharusnya laporan kasus korupsi yang dimunculkan Susno didahulukan daripada laporan pencemaran nama baik oleh Brigadir Jenderal (Pol) Edmon Ilyas dan Brigadir Jenderal (Pol) Raja Erizman.

Setelah Kapolri mengakui adanya kejanggalan dalam penyidikan atas kasus dugaan korupsi pajak dan pencucian uang yang telah diungkap oleh Susno, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang yang sebelumnya telah mengumumkan status Susno Duadji sebagai tersangka dalam dua kasus (pencemaran nama baik dan pelanggaran disiplin), kemudian 'meralat' bahwa Susno Duadji belum ditatapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik.

Penegasan 'ralat' bahwa belum ada penetapan Susno sebagai tersangka lebih dulu dikemukakan Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Sulistyo Ishak, Kamis (25/3/2010). "Belum ada status tersangka. Terlapor juga belum diperiksa," kata Sulistyo. Ditegaskan, Polri juga akan memprioritaskan penanganan dugaan praktik mafia hukum dalam perkara pajak yang melibatkan GT, pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Kemudian, Irjen Edward Aritonang mengemukakan fakta baru bahwa Andi Kosasih, pengusaha asal Batam, sudah ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan keterangan palsu. Keterangan palsu Andi Kosasih ialah pengakuan bahwa dialah pemilik uang Rp24,6 miliar di rekening Gayus. Sebelumnya, Polri menyebut (meyakini) uang tersebut milik Andi Kosasih, sehingga pemblokirannya dibuka dua hari setelah Komjen Susno Duadji diberhentikan dari jabatan Kabareskrim. Pembukaan blokir inilah yang membuat Susno Duadji melaporkan adanya makelar kasus pencucian uang dan penggelapan pajak di Mabes Polri, tetapi Kadiv Humas Polri sempat membantahnya.

Belakangan, menurut Irjen Edward Aritonang, dari hasil penelusuran PPATK, uang Rp24,6 miliar tidak pernah masuk ke rekening Andi Kosasih setelah uang itu dicairkan dari rekening Gayus. Yang masuk ke rekening Andi Kosasi hanya Rp.1 miliar lebih. Diduga uang Rp.1 milar itu sebagai imbalan pengakuan palsu tentang kepemilikan uang itu. Menurut Edward, polisi sudah memburu Andi ke rumahnya di Jakarta Utara dan Batam. Namun, rumah itu sudah kosong. Untunglah, kemudian Andi Kosasih dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Mabes Polri dan dia langsung ditetapkan jadi tersangka.

Sebelumnya, Susno Duadji mengungkapkan dugaan telah ada rekayasa dengan memunculkan nama Andi Kosasih sebagai pemilik uang senilai Rp 24,6 miliar di rekening oknum pegawai pajak Gayus Tambunan. "Jadi, itu direkayasa seolah-olah pemiliknya ada, seolah-olah masuk akal, itulah rekayasa," kata Susno, Selasa (23/3/2010). Andi Kosasih pun mengakuinya.

Selain itu, belakangan pula, pejabat di Mabes Polri. Raja Erizman juga mengungkapkan temuan polisi bahwa ada 19 transaksi yang dicurigai dalam rekening Gayus. Padahal lima hari sebelumnya (19/3/2010) dinyatakan bahwa polisi hanya menemukan tiga transaksi.

Akhirnya, Kapolri juga mencopot Brigjen Pol Edmon Ilyas dari jabatannya sebagai Kapolda Lampung. Selain itu dua penyidik Polri juga dinonaktifkan.

Setelah itu, Kejaksaan Agung juga mencopot dua jaksa yang terlibat dalam kasus ini, yakni Cyrus Sinaga dicopot dari jabatan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Semarang (sebelumnya jaksa peneliti) dan Poltak Manullang dicopot dari Kajati Maluku (sebelumnya Direktur Prapenuntutan), serta telah memeriksa belasan jaksa. Menurut Jaksa Agung, ada 15 jaksa yang menjadi tersangka dalam kasus makelar pajak Gayus ini.

Gayus, 30, adalah pegawai negeri golongan IIIA, yang memiliki rumah mewah di kawasan Jakarta Utara, dalam proses di kepolisian, penyidik menyatakan hanya menemukan bukti pidana pada transaksi senilai Rp395 juta. Sedangkan uang sisanya Rp.24,6 miliar adalah milik Andi Kosasih yang dititipkan kepada Gayus untuk membeli tanah. Sehingga pemblokiran atas sisa uang di rekening Gayus itu (Rp24,6 miliar) kemudian dibuka pada 26 November 2009, hanya dua hari setelah Susno dicopot sebagai Kabareskrim. Kasus penggelapan uang Rp395 juta itu sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang dan Gayus telah divonis bebas dengan masa percobaan satu tahun.

Akan Lapor ke KPK

Sementara itu, mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji dalam menyikapi posisinya yang sudah tersudutkan dengan telah sempat dijadikan tersangka pencemaran nama baik selain tersangka (terperiksa) dalam pelanggaran disiplin, mengatakan akan melaporkan kasus dugaan praktik mafia hukum di tubuh Polri dalam penanganan kasus *money laundering* oknum pegawai pajak, Gayus T Tambunan, itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya berbicara kepada Satgas saja, saya sudah jadi terperiksa," ujarnya.

"Lapor Satgas saja, saya sudah disalahkan. Kalau begitu kan percuma Satgas

SUSNO DI BELAKANG: *Kapolri Bambang DH akhirnya mengakui makelar kasus di Mabes Polri, Susno Duadji nyatakan siap mendukung Kapolri*

dibentuk Presiden," ujar Susno. "Itu kelihatan sekali arogansinya. Jadi di era sekarang, saya tidak boleh bebas bicara dengan wartawan," ujar Susno kesal.

Sehingga Susno pun mengaku sedang mempertimbangkan untuk melaporkan adanya praktik mafia hukum di Polri itu kepada KPK karena dinilainya lebih mempunyai kekuatan. Walaupun, ia mengaku khawatir akan menerima perlakuan yang jauh lebih tak terbayangkan jika melaporkan hal itu kepada KPK.

Kemudian, setelah merasa diperlakukan sewenang-wenang kepolisian akibat menyampaikan dugaan adanya makelar kasus di lembaga itu, Susno Duadji, Selasa, (30/3/2010) datang ke Komisi III DPR untuk minta perlindungan hukum.

Sebelumnya, Susno mengaku merasakan adanya pihak-pihak yang sangat ketakutan dengan apa yang dilakukannya akhir-akhir ini dalam mengungkap praktik mafia hukum di Polri. "Karena takut, makanya saya diserang dan dibusukkan," ujarnya.

Susno mengungkapkan adanya upaya Polri mencari-cari kesalahannya. Salah satu kenyataan tentang hal ini terungkap dari pernyataan Penasihat/Staf ahli Kapolri, Prof Kastorius Sinaga, untuk membongkar borok yang dilakukan Susno dan mengangap Susno sebagai lawan yang harus dihadapi.

Kastorius di Jakarta, Senin (22/3/2010) mengungkapkan, Susno terlibat dalam upaya rekayasa adanya ancaman pembunuhan lewat SMS gelap terhadap dirinya seusai memberikan kesaksian yang meringankan Antasari Azhar beberapa waktu lalu, untuk mendapat dukungan publik.

Menurut Kastorius bahwa alat yang digunakan personel Bareskrim untuk melacak sumber SMS itu adalah sama dengan alat yang digunakan untuk melacak jaringan teroris. Hasil pelacakan, diketahui si pengirim adalah keluarga dekat Susno, yakni Rahmat Rohadi. Hasil pelacakan SMS pihak Bareskrim itu disertai bagan tentang asal muasal SMS tersebut. Menurut Kastorius, upaya seperti ini adalah upaya yang picik. "Ini kotor, ini sangat licik, dan picik sekali, Ini tidak jujur," tegasnya. Kastorius pun bertanya, bagaimana kami bisa mengharapkan kalau dia berniat memperbaiki institusi Polri?

Kastorius sendiri membantah bahwa langkah membongkar borok Susno ini dianggap sebagai upaya untuk mengcounter berbagai pengungkapan Susno tentang berbagai kasus di tubuh Polri. "Itu tidak benar," katanya.

Menurut Kastorius, pengungkapan kebobrokan Susno itu tak lebih sebagai proses pembelajaran bagi publik, khususnya bagi Susno sendiri. Kastorius mengatakan segala dugaan seharusnya diklarifikasi yang benar terlebih dahulu. "Sekarang kami persilakan publik menilai, bagaimana pribadi Susno yang sebenarnya," kata Kastorius.

Menurut Kastorius, institusi Polri sudah lama membiarkan beberapa ulah kontroversial yang dilakukan mantan Kabareskrim itu. Namun, katanya, karena Susno sudah menuding dua jenderal Polri terlibat praktik makelar kasus pajak, kesabaran itu kini habis.

Ketua BP Setara Institute Hendardi hari Rabu (24/3/10) menanggapi pernyataan Penasihat/Staf ahli Kapolri Prof. Kastorius Sinaga yang menyatakan apa yang dilakukan Susno Duadji sebagai praktik licik, kotor dan tidak jujur, itu merupakan

foto: repro

pernyataan sembrono dan justru merugikan institusi Polri.

Menurut Hendardi, dengan predikat sebagai Staf Ahli, seharusnya Kastorius memberi pernyataan yang proporsional, profesional dan menunjukkan kapasitasnya, bukan dengan memberikan pernyataan yang terkesan hanya untuk mencari muka.

Susno Duadji sendiri, membantah tudingan Kastorius Sinaga bahwa penyebar ancaman SMS yang berisi Susno akan dibunuh adalah keluarganya sendiri yaitu Rahmat Rohadi. Dia membantah Rahmat Rohadi adalah keluarganya. Susno menyebut tudingan Kastorius itu fitnah.

Susno pun balik mempertanyakan kapasitas Kastorius melontarkan tudingan itu kepadanya. "Kenapa yang mengumumkan si Kastorius itu?" tanyanya heran. Susno melihat, pernyataan Kastorius itu merupakan upaya lain pihak-pihak tertentu yang ingin memecah konsentrasinya dan pengalihan isu dalam menghadapi proses hukum terkait tudingan mengenai keberadaan praktik mafia hukum di tubuh Polri.

Ditjen Pajak Sikapi Serius

Berbeda dengan pihak kepolisian yang justru cenderung mempersalahkan dan menekan Susno Duadji, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, justru menyikapinya dengan serius. Pemecatan Gayus segera diproses. Bukan itu saja, seluruh pegawai teman kerja Gayus di bagian keberatan pajak diberhentikan sementara. Kemudian, penyelidikan diarahkan ke tingkat atasan Gayus. Seluruh rekening yang mengirim dan menerima uang ke dan dari rekening Gayus diblokir.

Sejak awal terungkapnya kasus ini, Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo sudah menegaskan, jika memang ada bukti praktik makelar kasus ataupun mafia pajak, pihaknya akan mendukung setiap upaya pengusutan demi membersihkan institusi Ditjen Pajak. Tjiptardjo menegaskan, pihaknya tidak akan menutup-nutupi ataupun melindungi pegawai pajak yang memang terbukti bersalah. "Kalau ada pegawai atau pejabat yang bersalah, harus dihukum. Jika kesalahannya administratif, sanksinya administratif. Tapi kalau kesalahannya pidana, harus dihukum sesuai UU pidana," tegasnya.

Tjiptardjo malah berharap agar pihaknya diajak berkordinasi oleh kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas jaringan makelar kasus atau mafia di tubuh Ditjen Pajak.

Bagaimana Penyelesaiannya?

Banyak pihak berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil tindakan untuk mempercepat penyelesaian masalah dugaan makelar kasus di tubuh Polri dan Pajak yang diadukan Susno ini. Namun, Presiden SBY justru memandang hal ini hanya masalah internal Polri.

Hal ini terungkap dari penuturan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha bahwa Presiden melihat kasus ini sebagai permasalahan internal di tubuh Polri. "Jadi, masih belum bisa disimpulkan apakah ini masalah antarpribadi di Polri atau memang terkait sesuatu yang sifatnya institusi Polri," katanya.

Namun menurut Julian, Presiden meminta agar penyelesaian kasus ini dibawa sepenuhnya pada proses dan mekanisme hukum. Julian menegaskan, dalam kasus itu Presiden sama sekali tidak melakukan intervensi. Presiden juga mendapatkan laporan awal terkait perkembangan dugaan makelar kasus di Mabes Polri.

Sementara itu, Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Djoko Suyanto, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/3/2010) menyatakan ada tiga rekomendasi Kompolnas yang disampaikan kepada Presiden dan Kapolri sehubungan dengan kasus ini. Pertama, makelar kasus harus diberantas sesuai dengan komitmen pemerintah. Kedua, kasus Susno adalah terkait disiplin dan kehormatan Polri. Ketiga, pembentukan tim evaluasi yang komprehensif untuk mengkaji dinamika di lingkungan Polri.

Untuk rekomendasi pertama dan kedua, Kompolnas merekomendasi agar Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri memperlakukan berimbang antara (1) pengungkapan dugaan makelar kasus terkait kasus pajak di Mabes Polri dan tindakan Polri dalam (2) menegakkan kode etik, kehormatan, dan pendisiplinan terhadap mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Menurut Menkopolkam selaku Ketua Kompolnas, silakan Kapolri mengkaji apakah tindakan Susno terdapat indikasi pelanggaran disiplin, kode etik, atau kehormatan. Djoko, mengatakan, dua rekomendasi Kompolnas itu harus mendapat perlakuan yang sama oleh Polri. "Pengungkapan kasus dan penyelidikan tindakan indisipliner dan pelanggaran kedisiplinannya harus mendapatkan porsi yang sama," katanya. Sebab, menurut Djoko, pertengkaran antar-anggota Polri yang masih aktif tidak bagus jika dilihat oleh lulusan baru Akademi Kepolisian dan masyarakat.

Sedangkan perihal rekomendasi ketiga tentang pembentukan tim evaluasi yang komprehensif untuk mengkaji dinamika di lingkungan Polri, Djoko menjelaskan ada apa sebenarnya di Polri itu sejak Cicak dan Buaya (kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah), kesaksian Pak Susno di sidang Antasari Azhar, sampai makelar kasus.

Sementara itu, Adnan Buyung Nasution, mantan Ketua Tim Delapan dan Dewan Pertimbangan Presiden, dalam dialog di studio sebuah televisi swasta justru mengusulkan agar dibentuk tim independen untuk menyelidiki masalah makelar kasus di tubuh Polri ini, supaya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Tim independen itu terdiri dari orang-orang yang kredibel dan independen. Hal itu dikemukakan, karena dia menganggap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang terdiri dari para pejabat, termasuk pejabat kepolisian, tidak bisa disebut sebagai lembaga yang independen, sehingga kurang dipercaya masyarakat.

Sehari sebelumnya, Rabu (24/3/10), Ketua BP Setara Institute Hendardi, berpendapat perlunya pembentukan tim investigasi gabungan antara kepolisian, kejaksaan dan KPK. Tim ini, menurutnya, akan bekerja transparan lebih kredibel untuk menyelesaikan tudingan makelar kasus dan sangat bermanfaat untuk memupuk kepercayaan publik terhadap institusi Polri ketimbang ikut-ikutan dalam kekonyolan adu tuding yang tidak menyelesaikan masalah.

Menurut Hendardi, setara Institute juga berpendapat untuk menyelesaikan makelar kasus dalam Polri agar menggunakan mekanisme hukum yang ada dan tidak perlu ada campur tangan lembaga yang tidak jelas dan tidak dikenal dalam mekanisme hukum kita seperti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Hendardi menegaskan yang perlu didorong adalah penguatan institusi dan mekanisme hukum yang ada. "Bukan dipolitisir untuk kepentingan memoles citra semata seolah-olah berlangsung penegakan hukum," kata Hendardi.

Hal senada dikemukakan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Harry Ponto. Dia mempertanyakan tim independen yang dibentuk Kepala Polri, yang dipimpin anggota Polri. "Padahal, kasus yang diperiksa terkait institusi Polri. "Independensinya, kan, bisa dipersoalkan," kata Harry Ponto.

Mantan Ketua Komisi III (Bidang Hukum) DPR Trimedya Panjaitan juga berpandangan agar Kapolri bersikap fair dan imbang dalam kasus Susno. Menurut Panjaitan, Kapolri seharusnya menonaktifkan perwira tinggi Polri yang diduga terlibat makelar kasus, seperti dibeberkan Susno, sehingga mereka bisa leluasa diperiksa. Dengan demikian, kata Panjaitan, akan terlihat itikad baik Kapolri untuk menyelesaikan dugaan makelar kasus seimbang dengan penegakan disiplin anggota Polri. ■ **BI/TSL**

Emas dan Berkah Terselubung

Polemik seputar pengungkapan makelar kasus di tubuh Polri, Kejaksaan, pengadilan dan Ditjen Pajak oleh Komjen Susno Duadji telah menjadi berkah terselubung dalam upaya mengungkap kebenaran dan penegakan hukum. Hal ini merupakan kesempatan emas untuk menciptakan Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Ditjen Pajak yang profesional.

Hiruk-pikuk polemik seputar kenekatan membuka aib dalam tubuh institusi sendiri (*whistleblower)* oleh seorang jenderal bintang tiga polisi aktif, Komjen Susno Duadji, dalam beberapa bulan terakhir ini telah membuka tabir aib Polri dan berangkai ke lembaga peradilan lainnya serta Direktorat Jenderal Pajak, menjadi terbuka di mata publik, yang sebelumnya, sesungguhnya, telah menjadi rahasia umum.

Sekurang-kurang ada tiga kasus besar yang telah diungkap Susno Duadji kepada publik dalam beberapa bulan terakhir ini. **Pertama**, saat Susno tampil menjadi saksi di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2010) dengan membeberkan kesaksian yang meringankan Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, yang dilengserkan setelah didakwa sebagai otak pembunuhan berencana Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Kesaksian ini mengejutkan, karena semakin menguatkan kesan yang telah menjadi isu di publik tentang dugaan adanya skenario yang menjadikan Antasari sebagai target. Pihak Polri tentu sangat merasa tersudutkan dan menganggap Susno Duadji melanggar disiplin dan etika profesi. Apalagi, karena dia memberi kesaksian tanpa seizin Kapolri.

Kedua, saat Susno Duadji tampil di depan Pansus Angket DPR Kasus Bank Century, Rabu (20/1/2010). Dia antara lain memberikan dokumen yang lalu disebut 'testimoni' dan selanjutnya dikembangkan dan diterbitkan menjadi buku berjudul: Bukan Testimoni Susno Duadji. Testimoni itu antara lain menyangkut kesengajaan (tidak memprioritaskan) melanjutkan penyidikan kasus bail out Bank Century karena ada yang diduga terlibat sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden dan kemudian menang.

Dokumen yang diserahkan Susno Duadji kepada Pansus Angket Bank Century itu bertajuk: Laporan Penanganan Kasus Tindak Pidana Bank Century dan Upaya Penelusuran Aset. Pada bagian akhir dokumen tertanggal 27 November 2009 tersebut tertulis:

Sebagai catatan, Bareskrim memang tidak memprioritaskan penyidikan kasus penyertaan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rp 6,7 triliun karena alasan sebagai berikut:

"Ada di antara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden, kemudian menang, sehingga menunggu persiapan pelantikan yang tentunya kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan, walaupun sebenarnya untuk membuktikan adanya korupsi dalam kasus penyertaan modal dari LPS senilai Rp 6,7 triliun ke Bank Century tidak terlalu sulit."

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD: *Berkah terselubung*

Ketiga, saat Susno Duadji mengungkap aib makelar kasus pencucian uang dan pajak di Mabes Polri, dalam diskusi bukunya, Bukan Testimoni Susno, Rabu (10/3/2010) di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dan kemudian melaporkannya kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada Kamis (18/3/2010).

Ketiga tindakan berani *whistleblower* Komjen Susno Duadji itu membuat pihak Polri merasa dipermalukan. Susno pun bolak-balik dipanggil Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk mempertanggungjawabkannya. Terakhir, Susno dijadikan tersangka (terperiksa) pelanggaran disiplin dan etika profesi. Bahkan sempat dijadikan tersangka pencemaran nama baik atas pengaduan Brigjen (Pol) Edmon Ilyas dan Brigjen (Pol) Raja Erizman. Susno dinilai tidak bisa menunjukkan bukti ucapan tentang makelar kasus di Mabes Polri.

Sebut Susno Sebagai Lawan

Menurut Penasihat Kapolri Kastorius Sinaga, sudah lama institusi Polri membiarkan beberapa ulah kontroversial yang dilakukan mantan Kabareskrim, Komjen (Pol) Susno Duadji. Namun, karena Susno sudah menuding dua jenderal Polri terlibat praktik makelar kasus pajak, kesabaran itu kini habis.

Polemik pun terjadi atas keberanian Susno mengungkap beberapa kasus tersebut. Sudah tentu, pihak kepolisian, petinggi kepolisian, dan staf ahli kepolisian bahkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sangat tidak menyetujui ulah *whistleblower* Komjen Susno Duadji itu. Mereka menuding Susno telah berkhianat terhadap institusi Polri. Maka Susno telah ditetapkan sebagai tersangka (terperiksa) pelanggaran disiplin dan etika profesi.

Bahkan Penasihat Kapolri Kastorius Sinaga telah menyebut Susno sebagai lawan, dalam sebuah acara dialog di layar televisi (25/3/2010). Sebelumnya, memang Kastorius telah melancarkan perlawanan dengan membongkar kebobrokan Susno. Susno disebut terlibat kasus rekayasa SMS ancaman pembunuhan terhadap dirinya sendiri. "Selama ini kami menahan diri. Kami masih tunggu, ini jangan diungkap karena siapa tahu dia (Susno) mau mengubah diri," kata Kastorius Sinaga di Jakarta, Selasa (23/3/2010). Susno sendiri membantah tudingan Kastorius itu.

Pengamat LIPI Hermawan Sulistyo di Jakarta, Sabtu (20/3/2010) kepada

foto-foto: repro

wartawan menilai tindakan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji menuding sejumlah nama terkait makelar kasus di tubuh kepolisian mencoreng nama institusi kepolisian. Menurutnya, Susno semestinya mundur sebelum mengungkapkan uneg-unegnya terkait markus itu. Dia menilai tindakan Susno lebih didasari pada sakit hati karena posisinya sekarang terpinggirkan.

Pernyataan bernada kasar datang dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul. "Melihat keberanian dia, saya katakan juga, dia perlu berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater," kata Ruhut Sitompul, di Jakarta, Sabtu (20/3/2010).

Menurutnya, Susno secara sadar atau tidak telah menantang para petinggi Polri untuk berlaku lebih keras terhadapnya.

Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Drs. M. Togar Sianipar Msi yang juga tampil di layar televisi (25/3/2010), juga bernada mengecam Susno Duadji. Menurutnya, apabila pelanggaran disiplin seperti yang dilakukan Komjen Susno Duadji itu dibiarkan, dikhawatirkan dapat merembet atau ditiru sampai institusi tingkat terbawah. Itu sangat berbahaya.

Guru Besar Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar, Sabtu (20/3/2010) juga berpendapat kondisi ini sudah sangat gawat, para petinggi di institusi penegak hukum malah saling tuduh. "Para bawahan, ketika melihat para atasan mereka di pusat seperti itu, akhirnya mereka lama-lama bisa ikut-ikutan," kata Bambang.

Karena itu, Bambang menyarankan agar Presiden segera turun tangan. Menurutnya, kekisruhan yang terjadi di tubuh Polri itu akibat persoalan lama, yaitu lemahnya birokrasi, manajemen personel, serta mekanisme kontrol internal. Semua itu, katanya, dapat memicu terjadinya perilaku menyimpang, seperti keberadaan makelar kasus, oleh aparat. Maka, Bambang Widodo menyarankan Presiden menggunakan kesempatan ini untuk membenahi institusi Polri, yang selama ini dianggap banyak bermasalah oleh masyarakat.

Menurutnya, Presiden juga bisa memanfaatkan semua informasi yang keluar dari pernyataan dan tuduhan mereka yang lagi berseteru itu. Lalu dicari tahu sejauh mana kebenarannya. Untuk itu, Presiden bisa memerintahkan Kejaksaan Agung atau bahkan mengundang KPK mengusut kasus ini dalam rangka pembenahan Polri ke depan.

Diapresiasi Sebagai Berkah

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga sependapat bahwa kekisruhan ini sebagai pintu masuk membenahi Polri dengan mengungkap kebenaran tuduhan dan pernyataan Susno Duadji. Walaupun dia tidak sependapat tentang perlunya

Penasihat IPW Johnson Panjaitan: *Pelajaran dan terapi kejut*

segera Presiden turun tangan. Menurut Mahfud, Presiden tidak perlu turun tangan dalam kasus tersebut.

Sebab, Mahfud memandang polemik seputar pernyataan Susno Duadji soal jenderal-jenderal di tubuh kepolisian yang terlibat makelar kasus, justru bernilai sebagai berkah terselubung. Menurut Mahfud, saling ungkap dan buka-bukaan para petinggi Polri itu gejala bagus untuk mengungkap kebenaran isu-isu yang telah lama menjadi rahasia umum.

"Memang hal seperti itu (buka-bukaan) harus dilakukan kalau kita mau membenahi diri," kata Mahfud saat menghadiri seminar konstitusi di Yogyakarta, Sabtu (20/3/2010). Karena, menurutnya, kalau mengikuti prosedur normal, akan selalu ditutup-tutupi. "Masalah ini, kan, sudah puluhan tahun terjadi, bukan rahasia baru yang terungkap. Semua orang juga sudah tahu," kata Mahfud.

Maka, Mahfud mendorong Susno untuk membuka seluruh hal yang diketahuinya tentang kesalahan-kesalahan koleganya. Begitupun sebaliknya, jika Susno punya kesalahan, Polri harus membukanya. "Nanti, penyelesaian terbaiknya, ya, lewat jalur hukum. Siapa yang terbukti, ya, ditindak. Kalau dua-duanya menerima suap, ya, 'digebuki'," ujarnya.

Anggota Komisi III (Bidang Hukum) DPR, Didi Irawadi Syamsuddin juga memandang keberanian Komjen Susno Duadji membeberkan dugaan ada makelar kasus di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diapresiasi. "Jadikan semua keterangan Susno itu sebagai momentum untuk membersihkan institusi Polri, terutama Mabes Polri, dari kontaminasi mafia hukum," kata Didi Irawadi Syamsuddin, di Jakarta, Jumat (19/3/2010).

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki juga berpendapat bahwa dugaan praktik makelar kasus dalam penyidikan kasus pajak di Mabes Polri dapat menjadi momentum bagi Polri untuk membersihkan institusinya. Untuk itu, Teten menyarankan agar pihak Polri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit kekayaan pejabat di jajaran Polri.

"Pimpinan Polri dan KPK harus memiliki komitmen untuk melakukan audit kekayaan pejabat Polri dari tingkat Polres sampai pimpinan Polri," kata Teten Masduki di Jakarta, Jumat (19/3/2010).

Penasihat Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan, menimpali, KPK harus menindaklanjuti dugaan praktik makelar kasus perpajakan di Mabes Polri. Dia melihat kasus ini dapat menjadi pelajaran dan terapi kejut (shock therapy) bagi jajaran Polri untuk tidak melakukan penyimpangan tugas sekaligus untuk pembenahan tubuh Polri.

Koordinator Tim Pembela Suara Rakyat Anti Kriminalisasi, Sugeng Teguh Santoso dalam rilisnya, Sabtu (20/3/2010) mengemukakan tindakan mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Pol Susno Duadji perlu didukung untuk kepentingan institusi Polri, khususnya mereformasi lembaga tersebut dari dalam.

Dukungan ini diberikan karena yang mengetahui secara khusus internal Polri adalah Susno Duadji. Karena itu, dia mendorong agar rekayasa kasus atau mafia kasus di lembaga kepolisian dibongkar. Jika Susno dikriminalisasi akibat laporannya ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Tim Pembela Suara Rakyat Anti Kriminalisasi siap memberikan bantuan hukum secara probono apabila Susno memintanya.

Sementara, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman juga merespon informasi Susno Duadji terkait markus di Mabes Polri. Sehubungan dengan itu, Benny mengatakan, Komisi III DPR berencana memanggil Susno untuk klarifikasi perihal informasi keberadaan markus di Mabes Polri. Kemudian, Susno sendiri telah mendatangi Komisi III DPR, Selasa (30.3/2010) untuk meminta perlindungan karena dia merasa tertekan setelah membongkar mafia hukum tersebut.

■ BI/MLP

Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri jabat tangan akrab dengan Komjen Susno Duadji sebelum kasus markus menerpa Kepolisian

Who is Who Susno Duadji
Berpotensi Jadi Ketua KPK

Dipecat (dikorbankan) walau merasa bukan dia yang salah, dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK dan Bank Century, Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri (24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009), menunjukkan keberanian membuka tabir (*whistleblower)* makelar kasus di Mabes Polri. Sehingga membuka mata publik bahwa mantan Kapolda Jawa Barat, kelahiran Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954, itu berpotensi menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode berikutnya.

Keberanian Komjen Pol. Drs. Susno Duadji, SH, MSc membuka beberapa kasus dalam tubuh Polri, di mata banyak orang telah menunjukkan integritas dirinya yang berpotensi jadi pimpinan KPK. Susno, sebagai seorang jenderal polisi bintang tiga, pastilah bukan seorang yang putih bersih seperi kapas. Ibarat sepatu atau sapu yang dipakai pastilah terkena kotor. Tetapi, keberaniannya membuka aib dalam institusinya, cukup mengindikasikan dia seorang pejabat tinggi polisi yang relatif bersih dan punya keberanian dan ketegasan sikap memberantas korupsi.

Suatu integritas dan keberanian yang amat tergolong langka di negeri ini. Ketika banyak orang, pejabat, cendekia, lebih mencari aman dan bersuara seolah-olah untuk mendulang pencitraan tinggi. Sehingga negeri ini semakin tinggi peringkat skor terkorupnya di Asia Pasifik dari skor 8, 28 tahun 2008 menjadi 9,27 tahun 2009.

Sehingga pantaslah bila ada beberapa pihak yang memandang Susno Duadji pantas dan berkesempatan menjadi pimpinan KPK. "Melihat keteguhan sikap Susno Duadji, maka rasanya dia sangat patut dijadikan ketua KPK. Susno pantas dan mampu memimpin KPK, dan KPK butuh pimpinan yang berkualitas seperti dirinya," kata salah satu tokoh pendiri Perhimpunan Nasionalis Indonesia (Pernasindo) Dr Ir Ricky Avenzora, MScF di Jakarta, Selasa (23/3/2010).

Menurut Ricky, rekam jejak Susno adalah sangat jelas, dan juga sangat teruji baik saat menjadi Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kapolda Jawa Barat. Ricky merupakan satu dari 88 tokoh Pernasindo yang didirikan awal Juni 2006. Deklarator perhimpunan ini antara lain mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, sejarawan LIPI Asvi Warman Adam, Christianus Siner Key Timu dari Petisi 50, Guruh Soekarnoputra, Jaya Suprana, Luhut MP Pangaribuan, Revrisond Baswir, Ermaya Suradinata, Sala-

foto: poskota

huddin Wahid, Sri Edi Swasono, dan Aria Bima. Kwik Kian Gie menjadi Ketua Presidiumnya.

Pernyataan senada juga dikemukakan Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane bahwa mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji layak menjadi Ketua KPK. Neta S Pane mengatakan, pernyataan Susno yang membeberkan dugaan keterlibatan petinggi Polri dalam skandal korupsi merupakan suatu keberanian. Karena itu, jenderal bintang tiga itu layak menjadi Ketua KPK meski membutuhkan proses yang panjang.

Walaupun, Neta lebih berharap, Susno menjabat sebagai Kapolri menggantikan Bambang Hendarso Danuri. Karena, Neta melihat, sosok Susno mampu memperbaiki citra Polri yang selama ini terkesan buruk.

Sementara Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, ketika menyatakan menyambut baik mundurnya Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, dari jabatannya, menyebut salah satu figur yang dinilai cocok untuk menggantikan Tumpak adalah Susno Duadji.

Jejak Rekam Susno

Mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kapolda Jawa Barat itu sudah mengunjungi 90 negara untuk belajar menumpas kasus korupsi. Dia lulusan Akabri Kepolisian (1977), PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) dan Sespati Polri. Selain itu dia juga lulusan S-1 Hukum, dan S-2 Manajemen.

Suami dari Herawati dan ayah dari dua orang putri, itu juga menekuni kursus dan pelatihan di antaranya Senior Investigator of Crime Course (1988), Hostage Negotiation Course (Antiteror) di Universitas Louisiana AS (2000), Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur Malaysia (2001), Studi Perbandingan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan (2003), serta Training Anti Money Laundering Counterpart di Washington, DC, AS.

Anak kedua dari delapan bersaudara dari ayahnya Duadji, seorang sopir, dan ibunya, Siti Amah, pedagang kecil, itu mulai meniti karir di kepolisian sebagai perwira polisi lalu lintas. Karirnya mulai menanjak setelah dipercaya menjabat Wakapolres Yogyakarta. Kemudian naik menjadi Kapolres di Maluku Utara, Kapolres Madiun, dan Kapolresta Malang.

Kemudian Susno ditarik ke Jakarta, menjadi Kepala Bidang Penerapan Hukum Divisi Pembinaan Hukum di Mabes Polri. Dia pun dipercaya mewakili institusi Polri membentuk KPK pada tahun 2003. Saat menjabat Kepala Bidang Penerapan Hukum Divisi Pembinaan Hukum Polri itu dia memperoleh pangkat Kombes. Setelah itu, pada tahun 2004 ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga menjabat Wakil Ketua PPATK dan pangkatnya menjadi Inspektur Jenderal (Irjen).

Setelah sekitar tiga tahun di PPATK, Susno dipercaya menjabat Kapolda Jawa Barat mulai 30 Januari 2008 sampai 24 Oktober 2008. Saat menjabat Kepala Polda Jawa Barat, nama Susno mulai mencuat di tingkat nasional. Saat itu, Susno menyatakan perang melawan pungutan liar dalam pelayanan lalulintas. Di depan perwira se-Polda Jawa Barat, dia menyatakan tak perlu ada lagi setoran dan tak perlu ingin kaya karena dari gaji saja sudah cukup. "Kalau mau kaya jangan jadi polisi tetapi pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya yang ingin dilayani," katanya mengingatkan.

Lalu, sejak 24 Oktober 2008, dia diangkat menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menggantikan Bambang Hendarso Danuri, yang kemudian menjabat Kapolri. Kala itu, Indonesia Police Watch berpendapat pengangkatan Susno menjadi Kabareskrim kurang tepat karena dianggap kurang kaya pengalaman di bidang reserse. Sehingga dia dinilai kurang mumpuni memimpin korps reserse se-Indonesia.

Namun, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri justru menilai Susno sebagai sosok yang tepat karena memiliki integritas, konsisten keras, tegas dan tidak kompromis dengan pelaku kejahatan. Hal itu dikemukakan Kapolri, saat Susno naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal, 12 November 2008.

Dalam jabatannya sebagai Kabareskrim Polri, Susno Duadji tentu menangani berbagai kasus pidana kriminal dan korupsi. Nama Susno pun makin melambung tinggi. Sempat dicaci kemudian dipuji.

Ketika mencuat kasus kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Bibit dan Chandra), maupun kasus pembunuhan berencana yang didakwakan kepada Antasari Azhar, nama Susno Duadji amat dibenci sebagian besar publik. Dia dianggap sebagai tokoh penting dalam rekayasa pelemahan KPK itu.

Ketika itu, dia mengibaratkan Polisi sebagai buaya versus KPK sebagai cicak. Sehingga kasus kriminalisasi pimpinan KPK menjadi lebih populer dengan sebutan Cicak versus Buaya. Istilah ini makin memicu gelombang protes kepada Polri dan menuai dukungan kepada KPK.

Walaupun Susno kemudian menjelaskan bahwa istilah itu dikemukakannya dalam suatu percakapan dengan wartawan tentang teknologi penyadapan yang dimiliki Polri dan KPK. Kalau dari segi teknologi penyadapan, peralatan Polri masih lebih baik dari KPK. Perbandingannya seperti buaya (Polri) dan cicak (KPK). Tapi dari segi kewenangan atau kekuasaan justru sebaliknya KPK (buaya) dan Polri (cicak). Tapi, penjelasan ini tidak bisa lagi menghapus stigma arogansi Polri sebagai buaya versus Kpk sebagai cicak di opini publik.

Kemudian, akibat gelombang dukungan kepada KPK makin besar dan sebaliknya kepercayaan kepada Polri makin rendah, Presiden SBY yang sudah terlambat bersikap, dipaksa membentuk Tim Delapan (Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada dua pimpinan KPK Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Beberapa hari setelah Tim Delapan yang dipimpin Adnan Buyung Nasution terbentuk, Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang terbuka memperdengarkan rekaman pembicaraan telepon Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang di Kejaksaan Agung dan Mabes Polri dan lain-lain. Dalam versi Polri, Anggodo Widjojo adalah menjadi pelapor pemerasan yang dituduhkan dilakukan oleh oknum pimpinan KPK. Sementara dalam versi KPK, Anggodo Widjojo terduga penyuap oknum KPK dan dituduh menghalangi penyidikan atas tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan pemilik PT Masaro, Anggoro Widjojo, kakak Anggodo Widjojo. Hanya dalam rekaman itu, Anggodo menyebut Truno 3 yang langsung disimpulkan oleh Tim Delapan sebagai Kabareskrim Susno Duadji. Kendati Susno menjelaskan bahwa di Mabes Polri yang disebut Truno 3 itu adalah kode untuk Direktur III Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Sedangkan kode untuk Kabareskrim adalah Tribrata 5. Namun, publik, terutama Tim Delapan, tetap tidak percaya.

Jabatan strategisnya sebagai Kabareskrim, membuat orang merasa yakin bahwa Susno memegang kendali rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK tersebut. Kendati Susno juga telah menjelaskan bahwa dia sebagai Kabareskrim tidak dilibatkan dalam pengusutan dugaan suap dan pemerasan yang dituduhkan kepada pimpinan KPK (Bibit-Chandra), untuk menghindari konflik kepentingan. Kasus ini ditangani Wakabareskrim yang langsung bertanggung jawab ke atas. Tetapi publik, terutama Tim Delapan, selalu tidak percaya.

Dia menyebut untuk menghindari konflik kepentingan, karena pada saat bersamaan KPK tengah mengusut kasus pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century serta kasus korupsi Masaro yang melibatkan Anggoro Widjojo, kakak Anggodo Widjojo. Dalam kasus pencairan dana Budi Sampoerna di Bank Century, disebut ada surat yang ditandatangani

Susno. Beredar isu adanya rekaman percakapan telepon antara Susno Duadji dan Lucas (pengacara Budi Sampoerna) menyebut angka 10 yang diasumsikan sebagai pemberian Rp.10 miliar kepada Susno atas keluarnya surat itu. Susno pun hampir menitikkan air mata di depan Komisi III DPR ketika menjelaskan bahwa dia tidak permah menerima Rp.10 miliar dari Budi Sampurna atau siapapun dalam kasus Bank Century.

Sedangkan dalam kasus korupsi PT Masaro, Susno pernah menemui Anggoro (bos Masaro) di Singapura. Susno menjelaskan keberangkatannya ke Singapura menemui Anggoro adalah dalam rangka tugas resmi atas perintah Kapolri, tetapi publik, terutama Tim Delapan, tidak percaya bahwa Susno tidak terlibat.

Tim Delapan mendesak agar Susno Duadji dinonaktifkan selama masa kerja Tim Delapan. Susno sendiri meresponnya dengan secara sukarela menyatakan diri mengundurkan diri dari jabatan Kabareskrim pada tanggal 5 November 2009. Namun, Kapolri hanya menyetujui penonaktifan. Lalu setelah nonaktif, Susno diaktifkan kembali pada 9 November 2009 setelah proses pemeriksaan Tim Delapan atas dirinya selesai.

Namun setelah rekomendasi akhir Tim Delapan disampaikan kepada Presiden pada 16 November 2009, delapan hari berikutnya, tepatnya 24 November 2009, Kapolri secara resmi mengumumkan kepada publik pemberhentian Susno Duadji dari jabatan Kabareskrim. Dia digantikan Komjen Pol Ito Sumardi Djunisanyoto.

Dalam posisi jenderal bintang tiga tidak mempunyai meja di Mabes Polri, susno pun sering mangkir tidak masuk kantor. Lalu dia pun sering tampil dalam forum publik. Dia tampil sebagai *whistleblower* membuka tabir aib Polri menjadi terbuka di mata publik, yang sebelumnya, sesungguhnya, telah menjadi rahasia umum.

Pertama, Susno tampil menjadi saksi di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2010) dengan membeberkan kesaksian yang meringankan Antasari Azhar, mantan Ketua KPK, yang dilengserkan setelah didakwa sebagai otak pembunuhan berencana Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Kedua, Susno Duadji tampil di depan Pansus Angket DPR Kasus Bank Century, Rabu (20/1/2010). Dia antara lain memberikan dokumen yang lalu disebut 'testimoni' dan selanjutnya dikembangkan dan diterbitkan menjadi buku berjudul: Bukan Testimoni Susno Duadji. Testimoni itu antara lain menyangkut kesengajaan (tidak memprioritaskan) melanjutkan penyidikan kasus bail out Bank Century karena ada yang diduga terlibat sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden dan kemudian menang.

Ketiga, Susno Duadji mengungkap aib makelar kasus pencucian uang dan pajak di Mabes Polri, dalam diskusi bukunya, Bukan Testimoni Susno, Rabu (10/3/2010) di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dan kemudian melaporkannya kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pada Kamis (18/3/2010).

Nama : Drs. Susno Duadji, S.H, M.Sc.
Lahir : Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954
Agama : Islam
Pangkat : Komisaris Jenderal Polisi
Jabatan : Kabareskrim Mabes Polri (24 Oktober 2008 – 30 November 2009)
Istri : Herawati
Anak : Dua puteri
Ayah : Duadji
Ibu : Siti Amah

Pendidikan:
- Akabri Kepolisian, lulus 1977
- PTIK
- S-1 Hukum
- S-2 Manajemen
- Sespati Polri
- Senior Investigator of Crime Course (1988)
- Hostage Negotiation Course (Antiteror) di Universitas Louisiana AS (2000)
- Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur Malaysia (2001)
- Studi Perbandingan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan (2003)
- Training Anti Money Laundering Counterpart di Washington, DC, AS

Karir:
- Perwira polisi lalu lintas
- Wakapolres Yogyakarta
- Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang
- Kepala Bidang Penerapan Hukum Divisi Pembinaan Hukum Polri
- Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Kapolda Jabar 30 Januari 2008 sampai 24 Oktober 2008
- Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri (24 Oktober 2008 – 30 November 2009)

Sc

Dengan gaji belasan juta rupiah per bulan, Gayus b

Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, adalah instansi teknis paling kompeten menjelaskan hal ini kepada dunia. Sebuah kementerian yang menjadi pelopor remunerasi tinggi, yang ternyata tidak bisa mencegah korupsi. Dengan remunerasi di kementerian ini gaji pegawai sekelas Gayus, golongan IIIA adalah sekitar Rp11,1 juta-Rp11,4 juta per bulan. Sementara kementerian lain, yang tanpa remunerasi, gaji PNS golongan IIIA dengan masa jabatan 0 sampai 10 tahun hanya berkisar antara Rp 1.655.800 sampai Rp 1.869.300 per bulan.

Inilah salah satu buah reformasi birokrasi yang dilakukan dengan mengandalkan pada peningkatan remunerasi. Tanpa pengembangan mekanisme *check and balances* secara memadai dan tanpa pengawasan internal dengan kontrol intensif dan audit kekayaan secara ketat. Bayangkan seorang pegawai pajak berusia 30 tahun, golongan IIIA, memiliki rekening bersaldo Rp.25 miliar. Punya rumah mewah berharga hampir Rp.2 miliar. Bisa gonta-ganti mobil mewah seperti Ford Everest, Alphard, Mercy, sampai BMW seri terbaru.

Menurut mantan Wapres Jusuf Kalla ini potret manusia yang tidak pernah

ebuah Potret Pegawai Pajak

isa berganti-ganti mobil mewah

Bak kisah dalam dongeng. Simsalabim, hidup Gayus Halomoan P. Tambunan (30 tahun), seketika berubah gemerlap. Dari sebelumnya tinggal di rumah Gang Sempit pindah ke Gading Park View. Namun, sesunguhnya ini bukan dongeng, tapi dunia nyata potret pegawai pajak di sebuah negeri terkorup di Asia Pasifik. Lalu, apa kata dunia?

puas dengan penghasilan yang sudah ditetapkan oleh negara. "Gaji petugas pajak golongan III A itu lima kali lipat dari pegawai lain dari golongan yang sama, tetapi tidak pernah puas," kata Jusuf Kalla kepada wartawan Sabtu (27/3/2010).

Menurut Kalla, kasus Gayus memberikan indikasi bahwa tidak 100 persen benar kenaikan gaji bagi pegawai negeri akan menurunkan tingkat korupsi. Pendapat senada dikemukakan Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indriyanto Seno Adji bahwa kasus Gayus mencerminkan penghasilan yang tinggi, sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan, tidak menjamin aparat birokrasi bersih. "Korupsi menjadi bagian dari kultur yang sulit dihilangkan di kalangan aparat negara," katanya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa gaya hidup pegawai pajak lebih gemerlap dari guru dan pegawai negeri sipil lainnya. Sehingga sepatutnyalah dilakukan audit kekayaan para pegawai pajak, untuk menjawab apa kata dunia tentang hal ini. Sebab, sangat mungkin masih banyak Gayus-Gayus yang lain di sekitar kita.

Bahkan, belajar dari kasus Gayus ini, Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana di Jakarta, Minggu (28/3/2010), mengatakan perlu didorong pemeriksaan kekayaan dan pemberlakuan pembuktian terbalik untuk harta pegawai perpajakan dan penegak hukum lainnya. Menurut Denny, kasus Gayus ini menjadi momentum untuk perbaikan mendasar lembaga penegak hukum dan aparat pajak. Perbaikan mendasar itu, antara lain, dengan pengkajian gaya hidup aparat penegak hukum dan pegawai pajak serta memperketat sistem pengawasan internal.

Apalagi, sesuai mengakuan 'curhat' Gayus dalam tiga kali pertemuan dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, apa yang dilakukannya merupakan hal yang biasa dilakukan di institusi tempatnya bertugas. Bahkan apa yang dilakukannya masih terbilang kecil dibanding pegawai dan pejabat pajak lain yang menangani kasus perpajakan lebih besar

Ini hanyalah sebuah potret pegawai pajak, yang pada hari-hari terkhir ini menjadi pemberitaan luas media massa dan buah bibir publik. Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengakui posisi Gayus, sebagai staf penelaah keberatan dan banding Direktorat Jenderal Pajak cukup strategis karena bertugas menguraikan banding ketika terjadi sengketa pajak di hadapan hakim di persidangan.

Gayus Tambunan dikategorikan punya rekam jejak kinerja cukup baik oleh instansinya. Sebab, konon, hampir 90 persen kasus keberatan yang ditanganinya berlanjut ke Pengadilan Pajak. Direktur Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), Ditjen Pajak, Bambang Basuki mengakui kinerja Gayus cukup baik.

Namun, rupanya kinerja baik, tidak selalu berbanding lurus dengan moral dan etika profesi. Atau, mungkin modus pelanggarannya sudah semakin canggih. Bukankah korupsi di negeri ini sudah semakin canggih? Sehingga peringkat Indonesia pun semakin tinggi sebagai negara terkorup? Lalu, bagaimana pula modus pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak yang jejak rekam kinerjanya tidak baik? Sedangkan yang berkinerja baik masih korup! Karena itu, Bambang Basuki, mengaku pihaknya masih mencari modus pelanggaran Gayus bagaimana.

Gayus Halomoan Tambunan, pegawai pajak yang dituding terlibat penggelapan pajak senilai Rp 25 miliar dan terkait makelar kasus di tubuh Polri, hanya dalam hitungan lima tahun, hidupnya berubah gemerlap. Lulusan STAN Jakarta tahun 2000, itu lahir dan dibesarkan di rumah sederhana di gang sempit perkampungan padat di Jalan Warakas I Gang 23 Jalan E, RT 11 RW 8 Nomor 4, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok. Bagian belakang rumah itu dua lantai, namun hanya berdinding tripleks.

Keluarga Gayus puluhan tahun tinggal di rumah sederhana ini. Menurut tetangganya, Gayus yang lahir di sini merupakan anak kedua. Dia memiliki empat saudara kandung. Ia anak kedua.

Namun, kata tetangganya, sejak lima tahun lalu, rumah itu sudah kosong. Rumah sederhana itu, kini sudah kurang terawat. Ayah Gayus sudah pindah ke daerah Depok. Sedangkan Gayus sempat tinggal di Apartemen Cempaka Mas. Lalu, kini tinggal di perumahan elite berharga miliaran rupiah di Gading Park View Blok ZE Nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dia tinggal di rumah mewah ini setelah menikah.

Di lingkungan Warakas dan kerabat, Gayus tersohor sebagai seorang sukses. Konon, dia memiliki banyak properti, bahkan juga di Singapura. Juga punya mobil BMW seri terbaru. Lalu, sejak namanya disebut oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji, terlibat dalam kasus pencucian uang dan penggelapan pajak, orang pun menjadi paham. Sejak itu, rumah Gayus pun tampak sepi.

Gayus pun diduga 'dibiarkan' melarikan diri ke Singapura. Kini setelah Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menjemputnya dari Singapura, Selasa (30/3), publik berharap aliran dana Rp.24,6 miliar yang pemblokirannya dibuka dua hari setelah Komjen Susno Duadji dilengserkan dari jabatan Kabreskrim, bisa terbuka lebar.

■ BI/TSL

foto-foto: repro

Puncak Tragedi Pendidikan

Tatkala persoalan pemerataan pendidikan belum teratasi, kini penyakit jiplak-menjiplak karya tulis atau plagiat merebak dalam dunia pendidikan Indonesia. Parahnya lagi, kecurangan ini juga banyak dilakukan oleh pendidik sendiri, bahkan oleh guru besar dan calon guru besar. Sanksi tegas diharapkan bisa mengubah kelakuan buruk ini.

karikatur: sonny p

Turut berduka cita kiranya layak diucapkan kepada dunia pendidikan Indonesia sekarang ini. Sebab, di tengah persoalan pemerataan pendidikan yang masih jauh dari harapan, juga polemik masalah ujian nasional di tingkat pendidikan dasar dan menengah serta berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya, kini di tingkat pendidikan tinggi juga marak terjadi penjiplakan karya tulis atau plagiat untuk meraih gelar dan atau pengakuan prestasi.

Jiplak-menjiplak karya tulis ilmiah ini sebenarnya sudah lama berlangsung. Wakil Mendiknas Fasli Jalal misalnya, mengakui bahwa kasus penjiplakan dengan mengutip jurnal luar negeri sudah berlangsung lama di negeri ini.

Diduga, plagiat tidak hanya dilakukan mahasiswa, tapi juga oleh pejabat. Satu contoh, kasus yang menimpa Marwan Effendy, seorang jaksa yang pernah dicalonkan sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa tahun silam. Ia diduga melakukan plagiat dalam menyusun disertasi doktoral. Dalam uji kelayakan dan kepatutan (*fit and properly test*), Komisi III DPR mencurigai Kepala Pusat dan Latihan Kejaksaan Agung itu menjiplak lantaran menyelesaikan disertasinya hanya dalam waktu setahun. Wila Chandrawila, anggota Komisi III waktu itu, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, bercermin dari pengalamannya 30 tahun menangani disertasi, mengungkapkan tidak pernah ada calon doktor yang menyelesaikan disertasinya dalam tempo setahun.

Namun, terbongkarnya kasus plagiat yang dilakukan para pendidik - orang yang dianggap paling memiliki integritas, karena yang bersangkutan bekerja di ranah pengemban ilmu pengetahuan, intelektual, dan moral - seperti kasus plagiat sekitar 1.500-an guru di Pekanbaru, Riau dan ulah seorang guru besar yang menjiplak karya tulis seorang penulis luar negeri, membuat kasus ini belakangan ramai dibicarakan.

Parahnya lagi, beberapa kasus yang terbongkar itu juga diyakini hanya merupakan puncak gunung es. Artinya, sedikit yang tampak itu diyakini hanya gambaran dari sekian banyak yang belum kelihatan. Bahkan, plagiat karya tulis ini oleh sebagian orang rupanya sudah dianggap hal biasa.

Dengan marak serta terbukanya kesempatan melakukan plagiat ini, tidak mengherankan jika banyak sarjana bertitel panjang di negeri ini tetapi bobot ilmiahnya sangat rendah. Dengan besarnya kesempatan melakukan plagiat ini, maka tidak tertutup kemungkinan juga jika sebuah karya tulis telah dijiplak hingga berkali-kali.

Di kalangan mahasiswa strata satu (S1), plagiat skripsi diyakini sudah sejak lama dan masih terjadi hingga sekarang. Kebiasaan ini pun diduga tidak hanya terjadi di perguruan tinggi di kota tertentu saja, tapi merata di seluruh Tanah Air. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan banyaknya jasa layanan pembuat skripsi di berbagai kota yang mengiklankan diri secara terang-terangan. Di beberapa kota, iklan jasa layanan pembuatan karya ilmiah itu bahkan menghiasi media massa maupun dalam bentuk selebaran yang ditempel di pinggir jalan. Mereka umumnya menyebut diri sebagai penjual jasa konsultasi atau bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi.

Memerhatikan cara kerja para penjual jasa itu, pembuatan skripsi bisa dibedakan dalam dua jenis. Pertama, membuat sikripsi yang benar-benar baru. Dan kedua, menjiplak karya tulis orang lain dengan hanya mengganti nama penulis dan objek penelitian saja.

Kelakuan buruk ini sangatlah menyedihkan bagi pendidikan di negeri ini. Karena, perguruan tinggi yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir dalam menjaga moral, etika, dan kejujuran serta menjadi dapur pencetakan calon-calon pemimpin bangsa, ternyata banyak menelurkan orang-orang yang berkelakuan memalukan. Orang-orang berkelakuan penipu, yang sanggup menipu diri sendiri. Dengan kelakuan ini, semua bangunan idealisme yang selama ini dipercaya, dikhawatirkan akan runtuh.

Merebaknya kebiasaan plagiat di dunia pendidikan ini, menurut pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Warisan Luhur Indonesia (Indonesia Heritage Foundation) Ratna Megawangi merupakan bukti kegagalan sistem pendidikan dan pola asuh dalam keluarga, terutama karena belum adanya pendidikan karakter. “Kita tahu bohong dan mencontek itu salah, tetapi dibiarkan. Pemahaman atas benar-salah tidak dipraktikkan dalam perbuatan,” tuturnya.

Frietz R Tambunan, dosen Etika dan

Metoda Penelitian Universitas Katolik St Thomas, Medan, sebagaimana dirilis *Kompas* mengatakan, banyaknya kecurangan di perguruan tinggi, khususnya penjiplakan, merupakan puncak tragedi pendidikan. Hilangnya kejujuran, katanya, sama artinya hilangnya roh pendidikan.

Bukti yang dikemukakan Frietz, aneka ketidakjujuran yang sudah berlangsung lama dalam konversi nilai ujian akhir nasional tahun 2004. Ini merupakan bukti kejahatan intelektual institusional yang dilakukan secara transparan oleh Depdiknas. "Sekarang kita menuai hasilnya," kata Frietz.

Menurut Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Prof Yohannes Budi Widianarko, plagiatisme selama ini susah dideteksi sebab hanya diketahui oleh penulis yang bersangkutan dan korban plagiat. Plagiat terbongkar hanya jika korban atau ada pihak lain yang kebetulan mengetahui, serta mau melaporkannya.

Di kalangan mahasiswa, budaya plagiatisme umumnya terjadi karena si mahasiswa tidak mau pusing memikirkan berbagai kesulitan pengerjaan skripsi. Rendahnya kemauan dan kemampuan mahasiswa membuat karya tulis itu tentu sangatlah disayangkan, sebab budaya itu sangat merusak kualitas mahasiswa itu sendiri. Padahal, tugas akhir berupa skripsi, tesis atau disertasi itu seharusnya merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk membuat karya besar dalam hidupnya.

Tidak jauh berbeda dengan mahasiswa, plagiat di kalangan aparat birokrasi juga diduga sudah sangat banyak dan lama terjadi. Indikasinya, banyak birokrat yang tiba-tiba meraih gelar S1 atau S2 padahal tidak pernah terlihat menulis sebuah karya ilmiah dan melakukan penelitian, bahkan jarang terlihat mengikuti perkuliahan. Plagiat kalangan birokrat ini diduga dilakukan karena tidak mau repot atau karena tidak punya waktu. Padahal, gelar itu harus mereka peroleh sebagai syarat kenaikan pangkat atau jabatan.

Yang paling menyedihkan dalam kasus ini adalah plagiat yang dilakukan oleh dosen sendiri. Untuk meraih predikat guru besar demi kenaikan tunjangan, pembuatan karya ilmiah pun dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara. Contohnya, memanfaatkan mahasiswanya untuk melakukan penelitian. Kemudian, ada juga yang menjiplak karya tulis dari luar negeri seperti yang baru-baru ini dilakukan Anak Agung Banyu Perwita, seorang guru besar Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Bandung yang menjiplak karya tulis seorang penulis asal Australia. Dan yang paling memiriskan lagi adalah plagiat yang dilakukan seorang guru besar terhadap skripsi seorang mahasiswa S1.

Contohnya di Yogyakarta, dua calon guru besar perguruan tinggi swasta dicurigai mengajukan karya ilmiah hasil jiplakan dalam berkas pengajuan gelar guru besarnya. Kecurigaan muncul saat pemeriksaan berkas pengajuan gelar guru besar di tingkat universitas. Salah satu karya ilmiah yang diajukan pernah menjadi bahan diskusi dalam seminar internasional di Yogyakarta. Satu karya ilmiah lainnya diduga merupakan hasil skripsi mahasiswa S-1 sebuah perguruan tinggi negeri terkenal di Yogyakarta. Kecurangan itu terbongkar karena kebetulan *reviewer* karya ilmiah calon guru besar itu adalah pembimbing mahasiswa yang telah lulus tersebut.

Memperhatikan ulasan di atas, kiranya dalam program pendidikan di Indonesia ke depan, perlu penekanan pembelajaran dalam hal bagaimana menanamkan karakter dan nilai-nilai yang penting untuk menghadapi kehidupan. Karena ada kata bijak yang mengatakan, manusia belajar bukan untuk sekadar memperoleh nilai berupa angka-angka yang kadang bersifat relatif dan subyektif, tetapi belajar untuk hidup. Belajar untuk memperoleh nilai-nilai yang penting mendukung hidup manusia.

Untuk mencegah berkembangnya sekaligus menghapuskan budaya plagiat di masa depan, kiranya pengawasan terhadap karya ilmiah lebih ditingkatkan lagi. Usul Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri yang mengatakan agar perguruan tinggi lebih gencar menyosialisasikan pengertian dan batasan penjiplakan, seperti dicontohkan di UI, dimana mahasiswa dan dosen harus memublikasikan karya ilmiahnya di kalangan internal dan umum agar diketahui jika terjadi plagiat, kiranya perlu diterapkan di berbagai perguruan tinggi lainnya.

Di samping itu, seperti dikatakan Fasli Jalal, perlu pengetatan aturan dan penjatuhan sanksi lebih serius di perguruan tinggi maupun pemerintah. Seperti juga dikatakan guru besar ilmu sejarah UGM Yogyakarta Bambang Purwanto, selama ini penjiplakan karya ilmiah cenderung ditutup-tutupi. Berlangsung terus tanpa sanksi. Hal mana kemudian telah mendorong makin merebaknya penjiplakan. Karena itu, menurutnya, seharusnya penjiplak dikenai sanksi tegas tanpa toleransi karena menyangkut mental dan moral bangsa. "Apa jadinya bangsa ini jika para calon pemimpin bangsa ini dididik oleh pencuri?" ujar Bambang.

Mengenai sanksi tersebut, jika pelakunya seorang mahasiswa yang baru lulus, barangkali pantas dikenakan sanksi pencabutan gelar. Sedangkan jika pelakunya adalah seorang birokrat, di samping sanksi pencabutan gelar, pemecatan dari pekerjaannya juga kiranya pantas dikenakan. Kemudian, jika pelakunya adalah seorang pendidik, yakni guru atau dosen, di samping sanksi pencabutan gelar dan pemecatan dari pekerjaannya, pengumuman pelanggaran itu kepada publik juga barangkali pantas dikenakan. Maksudnya, agar publik tahu bahwa pelaku adalah penghianat misi pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, si pelaku tidak diterima lagi jadi tenaga pengajar di lembaga pendidikan manapun.

Mengingat plagiat ini juga sering terjadi akibat kekurangmampuan pelaku menulis karya tulis, maka tindakan preventif juga tidak kalah pentingnya dilakukan guna meminimalisasi kebiasaan ini di kemudian hari. Salah satu caranya, senang menulis kiranya perlu ditanamkan kepada pelajar sejak dini dengan memasukkannya sebagai salah satu program pendidikan nasional. ■ **JK**

Isyarat Kegagalan Renumerasi

Kasus Gayus Tambunan mengisyaratkan kegagalan program remunerasi dalam meredam perilaku korup dalam tubuh pemerintah.

Tabuh genderang untuk melawan korupsi terus dikumandangkan di lingkungan birokrasi pemerintah. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberikan remunerasi kepada para pegawai. Konon hal ini dapat memperkecil praktek korupsi. Namun terkuaknya aksi makelar kasus di tubuh Polri dan Ditjen Pajak membuat masyarakat berpikir bahwa slogan untuk memberantas korupsi yang telah dihembuskan sejak reformasi hanyalah retorika belaka. Betapa tidak, Gayus HP Tambunan pegawai Ditjen Pajak golongan IIIA diduga melakukan tindak korupsi karena memiliki dana di rekeningnya hingga Rp 28 miliar.

Ini artinya, semangat reformasi yang diterapkan di lingkungan departemen keuangan oleh Menkeu Sri Mulyani ternyata tidak terbukti. Banyak kalangan yang melihat kebijakan tersebut masih banyak gagalnya memerangi korupsi. Roy Salam peneliti Indonesia Budget mengatakan, reformasi birokrasi yang dibungkus dengan remunerasi tinggi dengan alasan untuk meningkatkan kinerja, tidak bisa juga (diterapkan). Karena besarannya didasarkan pada struktur jabatan sehingga yang dominan adalah klasifikasi jabatan. Tidak melihat aspek lain, sejauh mana remunerasi berkorelasi positif dengan kinerja. Sementara di sisi lain, ia mengungkapkan masih adanya budaya 'uang jalan' yang dilakukan oleh pegawai dari departemen keuangan saat melakukan perjalanan ke daerah.

Sedangkan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, hal yang lebih utama dalam reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir para pegawai negeri sipil sehingga memiliki pola pikir yang bersih, dan setia melayani masyarakat. "Kalau belum membersihkan mindset-nya, kalau nggak ada, mindset melayani, digaji berapa ratus juta pun, hancur, jebol," katanya di DPD (7/4/2010).

Pengamat ekonomi Dradjad Wibowo menyebutkan bukti kebijakan remunerasi yang gagal mengurangi korupsi tersebut. Misalnya gaji di DPR, Bank Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan BUMN, tak kalah dengan birokrat negara maju, namun korupsi tak berhenti. Menurutnya terungkapnya kasus makelar pajak ini harus dijadikan momentum untuk bersih-bersih, dengan melakukan kontrol internal dan audit kekayaan pada pegawai di tempat basah. Mulai dari Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Keuangan Negara, dan pos di APBN seperti pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Apalagi Indonesia menganut model self assesment atau penentuan nilai pajak oleh wajib pajak (WP) dalam bentuk surat pemberitahuan tahunan (SPT). Yang memiliki kelemahan dimana pelaku Wajib Pajak (WP) menentukan nilai pajak lebih kecil. Selain itu, supaya para WP perusahaan lebih lancar mendapatkan restitusi, terpaksa membayar imbalan kepada petugas pajak yang berkisar 10-20 persen dari nilai restitusi. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan petugas pajak.

Selain itu, celah lain yang bisa digunakan untuk menekan para WP adalah pada saat melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran SPT yang diisi WP. Kantor pemeriksa pajak (karikpa) berhak memeriksa WP sewaktu-waktu. Bila WP dinyatakan kurang pajak, maka WP menyatakan banding atas hasil pemeriksaan. Celah inilah yang bisa dimanfaatkan petugas pajak untuk menekan WP, risikonya lebih besar bila WP melapor ke atasan pemeriksa pajak.

Di samping itu, juga banyaknya sengketa oleh para WP di pengadilan pajak yang memungkinkan bisa dipermainkan antara WP, aparat pajak, dan hakim. Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putrodi menyebutkan di kalangan aparat pajak dikenal istilah peternakan wajib pajak. Dengan modus kewajiban WP dibayar 60% ke negara, 40% sisanya untuk petugas pajak dan diskon bagi WP.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa para makelar kasus yang tak lain adalah petugas pajak sendiri leluasa melakukan praktek tersebut. Mahkamah Agung yang seharusnya mengawasi pengadilan kasus pajak melempar tanggung jawab dengan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya, karena Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan bernaung di bawah dua atap. Itulah yang dikeluhkan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa. Teknis peradilan di bawah naungan MA dan administrasi menjadi urusan Kementerian Keuangan.

Menurut Tumpa, MA hanya terlibat dalam pengesahan majelis hakim jika ada persidangan perkara pajak, sedangkan penunjukan hakim dilakukan Kementerian Keuangan. Dengan kondisi tersebut semakin memperburuk koordinasi yang berakibat sulit dilakukannya pengawasan. Oleh sebab itu, menurutnya perlu dibuatkan regulasi baru untuk menata peradilan pajak. Bahkan ada yang meminta agar sistem gaji di lingkungan kementerian yang memberikan remunerasi dicabut kembali, karena bisa juga membuat iri instansi yang lain.

Kasus Gayus Tambunan terang-terangan membuka kebobrokan di lingkungan Pengadilan Pajak dan menjadi kesempatan untuk meninjau kembali program remunerasi di jajaran Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Remunerasi didesain khusus untuk menghilangkan perilaku korup pada PNS namun melenceng dari cita-cita awal. Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengungkapkan, kasus Gayus Tambunan mengisyaratkan kegagalan program remunerasi dalam meredam perilaku korup dalam tubuh pemerintah. Presiden perlu mengoreksi kebijakan remunerasi ini agar tidak menjadi pemborosan anggaran. Apalagi jika program remunerasi yang dimulai di Kementerian Keuangan tersebut akan diadopsi oleh beberapa kementerian dan lembaga nonkementerian. ■ **SAN**

foto: repro

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P

Cuma Sekadar Bunga Politik

Wacana koalisi PDI-P dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terbukti hanya sebagai bunga politik. Dalam kongres ke-3 PDI-P, gaung wacana itu sontak sirna oleh pidato Megawati yang menggetarkan.

Menjelang kongres ke-3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 6-8 April 2010, santer terdengar adanya upaya menarik partai berlambang banteng gemuk itu merapat (berkoalisi) dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Gaung tersebut terasa nyaring karena disuarakan oleh petinggi partai tersebut, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufiq Kiemas yang notabene adalah suami dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Tidak bisa dipungkiri, sejak Pemilihan Presiden 2009 lalu, Taufiq Kiemas memang terlihat sangat serius mendorong PDI-P untuk bergabung atau berkoalisi dengan pemerintahan SBY.

Seperti disebutkan di atas, menjelang Kongres ke-3 PDI-P, Taufiq juga kembali menggaungkan wacana tersebut. "Masak kalah terus. Kalau berubah wacana, mungkin bisa lebih efektif," kata Taufik ketika itu. Menurut *feeling*-nya, suara dari bawah yang menginginkan PDI-P berkoalisi cukup besar. Ia juga mengatakan keyakinannya bahwa perolehan suara PDI-P akan bertambah pada pemilu 2014 bila berkoalisi dengan pemerintahan SBY.

Setelah mendegar ketegasan pidato Megawati dan sikap politik 'partai penyeimbang' yang dirumuskan Kongres III PDIP, Taufik ternyata belum berubah pendirian juga. Dia bersikeras menilai pintu koalisi dengan pemerintahan SBY masih tetap terbuka. "Siapa yang bisa menduga. Kalau Demokrat satu ideologi dan satu jenis, tidak tertutup. Kalau dia pro rakyat kan tidak tertutup," katanya usai pelantikan Megawati menjadi Ketum DPP PDIP 2010-2015, di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/4/2010).

Di lain pihak, sejak awal Megawati bersikukuh mengusung PDI-P tetap sebagai partai oposisi atau penyeimbang. Menanggapi wacana yang disampaikan Taufik Kiemas tersebut, Megawati dengan halus tapi cukup jelas sudah mengatakan, "Mereka yang senior punya hak bicara, tapi tak punya suara. Jadi tentu bolehboleh saja berbicara," katanya usai membuka Konferda di Jakarta, Minggu (21/3). Dia juga menegaskan, bahwa yang akan menentukan arah partainya berkoalisi atau tidak adalah peserta kongres yang berasal dari utusan berbagai daerah.

Sekjen PDIP Pramono Anung juga berpendapat, PDIP akan tetap menjadi ba-gian penyeimbang dari pemerintah. "Opo-sisi atau koalisi mendapat kajian yang mendalam dalam kongres. Dalam sistem presidensial tidak ada istilah itu. Ke depannya PDIP tetap konsisten sebagai penyeimbang," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/3).

Dia mengatakan, dengan menjadi kekuatan penyeimbang, maka jika ada kebijakan yang pro rakyat, PDI-P akan mendukung. Kekuatan tersebut menurutnya tidak ada urusannya dengan apakah ada kursi PDIP di kabinet atau tidak.

Dari daerah, DPD PDI-P Jawa Timur misalnya, mendesak DPP PDI-P tidak mengubah haluan dengan menjadi partai koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. "Dalam konteks pendidikan rakyat, saya kira oposisi lebih bagus dibandingkan koalisi yang hanya bertujuan kekuasaan," kata Sekretaris PDI-P Jawa Timur, Kusnadi kepada pers, Selasa (23/3). "Lebih baik oposisi. Kalau akhirnya harus susah, ya untuk kepentingan rakyat tidak apa-apa susah dulu," tambahnya.

Sesuai dengan aspirasi pengurus cabang, sikap tersebut akhirnya tegas disampaikan Megawati dalam pidato pembukaan kongres pada 6/4. Di situ, Megawati secara tegas mengatakan pilihan PDI-P menjadi partai penyeimbang bagi pemerintahan yang berkuasa dengan tidak memasuki kursi kekuasaan, melainkan sebagai mitra pemerintah yang kritis yang berada di luar pemerintahan.

Sebelumnya, para pengamat yang menanggapi wacana koalisi ini terbagi dalam beberapa pendapat. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti misalnya, menilai, bila koalisi terwujud, langkah itu akan merugikan PDI-P sebagai partai yang konsisten menyuarakan suara opo-sisi. Karena citra dan kredibilitas PDI-P sebagai partai oposisi dan membela rakyat akan punah yang membuat PDIP akhirnya akan ditinggalkan konstituen.

Di lain pihak, pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang-NTT, Dr John Stefanus Kotan SH., M Hum dan Nicolaus Pira Bunga SH., MHum berpen-dapat, merupakan hal yang wajar dalam berpolitik dan berdemokrasi jika PDI-P memilih jalan untuk memperbarui posisi politiknya dari partai oposisi dan membangun koalisi baru dengan Partai Demokrat.

Sedangkan pengamat politik Bachtiar Effendi berpendapat, bahwa rencana itu tak lebih sebagai bunga-bunga politik. Karena sangat kecil kemungkinannya kedua partai tersebut berkoalisi. Kalaupun ada, kuncinya di tangan Megawati Soekarnoputri. "Kalau suasana hati Ibu Mega tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi koalisi," ujarnya. Menurut Bachtiar, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Taufiq Kiemas akan adanya koalisi itu, hanya untuk mencairkan suasana politik semata.

Jika diperhatikan dengan seksama, langkah yang dilakukan PDI-P selama ini memang suatu manuver yang cukup bagus. Langkah itu membuktikan bahwa PDI-P sudah semakin matang berpolitik. Terbukti, langkah itu telah berhasil mendudukkan Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR 2009-2014. Dengan mengambil hati SBY dan Partai Demokrat, nama Taufik akhirnya diusulkan oleh tujuh fraksi di DPR, dan disetujui oleh dua fraksi lainnya. Kini pun, walau Taufik Kiemas sepertinya masih ngotot berkoalisi, tapi besar dugaan, hal itu juga cuma bunga-bunga politik. ■ **MS**

foto: repro

Ajakan Lecehkan DPR

Oleh: Ch. Robin Simanullang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan bahwa kebijakan *bail out* Bank Century adalah salah dan berbau korupsi, sehingga perlu ditindaklanjuti secara hukum. Setelah itu, sangat terasa ada kesan bernuansa ajakan: Mari lecehkan DPR! Padahal sebagian besar rakyat merasa suara dan aspirasinya terwakilkan dalam keputusan tersebut.

Walaupun, memang, adalah lumrah apabila ada pihak yang tidak sepaham dengan DPR. Tetapi menjadi menarik tatkala Presiden, Kejaksaan dan Kepolisian bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cenderung menyepelekan kepu tusan DPR tersebut. Terkesan dari pidato dan pernyataan para petinggi lembaga negara ini bernada menjurus ajakan melecehkan keputusan tersebut. Bahkan Pimpinan KPK menyebut keputusan DPR itu hanya berguna sebagai bahan informasi.

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Kamis malam 4 Maret 2010, selain terasa sangat melecehkan Keputusan Rapat Paripurna DPR tentang hasil akhir Pansus Hak Angket Bank Century tersebut juga terasa menyiratkan ajakan untuk melecehkannya. Pidato itu disampaikan dengan bahasa yang terkesan halus dan sopan tetapi sesungguhnya secara substantif sangat kasar, menolak dan melecehkan. Bahkan terasa cenderung mengajak melecehkan lantaran dipidatokan kepada rakyat setelah DPR menetapkan keputusan. Berbeda jika hal itu dipidatokan sebelum keputusan diambil.

Kalau kita cermati, Presiden SBY adalah seorang tokoh yang selalu mengatur penampilan sopan dan mengucapkan kata supaya berdemokrasi dengan santun beretika, kendati pada waktu bersamaan kata halusnya sesungguhnya terasa mencerca dan menohok orang lain. Diakui atau tidak, tampaknya sifat seperti ini juga menular kepada beberapa politikus Partai Demokrat. Mereka sering kali menyerukan supaya menegakkan sopan santun, walaupun niatnya untuk mengembangkan citra buruk bagi orang lain.

Semula, publik tidak terlalu merasakan hal ini sebagai sebuah taktik seolah-olah. Tetapi, setelah terlalu sering, tampaknya publik telah menjadi lebih cermat dan tidak mau lagi tertipu dengan silat lidah ucapan halus, penampilan dan tebar pesona. Seperti terekam dari sikap warga dan puluhan pemulung dalam "Nonton Bareng Pidato SBY, Penonton Teriak Bohong!" *(Kompas.com, Kamis, 4 Maret 2010 | 21:27 WIB).*

Pidato Presiden SBY itu memang, seperti biasanya, dibaca dengan susunan sistematis, bahasanya halus bersayap. Presiden SBY menyatakan sangat menghormati proses politik yang telah berjalan di DPR, namun secara substantif membantah, mementahkan dan menafikan temuan fakta dan bukti pelanggaran dalam kasus kebijakan *bail out* Bank Century oleh Pansus DPR yang telah diputuskan (Opsi C, menyatakan kebijakan salah dan berbau korupsi) dalam Rapat Paripurna DPR, 3 Maret 2010.

DPR, antara lain menyatakan bahwa patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana. Disebut pula nama-nama yang yang harus bertanggung jawab atas berbagai penyimpangan itu antara lain Boediono dan Sri Mulyani.

Namun, dalam Pidato SBY, semua temuan fakta dan rekomendasi DPR itu dimentahkan dan dinafikan. Bahkan, ke depan, kata Presiden SBY, kita harus menghentikan praktik-praktik buruk yang penuh prasangka jahat demikian. Menurut Presiden, modal sosial melemah apabila kita hidup dengan dasar saling mencurigai apalagi saling memfitnah.

Sebab menurut Presiden, semua langkah kebijakan terkait dengan Bank Century dilakukan dengan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia, diputuskan dengan cepat dan tepat, tanpa sedikitpun mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Apalagi dengan tanpa sungkan, Presiden membandingkan pengalaman penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dengan penanganan krisis ekonomi global tahun 2008. Tampaknya, Presiden SBY mengira rakyat tidak tahu membandingkan krisis ekonomi 1997/1998 dengan krisis keuangan global 2008.

Ibarat gempa bumi, episentrum krisis ekonomi tahun 1997/1998 berada di Indonesia dan beberapa negara ASEAN sendiri. Sedangkan episentrum krisis keuangan global 2008 berada jauh di Amerika Serikat sana. Pada tahun 1997/1998 terjadi krisis kepercayaan ekonomi dan politik yang episentrumnya di Indonesia sendiri. Jauh berbeda dengan krisis keuangan global 2008, Indonesia tidak mengalami krisis kepercayaan, baik di bidang ekonomi maupun bidang politik. Bahkan, berdasarkan berbagai jajak pendapat, tingkat kepercayaan publik kepada Presiden SBY ketika itu berada di puncak.

Itulah sebabnya, kita memandang pembandingan krisis ekonomi 1997/1998 dengan krisis keuangan 2008, sebagai landasan pembenaran pengambilan kebijakan pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century pada 2008, sangat tidak patut dikemukakan oleh pemimpin yang berkarakter kuat dan berniat baik. Salah satu ciri pemimpin berkarakter kuat adalah berani mengambil risiko dengan perhitungan yang tangkas.

Apalagi bila hal itu dikemukakan untuk menggiring rakyat agar menganggap DPR dengan keputusannya yang menyatakan bahwa kebijakan pemberian FPJP dan PMS Bank Century itu salah dan dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi, adalah sebagai fitnah. Jika hal inilah niatan yang terkandung dalam pidato Presiden tersebut, sungguh sangat buruk terhadap proses perkembangan demokrasi dan penegakan hukum di negeri ini.

Benar, seperti kata Ketua Umum Partai Golkar dalam pidato yang mengapresiasi kerja keras Pansus DPR Angket Bank Century, sehari setelah Pidato Presiden bahwa DPR adalah rumah

ilustrasi: sonny p

rakyat. Secara konstitusional, DPR adalah representasi perwakilan rakyat. Mereka adalah wakil-wakil rakyat dalam keberagamannya yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. DPR adalah penyalur suara rakyat. Melalui DPR (wakil rakyat), rakyat melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dalam konteks demokrasi, keputusan DPR adalah keputusan rakyat.

Maka, sangat lucu dan tidak mendidik dalam proses demokrasi, bila Presiden tidak merasa bahwa keputusan DPR itu adalah keputusan rakyat. Apalagi melalui tayangan langsung televisi, rakyat menyaksikan proses penyelidikan yang dilakukan DPR melalui Pansus Angket Bank Century selama tiga bulan, sampai pada proses pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR (3 Maret 2010) yang akhirnya memilih Opsi C menyatakan kebijakan FPJP dan PMS Bank Century salah.

Melalui voting terbuka, diambil keputusan. Sebanyak 212 suara, mewakili (representasi) suara rakyat yang terwakilkan dalam Fraksi Partai Demokrat 148 suara, PAN 39 suara dan PKB 25 suara, memilih Opsi A, kebijakan tidak salah). Dan, sebanyak 325 suara, mewakili (representasi) suara rakyat yang terwakilkan dalam Fraksi Partai Golkar 104 suara, PDIP 90 suara, PKS 56 suara, PPP 32 suara, PKB 1 suara, Gerindra 25 suara dan Hanura 17 suara, memilih Opsi C (kebijakan salah dan berbau korupsi).

Keputusan tersebut merupakan vonis politik dari DPR yang memang bertugas, kompeten dan berwenang mewakili rakyat secara politik. Keputusan itu adalah sah secara demokratis, kendati ada 212 suara yang memilih Opsi A. Dalam demokrasi, jika keputusan telah diambil secara demokratis, hasil keputusan itu adalah keputusan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama, termasuk bagi pihak yang pada awalnya tidak sepaham dengan opsi yang menjadi hasil akhir keputusan tersebut.

Kesadaran seperti inilah yang seharusnya dikembangkan setiap orang yang taat pada asas demokrasi. Pengingkaran akan hal ini, baik oleh para anggota DPR sendiri maupun pihak eksekutif (Presiden) jelas pasti tidak akan dilakukan seorang yang mengaku sebagai demokrat. Jika ada orang yang mengaku demokrat, tetapi justru mengingkari hal tersebut, dia pastilah bukan orang yang jujur. Kendati dia berpidato berapi-api mengatakan menghargai proses demokrasi itu, tetapi justru menolak dan melecehkan keputusan yang demokratis itu, pastilah dia seorang manusia yang bertipe seolah-olah.

Sama halnya, jika seorang demokrat melecehkan keputusan rakyat yang memilih langsung Presiden. Kendati, perhitungan KPU, sebanyak 39,2 persen rakyat pemilih tidak memilih Presiden SBY yang dipilih 60,8 persen rakyat pemilih dalam Pemilu Presiden 2009, semua rakyat harus mengakui dan menghormatinya sebagai Presiden RI.

Walaupun, sebaiknya SBY dan Boediono jangan merasa bahwa Presiden dan Wapres adalah lebih berhak menyatakan diri sebagai representasi suara (mewakili) rakyat daripada DPR. Dalam ketatanegaraan yang kita anut, rakyat memilih Presiden untuk menjadi pemimpin pemerintahan (eksekutif) dan Kepala Negara, bukan sebagai wakil rakyat. Apalagi, sejatinya yang memilih SBY-Boediono hanya 32,63 persen dari total suara rakyat yang seyogyanya berhak memilih yakni hanya 73.874.562 dari 226.407.944 (DPT + KTP 177.195.786 + Golput 49.212.158) rakyat yang berhak memilih. Dalam hal ini pula beberapa elemen masyarakat yang bersuara di jalanan, di luar parlemen, perlu mendapat perhatian, baik oleh Presiden maupun DPR.

Maka sangat bijak, jika Presiden SBY janganlah sering mencoba cenderung lebih berhak mengatasnamakan rakyat dari DPR, atau bahkan dari "parlemen jalanan' sekalipun. Presiden adalah pilihan langsung rakyat adalah betul, tetapi DPR-lah yang berfungsi dan berhak sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini, Presiden harus menghormati DPR sebagai wakil rakyat untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan demi kesejahteraan rakyat. DPR pun harus menghormati Presiden pilihan rakyat secara demokratis. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sejajar.

Namun, jika Presiden melakukan penyimpangan dalam menjalankan kekuasaan eksekutifnya, DPR yang mewakili rakyat harus mengawasinya. Karena memang, itulah salah satu fungsinya. Dan, Presiden seharusnya menghormatinya, bukan malah melecehkannya, apalagi dengan kecenderungan lebih merasa mewakili suara rakyat atau mengumbar suara Presiden sebagai representasi suara rakyat. Jadi, rakyat jangan terkecoh atas nada ajakan untuk melecehkan keputusan DPR. ■

Syaykh Al-Zaytun, Pemi

Syaykh Al-Zaytun berdiri menyambut rombongan HKBP Tebet sekaligus memperkenalkan eksponen Al-Zaytun yang mendampinginya

Setelah rombongan HKBP Tebet berkeliling meninjau berbagai fasilitas infrastruktur serta sistem tata kelola pembelajaran, ekonomi dan lingkungan hidup di Al-Zaytun, kekaguman tertinggi akhirnya termuarakan kepada Syaykh AS Panji Gumilang yang diapresiasi sebagai pemimpin yang telah dipilih Tuhan.

Ketika acara temu ramah antara rombongan HKBP Tebet dengan Syaykh Al-Zaytun yang didampingi Umi Farida Al-Widad Panji Gumilang beserta para eksponen Al-Zaytun di Wisma Al-Islah, rombongan HKBP Tebet yang dipimpin Pendeta Paresman Hutahaean dan didampingi mantan guru Bahasa Ibrani di Al-Zaytun Pendeta Dr. SM. Siahaan, menyampaikan langsung apresiasi tersebut kepada Syaykh Panji Gumilang.

Dalam kesempatan memperkenalkan anggota rombongan sekaligus mengucapkan kesan dan terimakasih, Pendeta Very Siregar mengemukakan keyakinannya bahwa Syaykh Al-Zaytun adalah pemimpin yang telah dipilih Tuhan.

Pendeta Very mengaku sangat terkesan dan mengagumi budaya toleransi dan perdamaian yang dibangun dan dikembangkan di Al-Zaytun. Sebab menurutnya, pada kenyataannya toleransi di Indonesia sebenarnya masih sangat sulit atau semu sekarang ini. Tapi di Al-Zaytun bisa konkrit terlaksana dengan baik. Antara lain terbukti dari keterbukaan Al-Zaytun menerima rombongan HKBP Tebet.

Setelah berkeliling melihat berbagai fasilitas, sistem dan metode pengajaran terutama perihal manajemen di bawah kepemimpinan Syaykh Panji Gumilang, maka Pendeta Very menyampaikan kesannya, Syaykh adalah seorang pemimpin yang telah dipilih Tuhan.

"Ini kesan teologis. Karena Bapak pemimpin di sini, saya punya kesan bahwa Bapak adalah pemimpin yang dipilih Tuhan," ujarnya. Pendeta Very menjelaskan, ada pemimpin yang dipilih Tuhan dan ada pemimpin yang dibiarkan Tuhan terpilih. Menurutnya, kalau pemimpin yang dipilih Tuhan, itu pasti berjalan dengan lancar dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Tapi kalau pemimpin yang dibiarkan Tuhan terpilih, akan banyak masalah, karena

foto-foto: dok berindo

mpin yang Dipilih Tuhan

Reportase Kunjungan HKBP Tebet ke Al-Zaytun (2)

Rombongan HKBP Tebet terkesan melihat dan mendapat penjelasan mengenai misi pendidikan di Kampus Al-Zaytun

dia hanya dibiarkan Tuhan terpilih. Tapi kalau pemimpin yang dipilih Tuhan, bagaimanapun hebatnya persoalan, dia bisa melaluinya, karena dia dipilih Tuhan. "Kami ucapkan selamat kepada Bapak, karena Bapak dipilih Tuhan. Itu penglihatan teologis kami," lanjut Pendeta Very.

Mengenai toleransi, Pendeta Very menyebut toleransi di Indonesia masih sangat sulit, karena untuk mendapatkan izin pendirian gereja di negeri ini misalnya, masih begitu sulit. Bahkan lebih sulit dari mendapatkan izin mendirikan tempat hiburan dan panti pijat. Karena itu, dalam kesempatan itu, dia pun meminta agar hal itu bisa sebagai bahan masukan buat Syaykh.

Lebih lanjut, menurutnya, toleransi pada umumnya sulit untuk dilaksanakan karena tidak terjadi dialog. Tapi di Al-Zaytun, dialog itu tidak hanya didialogkan tetapi diimplementasikan dalam kehidupan keseharian antara lain dengan keterbukaannya menerima dengan penuh persaudaraan dan persahabatan orang yang berbeda agama.

Menambah kesan dan pesan yang diucapkan di hadapan Syaykh, Pendeta Very Siregar kepada *Berita Indonesia* juga mengatakan Al-Zaytun itu sangat luar biasa, amazing grace. Menurutnya, visi Al-Zaytun sebagai Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Peradamaian, itu tidak hanya slogan lagi, tapi sudah betul-betul dibuktikan. Dia berharap, toleransi yang sudah dilihat dan dirasakannya selama di kampus Al-Zaytun itu kiranya terus berjalan di kemudian hari.

Ditanya dalam hal apa saja toleransi dan perdamaian itu paling terasa dibuktikan di Al-Zaytun. Menurut Very, yang pertama adalah ketika santri menyanyi dalam bahasa Ibrani. Kedua, ketika di masjid, baik melalui kalimat-kalimat indah yang dipajang di pintu masuk, maupun ketika pendeta diminta berdoa di tengah masjid.

Mengenai pendidikan di Al-Zaytun, Very juga mengaku salut, karena pendidikan yang sudah sesuai dengan kurikulum dari Depdiknas itu ditambah lagi dengan beberapa muatan lokal. Mereka juga terbuka pada bahasa Inggris, bahkan bahasa Ibrani. "Sebelumnya, saya pikir kalau pesantren itu khusus bahasa Arab. Ini terhadap bahasa lain juga terbuka. Artinya, mereka terbuka pada masukan dari luar. Itu yang saya pahami," katanya.

Ke depan, dia berharap perdamaian di negeri ini semakin terwujud. Khusus jemaat HKBP Tebet dan Al-Zaytun, hubungan keduanya diharapkannya semakin erat. Sama seperti Pendeta Hutahaean, Very juga berjanji akan mengkhotbahkan pertemuan itu dalam kebaktian minggu, kebaktian keluarga, kebaktian daerah atau wyik setiap kategorial. "Harus kita tanamkan sikap toleransi, terbuka dan damai," ujarnya.

Kampus Kemakmuran

Perihal pengelolaan pondok pesantren modern (kampus) Al-Zaytun, Pendeta Very mengaku melihat semuanya diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tambah. Sesuatu, yang menurutnya, justru tidak terdapat di banyak tempat di negara ini. "Pengelolaan seperti ini yang kurang dari bangsa kita," katanya. Dia memberi contoh tentang pengelolaan air di Al-Zaytun. Dari sistem pengelolaan air tersebut, Pendeta Very mengaku, dalam pikirannya langsung timbul keyakinan bahwa di kampus ini ada kemakmuran.

Dalam kesempatan yang sama, Sukartini Sri Rahayu mengaku sungguh terkesan pada Syaykh, bahkan sebelum berkunjung ke Al-Zaytun. Sebab istri seorang Kombes kepolisian bermarga Marpaung, ini mengaku bahwa sebelumnya, persisnya pada Hari Natal 2009 lalu, dia mendapatkan kartu Natal dari Al-Zaytun dengan lengkap menyebutkan nama dan alamatnya.

Ketika itu, putri Jawa yang dinobatkan jadi Boru Matondang ini mengaku sempat merasa heran bercampur terharu dan bahagia setelah melihat ternyata kartu itu dari sebuah pesantren. Karena sebelumnya, saudaranya sekalipun, justru banyak yang tidak mau mengucapkan Selamat Natal kepadanya. Sejak dari situlah, ada keinginan di hatinya untuk datang berkunjung ke Al-Zaytun.

Maka, ketika bertemu dengan Pendeta DR. SM Siahaan, yang dia tahu mengajar Bahasa Ibrani di Al-Zaytun, dia pun mengemukakan niatannya untuk berkunjung ke Al-Zaytun.

Pendeta Very berdiri memperkenalkan rombongan dari HKBP Tebet kepada Syaykh Al-Zaytun dan eksponen lainnya

Pendeta Very: Ini kesan theologis, Bapak (Syaykh Al-Zaytun) adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, yang berjalan dengan hikmat yang datang dari Tuhan.

Ternyata niatnya direspon Pendeta Siahaan dan Pendeta Paresman Hutahaean, Pendeta Very Siregar serta penatua dan anggota jemaat HKBP Tebet lainnya baik yang menerima kartu ucapan Selamat Natal dari Al-Zaytun maupun tidak. Dari situ, dia pun yakin bahwa pertemuan kali ini merupakan jalan Illahi, seperti yang juga diyakini oleh Syaykh al-Zaytun.

"Jadi, saya sangat salut, dan saya percaya Tuhan memberkati Syaykh. Terutama kita terus berdoa, untuk persatuan Indonesia, dengan toleransi beragama dan perdamaian," ujar Sri Rahayu. Dia pun mengutarakan Zabur 133 yang antara lain berbunyi bahwa, sungguh alangkah indahnya, bila kita bersama saudara hidup dengan rukun dan damai. "Di situ Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia. Dan kami percaya, itu akan terjadi seperti Bhinneka Tunggal Ika yang mana dicita-citakan oleh pendahulu kita dan juga mungkin oleh Patih Gajahmada. Walaupun berbeda tetap satu. Percaya bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil," kata Sukartini Sri Rahayu.

Dipertemukan Illahi

Sebelumnya, dalam sepatah kata sambutan, Syaykh Panji Gumilang, menyebut kunjungan HKBP Tebet, Rabu, 3 Februari 2009, ini merupakan rencana Illahi yang awalnya dilatarbelakangi oleh keinginan Syaykh untuk belajar bahasa Ibrani. Lalu dalam perjalanan waktu kemudian menemukan Pendeta DR SM Siahaan sebagai pengajar. Seorang pendeta di HKBP yang sebelumnya tentu telah mengenal para anggota rombongan HKBP Tebet tersebut.

Berkaitan dengan itu, menjawab pertanyaan seorang ibu anggota rombongan yang menanyakan alasan Syaykh berminat memelajari Bahasa Ibrani, Syaykh yang menjawabnya dengan gaya bercerita mengatakan, bahwa dari kecil dirinya diajarkan oleh orangtuanya yang fanatik Bahasa Arab. Syaykh menuturkan, sejak masih kecil sudah diajarkan nyanyi dalam bahasa Arab. Sesungguhnya nyanyian itu adalah sebuah keyakinan. Namun, ketika artinya ditanya kepada ibunya, ibunya selalu mengatakan tidak usah dulu tahu artinya, sebab nanti kalau sudah sekolah pasti tahu.

"Ibu bukan guru, memaksa kami supaya hafal. Sudah hafal, ya sekolah. Di sekolah itu, ada empat kitab dari Tuhan. Yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, dan keempat Quran. Harus diimani. Tambah lagi ada kitab-kitab. Ada lagi kutub-kutub, baik itu Musa maupun Ibrahim," ujar Syaykh.

Mendapatkan perintah itu, Syaykh mengaku sempat berpikir keras. Sebab, kitab itu katanya harus diimani, tapi bahasa taurat tidak mengerti. Kemudian belakangan ini, walaupun sudah merasa terlambat, Syaykh pun mengambil keputusan harus mengetahui Bahasa Taurat dan Zabur yang tertulis dalam Bahasa Ibrani. "Coba kalau bahasa Ibraninya bersamaan dengan Arab dulu. Mungkin bisa lebih Elo kami. Itu namanya mungkin kan? Prakteknya kan belakangan baru sadar. Tapi daripada

foto-foto: dok berindo

tidak sadar sama sekali, lebih baik sadar walaupun belakangan," jelas Syaykh al-Zaytun.

Jadi intinya, mengapa Syaykh berminat belajar Bahasa Ibrani, karena Syaykh merasa tidak tepat harus mengimani sebuah kitab tapi tidak tahu isinya. Sementara untuk mengetahui isinya, sudah pasti harus tahu bahasanya.

Dalam proses rencana belajar bahasa Ibrani itu, Syaykh pun mencari ahli atau guru Bahasa Ibrani di Indonesia. "Kami cari di kalangan muslim yang pandai Ibrani, satu pun di Indonesia tidak ada. Dulu saya punya kakek, seorang Kyai, bisa bahasa Ibrani. Saya telusuri, sampai dimana bisa bahasa Ibraninya. Ah, katanya saja. Belum pernah saya mendengar, katanya. Ya sudah, berarti nggak ada," kata Syaykh. Sampai akhirnya, atas perkenan Illahi, 'menemukan' Pendeta DR. SM Siahaan, mantan Sekjen HKBP dan mantan Rektor STT HKBP, pengajar Bahasa Ibrani.

Sementara itu, menyambut kedatangan rombongan HKBP itu serta membalas kesan, pesan dan ucapan terimakasih mereka, Syaykh dalam sambutannya mengatakan, alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa hari Rabu tanggal 3 Februari 2010 Al-Zaytun mencatat satu kejadian yang khusus dengan datangnya jemaat HKBP Tebet. "Tentunya, kami menyampaikan syukur kepada Allah. Dan terimakasih untuk bapak dan ibu atas kunjungan ini," katanya.

Syaykh mengatakan, dia dan semua civitas akademi Al-Zaytun yakin, bahwa pertemuan atau kunjungan rombongan HKBP itu ke Al-Zaytun merupakan keinginan yang digerakkan oleh Tuhan. "Tidak akan terjadi menurut iman kami, sesuatu keinginan baik, kalau tidak digerakkan oleh Tuhan. Karena kita semua memiliki keimanan yang semuanya kita serahkan pada Tuhan. Maka kebaikan ini disetir dan dibimbing oleh Tuhan. Dan kami yakin dan kita yakin, kebaikan yang dibimbing Tuhan itu positif juga adanya," ujarnya.

Selanjutnya, Syaykh sekilas memperkenalkan Al-Zaytun. Dijelaskan, Al-Zaytun mulai berdiri tahun 1999 dengan satu keinginan menciptakan sebuah sikap toleransi dan menjunjung tinggi perdamaian. Awalnya dalam mendidik. Kemudian, sikap itu dilanjutkan dalam kehidupan. "Sesulit apapun sesuatu, harus dimulai. Lingkungan yang besar seluas apapun, kita tidak usah khawatir," kata Syaykh. "Kita mulai dari lingkungan yang paling kecil. Sehingga imbas dari yang paling kecil ini, sudah pasti akan sampai menyusup kepada lingkungan yang lebih besar dari ini," lanjut Syaykh.

Pendeta DR. SM Siahaan (depan) bersama rombongan HKBP Tebet melihat pabrik pengolahan baja untuk keperluan internal Al-Zaytun

Untuk menciptakan itu, Syaykh mengatakan, dimulai dengan begitu berdiri, Al-Zaytun selalu saling terbuka dengan seluruh umat beriman. Bahkan, menurutnya, andai umat yang tidak punya iman-pun, Al-Zaytun ingin dekat supaya mau beriman. Jadi walhasil, Al-Zaytun ingin dekat dengan seluruh umat manusia agar dapat mengimani ajaran Ilahi. Apapun bentuk agamanya. Itulah menurut Syaykh yang pertama kali dilangkahkan Al-Zaytun sejak berdirinya.

Sedangkan mengenai surat-surat ucapan selamat, Syaykh mengatakan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1999 akhir. Kalaupun baru belakangan ini datang kepada HKBP Tebet setelah 10 tahun berdiri, menurut Syaykh, mungkin itu karena alamat baru sampai. "Kami selalu mencari mana yang bisa diberikan. Akhirnya, tercapailah alamat itu dan akhirnya sampailah kepada ibu dan bapak," kata Syaykh.

Tapi, menurut Syaykh, tidak usah dicari penyebabnya, yang penting sudah bisa berjumpa. Itu semua penyebabnya diatur oleh Allah. "Kita kadang-kadang merancang juga tidak bisa. Nah, ini sudah diatur semua oleh Tuhan. Terimakasih pada Tuhan. Dan terimakasih pada bapak/ibu dan semua," ujar Syaykh.

Syaykh mengatakan, kunjungan HKBP Tebet ini bagi Al-Zaytun punya makna yang besar. Kalau para pendeta tadi merasa ada gundah gulana terhadap persatuan ke-Indonesia-an ini, menurut Syaykh, sesungguhnya itu tidak dirasakan oleh sepihak saja. Banyak yang merasakan itu. Dan karena tumbuh rasa seperti itulah, kata Syaykh, maka Al-Zaytun ingin bersama-sama dengan yang lain untuk menciptakan, membuang gundah-gulana itu. "Maka perdamaianlah yang Al-Zaytun utamakan, karena perdamaian itu akan membuang gundah-gulana," kata Syaykh al-Zaytun.

"Kalau kita hanya berfokus kepada sikap negara, maupun pemerintah, ini semakin membuat kita tidak bisa berdialog. Maka sebagai bangsa yang punya hidup yang sama dalam undang-undang, baik UUD dan aturan lainnya, mari kita terobos kesulitan-kesulitan itu dengan dialog seperti ini. Memang ini kecil, jumlahnya tidak banyak. Tapi kalau terus kita ciptakan, ini seperti kata pepatah Jawa, kriwikan dadi grojogan. Jadi sikap kita yang kecil-kecil ini, mula-mula kriwikan, artinya tetesan air. Yang kemudian karena sumbernya banyak, jadi menggrujuk. Kami yakin, tentunya banyak yang menginginkan itu. Kami ingin mula-mula menetes. Menetes dulu, karena banyak, nanti akan jebol dan jadi grojogan," jelas Syaykh.

Syaykh mengatakan, adanya kekerasan dan sebagainya memang tidak bisa dihiraukan. "Tapi, itu proses menuju sesuatu yang indah. Maka, Al-Zaytun menyikapi itu dengan ajaran Ilahi. Mari kita tampil mengatasi semua

kekerasan dan sebagainya itu dengan cara yang terbaik. Kita berbuat kebaikan yang lebih baik dari yang sudah. Terus seperti itu," ajak Syaykh.

Dalam kesempatan itu, Syaykh juga mengatakan keinginannya membalas kunjungan HKBP itu dengan datang berkunjung ke HKBP Tebet. Keinginan itu pun langsung disambut senang oleh rombongan HKBP. "Permainan bola itu kalau sendiri saja, itu namanya tidak bermain. Jadi bermain bola ada yang menendang, ada yang jaga dan sebagainya," kata Syaykh menganalogikan. "Itu namanya, saling berbalas. Artinya tepuk itu tidak sebelah tangan," lanjut Syaykh.

Mari kita tampil mengatasi semua kekerasan dan sebagainya itu dengan cara yang terbaik. Kita berbuat kebaikan yang lebih baik dari yang sudah. Terus seperti itu.

Kemudian, setelah Syaykh memperkenalkan para eksponen yang bisa hadir pada saat itu yakni, Umi Farida al Widad, ustad Abdul Halim, Nazruddin Latief, Iskandar Syafullah, Mbah Furqon, Ruslan Noerdin Abbusabbit, Natsir Abdul Qoidir Suwaidi, Abdullah Al Hayi, Hilman Badar, Zaenal Arifin, dan Denny yang mengurusi bagian luar bandar, serta Ch. Robin Simanullang yang disebutkan juga merupakan keluarga besar Al-Zaytun yang bertugas di bagian media massa, memegang Majalah Berita Indonesia, Syaykh kemudian mengatakan, Al-Zaytun biarlah satu. Tapi misi Al-Zaytun, biarlah merata dimana-mana. Jadi visi dan misinya saja yang disebarkan.

"Jadi, bisa berdampingan Al-Zaytun dengan HKBP, tapi tanpa mendirikan bangunan. Itu yang bisa kami kehendaki, jadi bisa ketemu dengan Pak Hutahaean, Pak Siregar, ketemu Pak Hutabarat dan lain sebagainya tanpa ada fisik Al-Zaytun di sana. Tapi visi dan misi Al-Zaytun terus merayap-rayap dimana-mana. Sehingga kita semua menjadi makhluk Tuhan, hamba Tuhan, mengabdi untuk Tuhan, dan untuk kepentingan Tuhan. Selamat kita di dunia dan jaya pula kita di akhirat," kata Syaykh mengakhiri sambutannya.

Zaenal Arifin menjelaskan berbagai program pendidikan di Al-Zaytun kepada rombongan HKBP Tebet

Al-Zaytun, Kebenaran dengan Kasih

Sri Rahayu boru Matondang menambahkan apa yang diucapkannya di hadapan Syaykh itu kepada Berita Indonesia. Dia mengatakan, sangat kagum dengan Al-Zaytun. Seperti yang disebutkan Syaykh, penatua HKBP Tebet ini juga mengulangi ucapannya mengenai keyakinannya bahwa perjumpaan ini adalah dipertemukan Illahi. "Ya, saya percaya bahwa ini tidak kebetulan, karena di dalam kehidupan orang percaya tidak ada yang kebetulan, tapi Tuhan yang menghendakinya," kata Sri Rahayu. Paling tidak, katanya, kita mempunyai satu beban untuk mereka, mendoakan supaya niat suci mereka untuk toleransi dan perdamaian Indonesia itu terwujud. "Saya pribadi komitmen akan mendoakan terus di dalam doa syafaat keluarga," katanya.

Menurut keyakinannya, pada saatnya nanti, keturunan Ismail dan Ishak juga akan bersatu. Karena keduanya memang satu akar dari Abraham. Tentang harapannya pada perdamaian manusia di kemudian hari, dia mengatakan, harapannya adalah sama dengan keinginan Al-Zaytun yakni toleransi dan perdamaian itu dapat terwujud. "Kebetulan sebelum saya berangkat ke sini, saya membaca buku tentang keturunan Ismail, yaitu suku Kedar. Itu dinubuatkan bahwa mereka juga akan percaya," katanya.

Sementara itu, Ibu St. Kastina Simarmata boru Damanik berpendapat, ke-Islam-an Al-Zaytun lebih nasionalis dari yang lain. Membandingkan langsung dengan yang dirasakan sendiri, Al-Zaytun menurutnya lain dengan yang lain. Jika umat Islam yang lain merasa diri mereka berbeda sekali dengan Kristen, tapi di Al-Zaytun perasaannya dekat sekali. Buktinya menurutnya, ketika pendeta Very Siregar mengatakan Kristen yang minoritas, sedangkan Islam yang mayoritas, Syaykh langsung mengatakan jangan dikatakan begitu. "Dari situ, kita bisa tarik bahwa Syaykh itu menganggap tidak ada perbedaan, dan toleransinya tetap tinggi terhadap kita. Dan dia merasa antara dia dan kita tidak ada perbedaan," ujar Kastina.

"Dia kirim kartu Natal kepada Kristen. Kalau Muslim yang biasa saya lihat, salaman saja tidak mau. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu memang adalah Tuhan bersama. Makanya simbol-simbol mereka tadi dibikin di situ adalah untuk semua. Nah, di situ

foto-foto: dok berindo

Rombongan HKBP Tebet bertambah kagum melihat peralatan-peralatan modern seperti mesin cuci di Al-Zaytun

saya kagum sama Syaykh al-Zaytun. Dan saya rasa, memang betul bahwa beliau dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan menunjukkan bahwa di Indonesia ini walaupun banyak yang berbeda-beda, tapi masih ada manusia yang merasakan bahwa iman itu adalah satu di hadapan Tuhan untuk semua orang. Cuma orangnya saja atau oknumnya saja yang membikin dia berbeda satu sama lain, tapi pada hakekatnya, Tuhan di atas semuanya," tegasnya.

Ditanya bagaimana menurutnya cara umat Kristen untuk mendukung misi toleransi dan perdamaian yang diusung Al-Zaytun, sekaligus menjaga hubungan dengan mereka, Ibu Kastina berpendapat, umat Kristen perlu mendoakan supaya Tuhan lewat RohNya bekerja di Al-Zaytun supaya mereka tetap mengikat persatuan dengan umat Kristen dan sesama manusia. Juga agar Al-Zaytun tidak melenceng dari iman yang dikehendaki Tuhan, supaya mereka tetap mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian bersama umat beragama lainnya. Kemudian, HKBP bisa bikin beritanya di buletin internalnya Imanuel. Dan untuk yang sudah datang ke Al-Zaytun, menurutnya juga perlu menceritakan apa yang dirasakan di Al-Zaytun ini kepada teman-temannya di kalangan jemaat maupun di keluarga.

Sementara untuk menjaga hubungan antara HKBP Tebet dan Al-Zaytun, Kastina menyarankan agar keduanya terus menjaga silaturahmi dengan saling memberi ucapan selamat seperti yang sudah dimulai Al-Zaytun.

Mengenai pendidikan yang diterapkan di Al-Zaytun, Kastina juga memberi apresiasi yang cukup tinggi. "Luar biasa, semuanya lengkap. Betul-betul bagus. Sampai drainase itu tadi ada, peternakan, pertanian. Di kita Kristen juga tidak ada yang seperti ini. Sekolah pemerintah juga tidak ada yang seperti ini. Yang saya tahu, untuk perguruan tinggi di Indonesia, hanya ini (Al-Zaytun) satu-satunya yang betul-betul bisa dibawa ke luar negeri untuk membawa nama harum bangsa Indonesia,'' ujarnya.

Sementara itu, anggota rombongan lainnya, Ny. Nely Hutasoit boru Siregar, mengaku sangat tertarik pada semua yang dilihatnya di Al-Zaytun. Sampai kedisiplinan di jalan dan sebagainya. Menurutnya, itulah yang benar, yang dari kecil diajari disiplin, diajari kebenaran. Karena itu dia sangat setuju kepada Syaykh yang selalu mengatakan kebenaran dan kebenaran. "Kalau kita berani mengatakan kebenaran, kita pasti bisa menjalankan hidup ini," ujarnya berfilsafat. Ny. Nely Hutasoit boru Siregar menyimpulkan bahwa di Al-Zaytun, kebenaran itu dijalankan dengan kasih.

Selain itu, Ny. Nely juga menyoroti ketokohan Syaykh sebagai pemimpin Al-Zaytun. Menurutnya, Syaykh Al-Zaytun sangat sederhana, padahal biasanya kalau seorang Syaykh itu, kalau datang harus disambut, dan sebagainya. Menurutnya, Syaykh al-Zaytun itu seorang pemimpin yang patut diteladani. Seorang Syaykh yang bersahaja dan sangat menghargai perempuan.

Nely boru Siregar mengaku salut dengan kesederhanaan Syaykh yang hanya beristri satu. "Jadi memang masih ada Syaykh yang menghargai wanita," katanya. Dari itu semua, dia sepakat dengan yang dikatakan Pendeta Very Siregar, bahwa Syaykh al-Zaytun itu adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Berarti anugerah.

Tentang pengelolaan Al-Zaytun, Nely menyatakan rasa kagum. "Saya tanya, ini kok bisa mewah begini? Saya tanya juga sampai yang kecil-kecil. Potongan-potongan kayu juga semua mereka daur ulang. Dari mereka untuk mereka. Jadi di situlah kehebatan pemimpinnya. Di situlah kehebatan Syaykh-nya. Dia pemimpin dan jadi contoh," kata Nely.

Sama dengan apresiasi tersebut di atas, St O Hutabarat, Pita Uli Hutabarat boru Tobing dan Dahlia Silitonga boru Tobing juga mengatakan kekaguman mereka dengan toleransi dan sistem pendidikan yang dilakukan Al-Zaytun serta kepemimpinan Syaykh al-Zaytun.

■ **BI/MS-BHS**

Seluruh civitas akademi Al-Zaytun menyambut rombongan HKBP Tebet dengan terbuka dan bersahabat

Tiga orang pendeta, tiga orang penatua, dan tiga jemaat HKBP Tebet berdoa bersama di Masjid Rahmatan Lil Alamin Al-Zaytun, Indramayu untuk perdamaian manusia

Meretas Perdamaian Umat Beragama

Untuk kesekian kalinya, setelah pertemuan Al-Zaytun beberapa tahun silam dengan jemat GPIB Koinonia Jakarta Timur dan dengan jemaat Gereja Advent dari Bandung, Al-Zaytun dan HKBP Tebet kembali menerobos sekat-sekat yang memisahkan umat manusia akibat perbedaan agamanya, dengan kunjungan pendeta dan jemaat HKBP Tebet pada 3 Februari 2010 silam.

Pada hari itu, kedua kelompok berbeda agama ini bisa saling tatap muka dan bertegur sapa langsung dengan mesra, tatkala rombongan yang dipimpin Pendeta Paresman Hutahaean dari Gereja HKBP Tebet datang bersilaturahmi ke kampus Al-Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dilandasi kerinduan mewujudkan perdamaian, kedua belah pihak yang mungkin sebelumnya baru mengenal melalui berita dari mulut ke mulut itu, bertemu dengan akrab, mesra dan penuh damai. Tidak ada sekat di antara orang beriman. Begitu gambaran yang terlihat dalam pertemuan tersebut.

Sembilan orang rombongan HKBP Tebet yang terdiri dari tiga orang pendeta, tiga orang sintua (pelayan gereja) dan tiga orang anggota jemaat, itu disambut hangat penuh persaudaraan oleh civitas akademik Al-Zaytun.

Sejak ketibaan di Stasiun Kereta Api Haurgelis, Indramayu, kesembilan anggota rombongan yakni, Pendeta Paresman Hutahaean sebagai pendeta resort HKBP Tebet; Pendeta Tumbur Very Siregar, STh sebagai pendeta huria; Sintua O. Hutabarat; Sintua Kastina Simarmata boru Damanik; Sintua Rahayu

foto-foto: dok. berindo

Sukartini Marpaung boru Matondang; Ny. Nely Hutasoit boru Siregar; Ny. Dahlia Silitonga boru Tobing; Ny. Pita Uli Hutabarat boru Tobing, serta didampingi mantan guru Bahasa Ibrani Al-Zaytun Pendeta DR. SM. Siahaan, disambut Al-Zaytun dengan sangat mesra, dengan mengirimkan dua armada untuk menjemput rombongan.

Setibanya di kampus Al-Zaytun, rombongan kembali diperlakukan begitu istimewa. Setelah dilayani makan siang, dengan menyediakan angkutan, rombongan pun kemudian dipersilahkan untuk melihat dari dekat karya-karya yang telah dan akan diperbuat Al-Zaytun.

Dipandu oleh Abu Sabit, Abdullah Al Hayi, Zaenal Arifin, dan yang lainnya, rombongan pun melihat sebagian pembangunan di Al-Zaytun seperti gedung pembelajaran, gedung perkuliahan Universitas Al-Zaytun Indonesia, kantor administrasi pendidikan, laboratorium komputer, pabrikasi baja dan pabrikasi perlengkapan berbahan kayu, pabrik beras atau penggilingan padi, Masjid Rahmatan Lil Alamin, drainase dan Waduk Istisqo, dapur, serta laundry.

Ketika melihat salah satu gedung pembelajaran, rombongan dibawa masuk ke Gedung Usman, salah satu gedung yang termasuk pertama didirikan di antara gedung yang ada di Al-Zaytun. Saat melihat proses belajar di ruang kelas X BB 01, rombongan disambut santri dengan nyanyian lagu-lagu berbahasa Ibrani seperti Syalom khave'rim dan lainnya yang membuat hati para rombongan sangat tersentuh.

Selanjutnya, ketika berkunjung ke ruang kantor administrasi pendidikan, rombongan yang melihat dan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana kerapian dan kemutakhiran proses perencanaan hingga evaluasi pendidikan, juga pendataan peserta didik di Al-Zaytun ini, rombongan sangat terkagum-kagum. Di sini, rombongan, antara lain melihat bagaimana Al-Zaytun secara lengkap mengelola data, baik manual maupun digital, seluruh siswa yang kini berjumlah 7.718 orang atau berjumlah sekitar 13. 618 orang jika digabung dengan siswa pra sekolah serta mahasiswa.

Kekaguman rombongan makin bertambah ketika mengetahui bahwa siswa dan mahasiswa itu datang dari berbagai daerah di dalam negeri serta dari beberapa negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, Afrika Selatan dan Somalia.

Mengetahui bahwa pendidikan di Al-Zaytun adalah menerapkan kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional ditambah lagi dengan muatan-muatan lokal seperti pendidikan HAM, pendidikan jurnalistik dan kebahasaan, juga membuat rombongan merasa salut.

Pendataan pelajar yang begitu rapi, terintegrasi, dan sistematik di dalam database sebagaimana didemonstrasikan oleh Ustz. Ali Aminullah, juga cukup membuat rombongan merasa kagum karena Al-Zaytun ini telah menerapkan sistem database yang canggih untuk ukuran sekolah di Indonesia sekarang ini.

Rombongan HKBP Tebet di laboratorium komputer Universitas Al-Zaytun

Di gedung perkuliahan Universitas Al-Zaytun Indonesia di Gedung HM Soeharto, rombongan juga sangat kagum melihat visi dan misi yang diusung universitas itu sebagaimana dimuat dalam mars Universitas Al-Zaytun yang sengaja dipatri dengan jelas di sekeliling dinding loby masuk gedung tersebut. Kemudian ketika melihat ruang-ruang perkuliahan yang sengaja dinamai dari nama-nama malaikat, yang begitu bersih, rapi, sejuk dan nyaman, rombongan pun mengaku seperti tidak sedang di sebuah desa.

Selanjutnya, di ruang laboratorium komputer, rombongan kembali dibuat salut dan kagum karena pendidikan bersemangat pesantren tapi bersistem modern ini memiliki 150-an unit komputer yang khusus dipakai untuk mendidik para pelajar memperdalam ilmu teknologi informasi. Bertambah salut lagi, ketika rombongan mengetahui bahwa di bidang komputer ini, Al-Zaytun bekerjasama dengan perusahaan komputer ICDL dari Inggris sejak tahun 2003, dan dengan perusahaan ICCL sejak beberapa saat lalu.

Tak kalah dengan berbagai hal disebutkan di atas, ketika di lokasi pabrikasi baja, pabrikasi perlengkapan dari kayu dan pabrik beras, rombongan juga menyatakan kekaguman. Di pabrikasi baja misalnya, rombongan mengetahui bahwa segala keperluan kerangka baja di Al-Zaytun dirangkai sendiri oleh ahli teknik, tanpa harus mendatangkan ahli baja dari luar. Dan, ternyata bahan baja itu baja lebih bermutu untuk keperluan gedung di Al-Zaytun yang direncanakan bisa tahan hingga ratusan tahun.

Di lokasi pabrikasi perlengkapan berbahan kayu, rombongan juga sangat kagum setelah mengetahui bahwa segala perlengkapan Al-Zaytun yang berbahan kayu, seperti tempat tidur, kursi, meja komputer, dan lain sebagainya, semuanya dibuat sendiri. Sepanjang masih cukup, bahan kayunya juga diambil dari lahan sendiri ketika melakukan proses penjarangan. Bertambah salut lagi, potongan-potongan kayu jati kecil pun di Al-Zaytun ternyata tidak dianggap sebagai limbah, tapi semua dimanfaatkan untuk membuat berbagai pernik-pernik perhiasan.

Demikian halnya di pabrik beras atau penggilingan padi. Rombongan sangat kagum setelah mengetahui bahwa semua kebutuhan beras di Al-Zaytun yang setiap harinya menghabiskan kira-kira 4-5 ton itu dihasilkan dari sawah Al-Zaytun sendiri, juga dibersihkan di

pabrik beras atau gilingan padi Al-Zaytun sendiri yang bisa memproses tiga ton padi atau menghasilkan kira-kira 2,5 ton beras per jamnya.

Rombongan juga begitu kagum mengetahui bahwa di Al-Zaytun juga sedang digalakkan pemakaian beras untuk kesehatan yakni *brown rice*, baik dari jenis jasmin maupun basmati. Begitu kagumnya, sehingga Ny. Dahlia Silitonga boru Tobing bahkan langsung membeli di tempat itu beberapa kilo *brown rice* jenis jasmin.

Dari lokasi pabrikasi, rombongan yang kemudian meninjau Masjid Rahmatan Lil 'Alamin, langsung menunjukkan kekagumannya ketika melihat keagungan masjid, juga kalimat sambutan yang tertulis di pintu masuk yang menyebutkan bahwa masjid itu dibangun orang-orang beriman dan untuk orang-orang beriman. Sebagaimana makna nama masjid itu sendiri yakni rahmat untuk semesta alam. Bertambah salut dan hormat lagi, di tengah masjid yang memiliki luas areal 6 hektare lebih dan luas bangunan sekitar 999 m2, dengan bangunan enam lantai yang diperkirakan mampu menampung 150 ribu jemaah itu, pendeta Hutahaean sebagai pimpinan rombongan, dengan tulus diminta untuk mendoakan pembangunan masjid tersebut.

Masjid Rahmatan Lil Alamin dibangun oleh orang-orang beriman dan untuk orang-orang beriman.

Pembangunan masjid dengan arsitektur terpadu, yakni paduan dari berbagai gaya arsitektur dari dalam maupun luar negeri, itu sudah dimulai sejak tahun 2001 dan kini sedang dalam tahap *finishing*.

Seakan tak habis-habisnya memberi rasa kagum, kepada rombongan juga kemudian diperlihatkan dan dijelaskan bagaimana proses pemeliharaan dan pemanfaatan air (drainase) di lingkungan Al-Zaytun. Rombongan menyaksikan bahwa air di Al-Zaytun tidak pernah dibiarkan mengalir percuma kembali ke laut sebelum dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Air bekas mandi saja, misalnya, tidak langsung dibuang begitu saja. Tapi, melalui proses penyaringan untuk membuang bekas sabun dan kimia lainnya, air tersebut kemudian masih dipergunakan untuk pengairan sawah dan sebagainya. Caranya, air bekas mandi tersebut dialirkan melalui wadah penyaringan yang terbuat dari batu kerikil, pasir dan bahan lainnya, kemudian dari sana dialirkan lagi melalui anak kali yang sengaja ditanami enceng gondok sebagai proses penyaringan akhir, dan selanjutnya dengan menggunakan pompa dinaikkan ke Waduk Istisqo yang sengaja dibangun lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Dari waduk, air pun kemudian kembali dialirkan ke berbagai keperluan pertanian.

Di gedung yang berfungsi sebagai dapur untuk memasak kebutuhan tiga belas ribu hingga lima belas ribu orang penghuni Al-Zaytun setiap hari, rombongan kembali terkesima melihat berbagai peralatan masak berukuran raksasa. Demikian juga melihat tiga ruang pendingin raksasa yang mampu memuat berton-ton sayuran maupun bahan makanan lainnya sebelum dimasak.

Tidak jauh dari gedung dapur, rombongan meninjau ruang laundry pakaian. Bahwa untuk mencuci dan menyetrika pakaian di kampus ini, siswa dan mahasiswa tidak dibiarkan mengerjakan sendiri. Al-Zaytun telah menyediakan laundry yakni mesin cuci, pengering, dan setrika mesin modern yang mampu membersihkan, mengeringkan dan menyetrika pakaian secara otomatis.

Masih banyak hal mengagumkan lain yang bisa dilihat rombongan dari HKBP Tebet ini. Seperti laboratorium kultur jaringan, pertanian modern, maupun peternakan kelas internasional. Namun, mengingat waktu yang terbatas, mungkin hal tersebut bisa menjadi target kunjungan rombongan di lain waktu.

■ **BI/MS-BHS**

Rombongan HKBP Tebet menyaksikan pabrikasi beras, tempat diproduksinya kebutuhan beras di Al-Zaytun sebanyak 5 ton per hari

foto-foto: dok berindo

DR Wartanto

Lebih dari yang Dikabarkan

DR Wartanto: *Al-Zaytun diyakini mampu menjawab tantangan globalisasi*

Al-Zaytun di mata Direktur Pendidikan Khusus dan Kelembagaan Depdiknas, DR Wartanto, jauh lebih dari yang dikabarkan. Bukan hanya mengajarkan ilmu agama tapi juga pendidikan umum, bahkan membuka perguruan tinggi. Dia yakin ke depan Al-Zaytun akan menjadi lembaga pendidikan terdepan yang bisa menjawab tantangan dan bisa menjadi contoh bagi lembaga-lembaga pendidikan yang lain.

Tokoh lain yang memberi apresiasi yang cukup tinggi terhadap Al-Zaytun adalah Direktur Pendidikan Khusus dan Kelembagaan Depdiknas, DR Wartanto yang hadir mewakili Menteri Pendidikan Nasional dan Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal. Tidak jauh berbeda dengan Adi Sasono, DR Wartanto mengatakan, begitu masuk di areal Al-Zaytun, dia mengaku sangat kagum.

Dia mengaku sudah banyak pergi ke beberapa daerah, baik dalam maupun luar negeri, sudah banyak masuk ke ruang-ruang pendidikan, sudah banyak masuk ke tempat-tempat pendidikan non-formal maupun formal, baru di Al-Zaytun menemukan suatu bentuk proses pendidikan yang seperti lautan manusia. DR Wartanto mengaku sangat kagum melihat rimbunnya situasi, luasnya lahan, hebatnya bangunan, dan banyaknya peserta didik, para santriawan dan santriawati, juga dengan tema yang diusung dalam sebuah acara di Kampus Al-Zaytun, yakni berkaitan dengan globalisasi dan kearifan lokal.

Dengan kondisi seperti ini, dia yakin bahwa proses pendidikan di Al-Zaytun benar-benar bisa mengolah manusia. Bagaimana mengolah otak, mengolah hati, mengolah karsa, dan mengolah raga, menjadi orang-orang yang benar-benar sempurna, dan mampu menghadapi globalisasi. Dan menurutnya, inilah yang diharapkan oleh negara Indonesia.

Wartanto yakin Al-Zaytun bisa menjawab tantangan itu. Dia juga yakin ke depan Al-Zaytun akan menjadi lembaga pendidikan terdepan yang bisa menjawab tantangan dan bisa menjadi contoh bagi lembaga-lembaga pendidikan yang lain.

Kepada *Berita Indonesia*, Wartanto yang mengaku baru sekali itu melihat langsung Al-Zaytun, menilai Al-Zaytun luar biasa. Menurutnya, Al-Zaytun merupakan satu bentuk program yang sudah melebihi dari apa yang dikabarkan. Bukan hanya mengajarkan ilmu agama tapi juga pada pendidikan umum, bahkan membuka perguruan tinggi.

Dengan siswa dan mahasiswa lebih dari sembilan ribu orang dari dalam maupun luar negeri, menurutnya, juga sesuatu yang luar biasa dan merupakan suatu bentuk kepercayaan dari masyarakat sekaligus yang menandakan kualitas Al-Zaytun itu luar biasa. Melihat banyaknya orang yang datang pada acara itu, menurutnya, juga menandakan suatu kehebatan, suatu kualitas dari lembaga ini.

Ditanya soal apa yang bisa dikembangkan Kementerian Pendidikan Nasional dengan Al-Zaytun, khusus di bidang Pendidikan Khusus dan Kelembagaan, Wartanto mengatakan semuanya berkaitan dengan upaya membuat masyarakat terampil berwirausaha. Contohnya, bagaimana mencetak masyarakat sekitar Al-Zaytun supaya punya keterampilan dan berjiwa entrepreneur. Sehingga setelah dilatih, dia bisa memberdayakan potensi lingkungannya.

Menurutnya, segala macam instrumen pembelajarannya itu sudah disusun. "Nanti akan di-*launching* secara umum oleh Pak Menteri atau Pak Dirjen, program kewirausahaan bagi masyarakat. Jadi, supaya lahan-lahan pertanian kita tidak terbengkalai tapi dikelola oleh tenaga-tenaga ahli yang sudah dilatih," katanya.

Kreativitas dan Sumber Inovasi

Mendukung apa yang telah dilakukan oleh Al-Zaytun selama ini, Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal dalam sambutan tertulisnya yang diberi

DR Wartanto (pakai batik, tengah) bersama Adi Sasono dan tokoh lainnya dalam sebuah acara di kampus Al-Zaytun.

Dengan kondisi seperti ini, dia yakin bahwa proses pendidikan di Al-Zaytun benar-benar bisa mengolah manusia. Bagaimana mengolah otak, mengolah hati, mengolah karsa, dan mengolah raga, menjadi orang-orang yang benar-benar sempurna, dan mampu menghadapi globalisasi.

judul 'Pondok Pesantren Sebagai Sumber Kreativitas dan Sumber Inovasi Pendidikan Nonformal dan Informal', sebagaimana dibacakan Wartanto juga menyebut, selama ini sejumlah program pendidikan nonformal dan informal dalam bentuk program pemberantasan buta aksara, program kesetaraan, program keterampilan, atau kecakapan hidup, sudah banyak dilaksanakan di berbagai pondok pesantren.

Kemitraan itu diharapkan dapat terus dilanjutkan dengan lebih baik. Sebab, masih banyak penduduk kita yang masih buta aksara, drop out dari sekolah pendidikan. Dan, banyak pula masyarakat kita yang tidak memiliki keterampilan pendidikan.

Dirjen menyebutkan, hingga saat ini pondok pesantren masih tetap menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang jenius dan khas Indonesia. Masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada pondok pesantren, serta bagi lembaga pendidikan yang memberikan bekal hidup secara lahir maupun bathin bagi generasi masa depan.

Perjalanan waktu dan dinamika perkembangan masyarakat, mampu dijawab oleh pesantren melalui proses modernisasi dan transformasi organisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional pengelolaan pendidikan pesantren.

Kemampuan transformasi pesantren inilah yang mampu membuat pesantren, tetap berdiri tegap menjawab dan melayani kebutuhan masyarakat belajar di tengah gempuran pendidikan atau pendirian lembaga pendidikan bertaraf internasional. Semua pihak pendidikan patut memberikan apresiasi pada pendiri dan penurut sistem pendidikan pesantren.

Secara sosial, pesantren sebagai subkultur masyarakat Indonesia. Oleh karena pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran luas dalam memberdayakan masyarakat. Bahkan pesantren menjadi alat perjuangan dan pertahanan sekaligus menjadi pusat penyiaran dakwah Islam.

Secara tradisional, pesantren lebih menjadikan kita menekuni berbagai bidang ilmu agama, seperti tasayuf dan akidah sebagai kurikulum utama pembelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, pesantren melakukan modernisasi dengan memberikan tambahan pelajaran umum, seperti sejarah, matematika, ilmu sosial, serta ilmu pengetahuan alam, teknologi informasi dan lain sebagainya.

foto-foto: dok berindo

Dengan demikian eksistensi pesantren menjadi istimewa, bahkan menjadi pendidikan alternatif, penyeimbang dari pendidikan yang dikembangkan oleh kaum kolonial barat, yang biasanya bisa dinikmati oleh segelintir manusia saja.

Pesantren menjadi tempat sandaran masyarakat, yang dengan berbagai alasan teknis dan non teknis, tidak dapat mengakses pendidikan formal, yang dipersepsikan sebagai model pendidikan sekuler.

Pada saat ini pesantren telah menaklukkan modernisasi sistem pendidikan. Sehingga mampu mensejajarkan diri dengan pengelolaan pendidikan umum dengan sistem persekolahan atau schoolbase. Pesantren telah berani membuka sekolah umum, selain madrasah, bahkan perguruan tinggi umum. Dan keadaan pesantren ini, sebagaimana penyelenggaraan pendidikan lainnya di Indonesia, sama-sama berkembang.

Oleh karena itu, pesantren merupakan akses yang luar biasa secara historis maupun kultural. Dalam perkembangannya pendidikan Islam, mampu sebagai pendidikan nasional secara keseluruhan. Dan di masa yang akan datang diharapkan akan semakin lebih berkembang lagi.

Kedekatan dan ketaqwaan seorang kiai, - tuan guru, atau sebutan lainnya dari pimpinan pesantren menjadikan pesantren tidak hanya lembaga pendidikan yang formal maupun non formal. Tapi pendidikan di pesantren juga menjadi rujukan masyarakat sekitarnya.

Secara formal, pesantren menyelenggarakan model sekolah. Sedangkan dalam bentuk pendidikan non formal, diselenggarakan pula program-program pemberdayaan masyarakat atau community development. Serta layanan informal dalam bentuk aktivitas keteladanan para guru atau uztad. Serta lingkungan pesantren sebagai sebuah subkultur yang diikat oleh nilai-nilai edukatif kepesantrenan yang Islami.

Dengan demikian pesantren merupakan salah satu model lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat atau community basic education sebagai pusat kegiatan pembelajaran masyarakat.

Banyaknya peserta didik di Al-Zaytun, juga membuktikan kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi kepada pendidik di Al-Zaytun

Keberhasilan dan pengalaman terbaik pesantren, hendaknya menjadi pelajaran kita bersama dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Transformasi dari pendidikan tradisional menjadi modern dan tetap diterima oleh masyarakat harus menjadi pencermatan kita semua sebagai suatu pendidikan, baik pada pasaran kebijakan maupun teknis operasional. Tentunya pakai energi yang luar biasa, yang dimiliki oleh pesantren sehingga tetap bertahan secara luar biasa sampai saat ini.

Nilai keikhlasan dan lebih mementingkan ummat atau masyarakat sebagai motivasi dan etos kerja, akan memompa semangat untuk melanjutkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam pengelolaan pendidikan di pesantren. Motivasi dan etos kerja seperti ini, akan kurang kuat di pengelolaan pendidikan umum, tapi ini terjadi pada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia.

Nilai pragmatisme dan materialisme justru sudah mulai menjalar dalam penyelenggaraan pendidikan di luar pesantren. Sehingga isu-isu materialisme pendidikan yang sering ditujukan masyarakat kepada lembaga pendidikan luar pesantren, belakangan ini semakin menjadi luar biasa.

Kalau pendidik dan pengelola pendidikan memiliki nilai-nilai perjuangan dan profesionalisme dalam mengajar, itu akan melahirkan manusia-manusia unggul dalam rangka membangun bangsa dan peradaban manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal, pesantren dapat menjadi mitra strategis dan dapat menjangkau masyarakat di daerah yang sulit sekali pun.

Selama ini sejumlah program pendidikan nonformal dan informal dalam bentuk program pemberantasan buta aksara, program kesetaraan, program keterampilan, atau kecakapan hidup, sudah banyak dilaksanakan di berbagai pondok pesantren. Kemitraan ini diharapkan dapat terus dilanjutkan dengan lebih baik atau tambah baik karena masih banyak penduduk kita yang masih buta aksara, drop out dari sekolah pendidikan, dan banyak dari masyarakat kita yang tidak memiliki keterampilan pendidikan.

Demikian uraian kata sambutan dari Dirjen. Sambutan tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada semua dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi seluruh anggota masyarakat. ■ **BI/MS-BHS**

Gubernur Lemhannas Prof. DR. Muladi, SH

Makelar Kasus itu Sangat Buruk

Muladi, SH

Indonesia kini mengembangkan demokrasi konsensus. Sebuah demokrasi yang universal tetapi didukung oleh budaya bangsa. Sekarang sudah dalam tahap konsolidasi, diperbaiki sambil berjalan. Bukan transisi lagi. Sejalan dengan itu, Indonesia kini juga tengah memasuki proses penegakan supremasi hukum. Maka, makelar kasus itu suatu hal yang sangat buruk.

Hal itu disarikan dari pernyataan Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Muladi, SH, dalam wawancara khusus dengan *Berita Indonesia*, di ruang kerjanya, Kantor Lemhanas Jl. Medan Merdeka Selatan No.10 Jakarta Pusat, Selasa 23 Maret 2010.

Mantan Menteri Kehakiman (Hukum dan HAM) dan Menteri Sekretaris Negara itu menyebut empat pilar penegakan supremasi hukum. *Satu*, aparat negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, memberi contoh. *Kedua*, keberadaan suatu sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Ketiga*, jalan masuk untuk memperoleh keadilan harus terbuka luas bagi rakyat yang menjadi korban atau menjadi tersangka. *Keempat*, hukum itu harus ditegakkan secara adil, ekual, sama rata dan pasti.

Menurutnya, makelar kasus itu salah satu hal yang sangat buruk. Dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan, mantan Rektor Universitas Diponegoro itu menegaskan, tidak perlu ada markus, pengacara yang perlu ada. "Tapi pengacara juga banyak yang terlibat markus," keluh guru besar hukum Undip itu.

Jadi, menurutnya, pengacara itu harus profesional. "Selama masih ada makelar-makelar, berarti masih belum profesional. Broker atau makelar itu suatu yang negatif. Berarti tidak profesional dan diskriminatif. Sehingga yang tidak pakai broker dikalahkan, yang pakai broker, itu menang. Itu kan orang mengejar kemenangan, bukan mengejar keadilan," tegasnya.

Selengkapnya, berikut petikan wawancara Wartawan *Berita Indonesia* Ch. Robin Simanullang, Syahbudin Hamzah dan Marjuka Situmorang dengan Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Muladi, SH:

Bagaimana pandangan Anda mengenai perkembangan politik atau kemajuan bangsa dari sisi ketahanan nasional dengan kondisi kebangsaan kita yang sekarang setelah lebih sepuluh tahun masa reformasi?

Kita sekarang mengembangkan ide-ide demokrasi di sini (Lemhannas). Jadi urusan Lemhannas itu harus menjadi *drive the process of democratization*, penggerak proses demokratisasi. Kita pernah mengalami demokrasi liberal, tahun 1955, multi partai. Kemudian Bung Karno mulai mengembangkan demokrasi terpimpin dengan alasan untuk membangun karakter bangsa, *Nation and Character Building*.

Kemudian Pak Harto mengembangkan demokrasi terpimpin karena alasan ekonomi. Jadi alasannya berbeda dengan Bung Karno. Kalau Bung Karno politik, Suharto ekonomi. Kita tidak bisa menyalahkan kenapa mereka semi diktator. Karena zaman memang seperti itu, zaman yang masih morat-marit. Zaman Pak Harto, saya anggota kabinet juga.

Kemudian, Pak Habibie mulai tahun 1998, kita mengembangkan proses demokrasi. Sekarang kita kembangkan proses demokratisasi yang luar biasa. Jadi proses demokratisasi yang kita kembangkan itu adalah yang disebut demokrasi konsen-

foto-foto: dok.berindo

Pemred Berita Indonesia (tengah) saat mewawancarai Gubernur Lemhannas, Prof. DR. Muladi, SH di ruang kerjanya, Kantor Lemhannas.

sus. Demokrasi yang universal tetapi didukung oleh budaya bangsa, yang sekarang dalam tahap konsolidasi. Jadi bukan transisi lagi. Kalau transisi, kita membenarkan, menyimpangkan. Sekarang tahap konsolidasi, diperbaiki tetapi sambil berjalan.

Dalam hal ini, ada yang paling penting, yaitu pentingnya penghormatan pada konstitusi. Di konstitusi itu, ada ideologi, jiwa nasional. Ideologi dan sistem *checks and balances* itu ditata dengan lebih baik. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah semangat untuk membangun *good governance*. Pemerintahan yang akuntabel, transparan dan responsif. Seperti memberantas korupsi dalam rangkaian reformasi birokrasi.

Yang ketiga adalah supremasi hukum. Sejauh ini masih belum memuaskan. Tapi kita sudah berada dalam jalur yang benar. Di situ ada unsur kekuasaan kehakiman yang merdeka. Artinya, pengadilan itu harus dibebaskan dari pengaruh apa pun juga. Itu dalam proses terus. Lalu, otonomi daerah. Otonomi daerah itu tidak bisa mundur, harus maju terus dengan perbaikan-perbaikan. Karena jiwa masyarakat yang pluralistik ini, tidak bisa lagi pemerintah yang terpusat seperti zaman Suharto. Tapi harus dibagi kewenangannya. Sekarang sudah ada daerah yang maju. Maju dengan perbaikan-perbaikan kelemahan. Ada otonomi khusus. Seperti Aceh dan Papua, lebih khusus lagi.

Kemudian, kebebasan massa media yang luar biasa. Yang kita benahi, otomatis kita minta ada rasa tanggung jawab. Ini tidak bisa mundur, kebebasan media baik cetak, online maupun elektronik harus jalan terus sebagai alat kontrol sosial.

Kemudian, pembangunan hukum yang demokratis. Sekarang membangun hukum itu melalui DPR, itu harus, katakanlah, aspiratif. Aspiratif itu, termasuk mendengarkan aspirasi pemerintah, pakar dan aspirasi internasional. Itu sekarang yang terjadi.

Kemudian yang selanjutnya adalah pembangunan masyarakat madani. Ada *self civil society* yang perkembangannya amat pesat. Jadi kalau kita bicara masyarakat demokrasi itu, pilarnya ada tiga. Yakni, aktor negara, aktor swasta, dan *civil society*. Tiga pilar itu ada dalam kehidupan berdemokrasi.

Kemudian *protection of human rights*, perlindungan hak asasi manusia, berkembang. Masuk di konstitusi, di salah satu bab.

Kemudian kontrol sipil terhadap militer. Sekarang militer pun dikontrol oleh DPR. Pemisahan TNI-Polri. Dan TNI pun tidak bebas lagi seperti dulu, negara sudah mencabut. Dan juga perkembangan-perkembangan lain.

Tapi yang saya sebut tadi sebagai akar dasar dari demokrasi. Jadi *basic roots of democracy*. Nah, di sini kita kembangkan itu. Kita kembangkan, bahwa *roots of democracy* itu harus menjadi penggerak demokrasi. Termasuk melakukan konsolidasi.

Anda melihat perkembangan demokrasi di Indonesia, apa sudah *on the right track*?

Sudah.

Kemudian mengenai penegakan hukum secara independen yang tidak di bawah kooptasi politik dan kekuasaan. Bagaimana pendapat Anda?

Jadi penegakan supremasi hukum itu intinya ada empat. Satu, aparat negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, memberi contoh. Kedua, keberadaan suatu sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hanya kepada Tuhan dia bertanggung jawab. Dan profesionalisme. Tidak boleh didikte oleh siapa pun juga. Tidak ada politisasi. Dan ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi penting posisinya.

Ketiga, jalan masuk untuk memperoleh keadilan harus terbuka luas bagi rakyat yang menjadi korban atau menjadi tersangka, atau katakanlah yang bermasalah. Dia tidak boleh dihambat dan harus selalu didampingi pengacara untuk mencari keadilan yang benar.

Keempat adalah hukum itu harus ditegakkan secara adil, ekual, sama rata dan pasti. Empat pilar itu untuk penegakan supremasi hukum. Itu dalam proses.

Dan di sini, kalau kita bicara demokrasi, strukturnya sudah bagus. Substansi undang-undangnya sudah bagus. Tapi, kulturnya, budaya demokrasi ini tergantung dari kualitas SDM. Ini dalam proses. Mendidik supaya SDM itu memahami betul yang namanya proses demokratisasi di Indonesia. Mungkin butuh satu generasi atau butuh sepuluh tahun. Tapi proses kita itu benar. Maka saya katakan konsolidasi demokrasi. Pemantapan demokrasi. Itu akan terjadi. Kelakuan yang kekanak-kanakan, kelakuan yang aneh-aneh itu harus diubah. Tapi, Amerika saja menjadi sampai seperti sekarang hampir dua ratus tahun.

Sementara, Singapura itu diktator, Malaysia juga diktator. Kita sangat demokratis. Negara demokrasi ketiga terbesar di dunia adalah Indonesia, setelah Amerika dan India. Itu luar biasa.

Mengenai kriteria negara hukum. Seperti Anda sebutkan, kita masih dalam proses. Kalau dihitung tingkat implementasinya dari idealnya itu tadi?

Nah, di sinilah pentingnya kontrol dari masyarakat melalui LSM, masyarakat madani. Jadi sekarang ini, orang tidak bisa berbuat seenaknya sendiri. Semua dikontrol. Ada *checks and balances* dalam masyarakat, terutama dari masyarakat madani. Jadi masyarakat madani ini kita bangun, kita bina, kita tumbuhkan seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Walhi dan sebagainya. Itu penting sekali. Sehingga orang tidak berani main-main lagi. Ada kontrol masyarakat langsung melalui organisasi-organisasi yang profesional.

Terus, kebebasan informasi publik, itu ada undang-undangnya. Tidak bisa seenaknya sendiri.

Semua budjet dikeluarkan oleh DPR. DPR-nya memang memerlukan partai

politik. Sekarang kan boleh dikatakan fungsinya besar sekali. Mau jadi bupati, walikota, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, memerlukan partai. Tapi fungsi partai politik bukan hanya memilih kepemimpinan, tapi juga sebagai perekat persatuan dan pendidikan politik.

Nah, itu yang belum disentuh oleh partai politik. Pendidikan politik dan juga perekat persatuan, penyerap aspirasi rakyat. Akibat tidak puas pada partai politik, sekarang aktor-aktor demokrasi yang lain muncul. LSM-LSM, perguruan tinggi, itu menjadi penyeimbang dari partai politik. Apalagi terlibat korupsi orang-orang DPR-nya. Sekarang peranan perguruan tingi dan lembaga swadaya masyarakat besar sekali dan sangat bebas.

Kembali mengenai penegakan hukum. Bagaimana Anda melihat perihal aparat penegak hukum, terutama jaksa dan polisi, juga KPK?

Kalau KPK kan dibentuk dalam kondisi yang ad hoc. Kalau polisi dan kejaksaan itu ada di konstitusi. KPK itu Undang-Undang. Suatu saat bisa dibubarkan nanti. Jadi kebutuhan yang sesaat, karena rakyat tidak percaya pada polisi dan jaksa. Ini sementara. Nanti kalau dua lembaga ini sudah besar, sudah bagus, ya tidak tertutup kemungkinan KPK distop. Tapi terus juga nggak apa-apa. Tapi dasarnya undang-undang.

Jadi yang penting itu semangatnya kan? Semangatnya itu harus ada keterpaduan antarmereka. Tidak bersaing, tapi saling mengisi. Kalau kita bicara sistem hukum itu, di struktur, adanya kelembagaan yang terlibat. Kedua, substansi undang-undang yang mendasari sistem. Dan budaya hukum.

Independensi dari lembaga kehakiman. Perlukah kejaksaan juga menjadi lembaga yang independen?

Independensi itu aturan internasional. Kekuasaan kehakiman yang merdeka itu standar internasional. Seluruh dunia itu. PBB yang menentukan. Dan itu salah satu indikator apakah suatu negara itu demokratis atau tidak. Kemudian diperluas, bukan hanya kekusaan kehakiman yang merdeka, tetapi independensi sistem peradilan pidana. Termasuk polisi, jaksa dan sebagainya. Tapi sulit sekali, karena jaksa dan polisi kan di bawah presiden. Tapi mestinya bersikap profesional juga. Walau tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh politik karena dia eksekutif.

Yang harus dimajukan di Indonesia itu bukan hanya proses peradilan. Tapi yang namanya ADR, *Alternative Dispute Resolution* atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Arbirtrasi itu juga harus maju. Pengadilan itu kan pada akhirnya menciptakan konflik baru. Yang menang

MULADI: *Sekarang korupsi dianggap lebih merajalela karena menyebar di seluruh daerah. Kemudian, eksekutif, legislatif, judikatif kena semua.*

senang, yang kalah sedih. Tapi kalau ADR, mediasi, rekonsiliasi, kemudian yang namanya arbirtrasi itu *win-win solution*. Berunding, mediasi diawasi oleh suatu arbiter. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi bersama-sama. Jadi dua-duanya harus berkembang bersama. Kecuali pidana. Kalau pidana kan nggak bisa.

Sekarang sudah sejauh mana perkembangan arbirtrasi itu?

Sudah, sekarang maju sekalian. Arbirtrasi kan internasional.

Di dalam negeri?

Di dalam negeri ada Badan Arbirtrasi Nasional. Dan itu ada undang-undangnya. Didasarkan pada undang-undang setelah reformasi. Undang-undang arbirtrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. UU No.8 tahun 1998. Maju bersama-sama. Yang tidak suka ke pengadilan, panjang, mahal, perdata bisa lima sampai tujuh tahun. Tapi kalau ADR bisa langsung. Jadi kalau perkara perdata, itu lebih baik melalui ADR ini. Kalau pidana, bisa tapi perkara yang kecil-kecil. Disebut *restoratif justice*, pengadilan restoratif. Itu di negara hukum dua-duanya harus maju bersama-sama.

Tadi Anda kemukakan keberadaan KPK bersifat ad hoc, dan polisi dan kejaksaan sebenarnya harus diperkuat. Kalau pengamatan Anda, sekarang perkembangan kemajuan kepolisian dan kejaksaan itu bagaimana?

Kalau kita melihat, kalau korupsi ya, korupsi kita itu masih sangat memalukan. Kita baru saja menerima julukan koruptor terbesar di Asia Pasifik. Nomor satu Indonesia. Dari internasional, dari nilai 10, kita baru 2,8. Jadi selama ini belum di atas 5. Jadi kita masih butuh KPK. Kalau Malaysia dan Singapura sudah nilai 5 atau 6. Di Malaysia pun masih dibutuhkan. Jadi, jika nilainya masih di bawah 6, saya kira KPK masih dibutuhkan.

Sekarang korupsi dianggap lebih merajalela karena menyebar di seluruh daerah. Kemudian, eksekutif, legislatif, judikatif kena semua.

Kalau kejaksaan dan kepolisian?

Semuanya. Tidak hanya tergantung mereka kan? Tergatung masyarakat juga, tukang suapnya. Pengusaha-pengusaha itu gimana? Korupsi itu produk dari masyarakat.

Bagaimana Anda melihat penanganan makelar kasus?

Iya. Itu salah satu hal yang sangat buruk. Dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan, tidak perlu ada markus. Pengacara yang perlu ada. Tapi pengacara juga banyak yang terlibat markus. Jadi pengacara itu harus profesional. Selama masih ada makelar-makelar gitu, berarti masih belum. Broker itu suatu yang negatif. Berarti tidak profesional dan diskriminatif. Yang tidak pakai broker dia dikalahkan, yang pakai broker, itu menang. Itu kan orang mengejar kemenangan, bukan mengejar keadilan.

Kembali ke masalah demokrasi, dimana kita sudah masuk tahap konsolidasi. Partai politik sebagai sebuah pilar yang sangat penting di dalamnya. Dalam pengamatan An-

foto: dok.berindo

Kontrol sipil sangat diperlukan dalam menciptakan kehidupan berdemokrasi yang sehat.

da, sejauh mana perkembangan partai politik dalam mengkonsolidasikan diri, yang memungkinkan untuk melangkah ke kedewasaan politik?

Sekarang kan instrospeksi. Partai politik itu 2014 nanti terjadi regenerasi total. Seperti generasi saya, sudah, jadi penasehat sajalah. Seperti PDI-P mengumandangkan, 70% pengurus, generasi muda. Golkar juga demikian. S1, S2, S3 Golkar sudah 67%. Kita harapkan anak-anak muda ini tidak larut dalam konsep pragmatislah ya. Sekarang, politik itu transaksional. Kamu dapat apa, saya dapat apa. Tidak berpikir sesuatu yang lebih besar. Jadi budaya transaksional dan pragmatis itu diubah menjadi budaya transformasional.

Undang-undang partai politik menyatakan, partai politik itu harus yang disebut sebagai programatis, menghormati HAM dan budaya politik yang bisa dihormati. Dan yang penting lagi, dia menjadi perekat persatuan, penyerap aspirasi rakyat, pendidikan politik, dan rekrutmen kepemimpinan. Semuanya harus ditangani oleh partai politik.

Masalah pertahanan. Bagaimana pertahanan dan ketahanan nasional dilihat dari rongrongan negara lain atau kekuatan asing?

Iya. Jadi singkatnya begini. Pada waktu sebelum perang dingin selesai tahun 90-an, masih ada Pakta Warsawa dan NATO. Rusia masih ada Uni Soviet-nya. Itu yang terjadi adalah bahaya antar-negara. Ada bahaya nuklir, negara satu mengancam negara lain. Diharapkan satu perdamaian jangka panjang karena tidak ada yang mendahului setelah perang dunia kedua.

Kemudian Soviet runtuh. China juga mengalami reformasi. Diharapkan akan terjadi perdamaian di dunia. Akan tetapi muncul bahaya baru. Bukan bahaya tradisional seperti itu atau asimetrik. Muncul bahaya nontradisional yang membahayakan keamanan manusia dalam bentuk yang disebut sebagai bencana alam. Bencana alam bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena manusia. Karena merusak lingkungan hidup. Karena global warming, CO2, karena masalah penyakit menular. Itu yang pertama. Itu yang dibahayakan bukan negara, tapi manusia. Sangat berbahaya.

Yang kedua adalah yang disebut bahaya globalisasi. Yang tidak imbang, negara berkembang yang tidak kuat SDM-nya menjadi pasar saja, sehingga terjadi ketidakadilan global, jumlah kemiskinan bertambah.

Yang ketiga, yang paling berat yaitu bahaya sosial politik yaitu bahaya radikalisme dan terorisme. Itu yang diancam bukan negara, tapi kelompok manusia. Meletakkan bom dimana-mana tanpa seleksi. Dan bahkan sekarang, terjadi percampuran antara bahaya tradisional dan nontradisional, yaitu terorisme tapi targetnya kepala negara.

Jadi itu yang sekarang bahaya. Kalau militer itu tugasnya mempertahankan dari luar. Bahaya dari luar itu, batas teritorial, kemerdekaan politik, kemudian kedaulatan. Polisi, dalam negeri, pengayoman, penegakan hukum. Tapi ada yang namanya operasi militer selain perang, seperti terorisme. Itu, polisi harus tangani dua-duanya. Karena itu sifatnya transnasional.

Dan globalisasi itu bukan antarnegara. Radikalisme itu bukan antarnegara. Al Qaeda, kemudian Thailand Selatan, Moro dan Indonesia. Jadi bahaya itu memang bisa dipisahkan. Dari luar, tentara. Ke dalam, polisi, keamanan. Di luar pertahanan, itulah keamanan. Tapi di tengah-tengah itu ada yang namanya operasi militer selain perang. Ya bencana alam, dan juga masalah terorisme, masalah kejahatan transnasional yang sudah terorganisasi, traficking dan narkotika.

Kembai ke masalah nasional. Pada awal reformasi, kita khawatir Indonesia itu pecah. Dan sekarang kita sudah masuk dalam konsolidasi demokrasi. Tapi masih memungkinkan nggak negara ini terpecah belah. Keadaannya seperti apa?

Nah, justru itu pertanyaan Lemhannas. Negara Indonesia itu dibangun bukan karena ikatan primordial, bukan karena suku, agama, ras, golongan, bahasa, atau karena dinasti. Tapi dibangun karena sobat muda, kemudian gerakan kemerdekaan. Sobat muda itu, suku agama ras supaya kumpul dan berniat mendirikan negara kesatuan ini. Jadi sifat Indonesia itu sangat rentan. Maka waktu itu Bung Karno menekankan adanya Pancasila, semangat konstitusi di dalam pembukaan, bhinneka tunggal ika. Selama kita masih setia pada empat itu, Indonesia tidak akan pecah.

Waktu reformasi, diramal oleh Barat, tidak ada negara miskin akan demokrasi. Tetapi ternyata tetap. Jadi yang diajar di Lemhanas ini adalah di samping teori kepemimpinan, juga kesetiaan pada masalah empat tadi. Empat jati diri bangsa.

Legislatif ini sekarang kan dari produk partai politik, dari segi SDM-nya seharusnya alumni Lemhannaslah ya, tapi .....?

Iya. Ini ada penataran DPRD seluruh Indonesia sudah 22 angkatan. Walikota bupati juga ada sekarang di sini (Lemhannas). Walikota, bupati dan tokoh-tokoh nasional. Sekarang ada tiga kursus di sini. Walikota/bupati, kursus reguler, dan anggota DPRD seIndonesia. Sudah 22 angkatan. Kita berusaha, tapi tidak cukup waktunya. Otomatis mereka yang sudah lulus ini, di daerah menyebarkan ide itu.

Gimana soal Pancasila sekarang ini. Sepertinya sudah hampir dilupakan?

Justru itu yang harus kita kembangkan. Taufik Kiemas baru ada statement, MPR akan mengumandangkan Pancasila, UUD45, Negara Kesatuan. Itu kata-kata dua hari yang lalu. Itu bagus. Setiap pejabat harus sadar bahwa itu merupakan batas-batas pembenaran perbuatan.

■ BI

foto: repro

Menkumham Patrialis Akbar meninjau sejumlah LP Anak

Grasi Demi Kemanusiaan

Di tengah upaya penegakan hukum di Indonesia, pemerintah memberikan grasi kepada narapidana anak-anak, lansia, dan cacat permanen. Kebijakan ini diharapkan tidak menjadi bumerang.

Pertengahan Februari 2010 lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengusulkan sebuah terobosan baru di bidang hukum di negeri ini. Dia mengusulkan pemberian grasi kepada narapidana (napi) anak-anak, napi yang sudah lanjut usia (lansia), dan napi yang menderita cacat permanen. Grasi adalah hak yang diberikan konstitusi kepada presiden untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan kepada narapidana.

Menkumham sudah mengajukan grasi bagi 519 narapidana anak-anak, 10 orang lanjut usia, dan dua orang cacat permanen kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Patrialis, permohonan kali ini merupakan tahap pertama. Dalam dua-tiga bulan ke depan juga akan ada tahap berikutnya. Para napi tersebut tersebar di lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia.

Menurut Patrialis, Kemenkumham menemukan sejumlah kasus dimana anak-anak tidak diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Contohnya, ada seorang anak berusia 12 tahun yang divonis lima tahun penjara karena mencuri telepon genggam.

"Grasi ini memenuhi kualifikasi. Narapidana yang diajukan grasinya tidak terlibat kejahatan luar biasa, seperti korupsi, narkotika, dan terorisme. Mereka juga sudah menjalani separuh masa tahanannya. Kami berharap MA dapat memberikan pertimbangan hukumnya," ujarnya.

Selain anak-anak, seperti disebutkan di atas, napi lain yang diusulkan mendapat grasi adalah napi lansia dan penderita cacat permanen. Terkait dua jenis napi ini, pertimbangannya didasarkan pada nilai kemanusiaan. Para napi yang sudah lansia itu menurut Patrialis sebaiknya tidak hidup di dalam penjara lagi. "Ada tahanan yang tangannya sudah seperti mayat. Kita upayakan untuk diampuni. Mereka sudah dibina di lapas," kata Patrialis. Napi yang sakit permanen juga menurut Patrialis layak diampuni meskipun usianya masih muda.

Khusus anak-anak, jika grasi dikabulkan, para napi anak itu menurut Patrialis, tidak akan dilepas begitu saja. Tapi, mereka akan diserahkan ke Kementerian Sosial untuk diberdayakan agar dapat menghasilkan sesuatu yang produktif.

Dalam pelaksanaan program ini, Kemenkumham akan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya, seperti Sekretariat Negara, Mahkamah Agung (MA), dan Kementerian sosial. Koordinasi dengan MA misalnya perlu karena pemberian grasi oleh presiden harus atas pertimbangan MA. Sementara itu, di internal Kemenkumham, Patrialis juga meminta semua pimpinan perwakilan Kemenkumham di daerah segera menyusun konsep dan laporan.

Untuk tahap awal, grasi telah diberikan bagi 40-an orang lebih napi anak-anak, 10 orang lansia, dan dua orang cacat permanen. Patrialis mengatakan, 40-an orang anak itu adalah napi yang mendapat hukuman di atas dua tahun dan masuk dalam kategori anak atau berusia di bawah 18 tahun.

Dalam pemberian grasi ini, Patrialis mengaku instansinya harus hati-hati agar tidak malah menimbulkan masalah baru. Contoh kehati-hatian dimaksud antara lain, Kemenkumham tidak mengusulkan grasi bagi narapidana kasus kesusilaan dan pembunuhan. Karena, kejahatan kesusilaan dan pembunuhan menurutnya adalah tindak pidana yang berdampak besar bagi para korban. Sehingga, jika grasi diberikan bagi napi kasus tersebut, dikhawatirkan akan melukai rasa keadilan korban.

Di samping ketentuan-ketentuan di atas, dalam pemberian pengampunan terhadap napi itu, pemerintah memprioritaskan napi yang melakukan tindak pidana karena faktor mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Ide pemberian grasi ini awalnya muncul setelah Menkumham Patrialis Akbar melakukan peninjauan ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (LP). Melihat kondisi sebagian napi yang cukup memprihatinkan, timbullah niat Menkumham untuk mengusulkan pemberian fasilitas keringanan hukum melalui grasi tersebut. Di samping itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan di LP.

Memperhatikan niat suci program ini, apa yang direncanakan dan dilakukan Menkumham Patrialis Akbar dan Presiden SBY ini patut untuk didukung. Namun mengingat pengalaman di masa dulu, dimana banyak program yang niatan awalnya baik, tapi karena disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk keuntungan pribadi, akhirnya sering menjadi rusak.

Belajar dari situ, pelaksanaan program pemberian grasi ini pun kiranya perlu mendapat pengawasan yang baik, sebab jika tidak diawasi, tidak tertutup kemungkinan program ini akan menjadi kesempatan bagi petugas lembaga pemasyarakatan atau Kemenkumham meminta pungli dari napi, yang akhirnya akan memberatkan napi sendiri. ■ **MS**

foto: koranjakarta

KPK Sepeninggal Tumpak

Tumpak Hatorangan Panggabean

Masyarakat khususnya aktivis anti korupsi merasa lega setelah Tumpak Hatorangan Panggabean keluar dari KPK.

Polemik sekitar keberadaan Tumpak Hatorangan Panggabean di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berakhir setelah pelaksana tugas sementara Ketua KPK itu resmi keluar dari KPK. Masyarakat khususnya aktivis anti korupsi dan sebagian besar fraksi di DPR kini sedikit merasa lega, walaupun kepemimpinan KPK kini hanya tinggal empat orang.

Disebut lega karena independensi mantan jaksa itu diragukan publik selama ini sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi keputusan KPK. Dalam pandangan publik, Tumpak dianggap sebagai representasi pemerintah mengingat latar belakang masuknya dia kembali ke KPK, juga melihat kedekatannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Seperti kita ketahui, Tumpak bersama Mas Achmad Santosa dan Waluyo menjabat sebagai pelaksana tugas sementara pimpinan KPK berdasarkan Perppu nomor 4 tahun 2009 yang diterbitkan Presiden SBY pada 21 September 2009. Pengangkatan ketiganya dilakukan untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK setelah ketua KPK Antasari Azhar dinonaktifkan dan diberhentikan akibat tersangkut kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Sementara Bibit dan Chandra dinonaktifkan karena jadi tersangka kasus dugaan menerima suap dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 27 Tahun 2009, Tumpak diangkat menjadi pelaksana tugas Ketua KPK. Setelah kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sudah selesai dan bisa kembali aktif di KPK, Mas Achmad Santosa dan Waluyo keluar dari KPK. Sedangkan Tumpak masih tetap dipertahankan.

Sedangkan soal independesi Tumpak yang diragukan, seperti disaksikan selama ini, dia dengan tanpa risih sedikit pun kerap menunjukkan "kepatuhannya" kepada Presiden SBY. Contohnya, masih segar dalam ingatan ketika dia hadir dalam pertemuan antara Presiden SBY dengan menteri dan gubernur di Cipanas, Bogor, Februari lalu. Padahal publik tahu, sebenarnya tidak ada urgensi dia untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Kedua, dia juga memperlihatkan "kepatuhannya" ketika KPK, lembaga yang dipimpinnya, datang ke Istana Negara awal Maret 2010 lalu untuk menerima laporan harta kekayaan Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan alasan itulah maka keberadaannya di KPK selama kurang lebih enam bulan terakhir dianggap bagai "duri dalam KPK" sebab independensi KPK sangat diperlukan untuk menyelidiki berbagai kasus, apalagi kasus bailout Bank Century yang melibatkan aparat pemerintahan SBY.

Dalam perkembangannya, Perppu No.4/2009 yang menjadi dasar pengangkatan Tumpak, kemudian ditolak oleh DPR. Dengan dasar itu, berbagai pihak mendorong Tumpak untuk keluar dari KPK. "Berkaitan dengan ditolaknya Perppu tersebut, kami meminta kepada Bapak Tumpak Hatorangan Panggabean untuk mengundurkan diri," demikian misalnya dikatakan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Menanggapi penolakan DPR atas Perppu tersebut, Presiden kemudian mengeluarkan Keppres tentang pemberhentian Tumpak. Setelah menerima surat Keppres tersebut, Senin (22/3), Tumpak pun resmi meninggalkan KPK. Menanggapi pemberhentian itu, Tumpak mengakui bahwa dia memang sudah demisioner sejak Perppu No.4/2009 ditolak DPR. Kerena itu, sejak penolakan itu, dia mengaku sudah tidak menandatangani atau membuat keputusan penting lagi di KPK.

Mengenai kinerja Tumpak sendiri selama enam bulan itu, pengamat hukum dari Unkris, Suyanto Londrang sebagaimana dilansir *Rakyat Merdeka* pertengahan Maret 2010 lalu mengatakan, selama kepemimpinan Tumpak, KPK mengalami kemunduran. Indikasinya, penanganan kasus-kasus kakap terkesan lambat.

Kini sepeninggal Tumpak, sebelum ada kepastian apakah kekosongan itu akan segera diisi dengan mengadakan seleksi baru, keempat pimpinan KPK yang ada harus berembuk untuk menunjuk secara bergantian siapa pelaksana harian Ketua KPK dalam periode tertentu.

Dari luar KPK, beberapa pihak telah menyampaikan usulan. Menhukam Patrialis Akbar misalnya, mengaku sudah menyiapkan dua nama untuk diajukan menjadi pimpinan KPK. "DPR pilih satu dari dua nama yang kami ajukan," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR Romy Romahurmuzzy mengajukan empat kriteria calon ketua KPK. Pertama, jujur dan bersih. Kedua, mempunyai kemampuan yang mumpuni di bidang hukum. Ketiga, mempunyai kapasitas kenegarawanan. Keempat, punya keberanian menolak intervensi dari pihak manapun.

KPK memang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat sekarang ini. Hal itu tidak lepas dari masih pentingnya KPK di negeri ini. Sebab, seperti dikatakan Gubernur Lemhannas Prof. Dr. Muladi, SH kepada *Berita Indonesia* 23 Maret lalu, sejauh ini korupsi di Indonesia masih memalukan.

Jadi sepanjang kepolisian dan kejaksaan masih belum bisa diandalkan untuk memberantas korupsi, walau pembentukan KPK bersifat ad hoc, yakni tidak bersifat permanen, keberadaannya masih sangat diperlukan. Karena itu, semua elemen masyarakat harus terus mendukung komisi ini. ■ **SIT**

foto: vivanews.com

Menyiasati ACFTA

Industri sepatu nasional mulai meresahkan dampak ACFTA

Dengan segala konsekuensinya, ACFTA sudah diberlakukan dan tidak mungkin dibatalkan lagi. Untuk menyokong perusahaan lokal, diperlukan kebijakan yang mengurangi biaya produksi.

Baru tiga bulan sejak 1 Januari 2010 ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China diberlakukan, perubahan sudah banyak terlihat di pasar Indonesia. Barang-barang dari Cina dan negara-negara ASEAN lainnya sudah membanjiri pasar lokal.

Menurut perkiraan Menneg Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, dampak dari ACFTA baru akan terasa pertengahan tahun 2010 ini. Namun, melihat perubahan di pasar sekarang, sebagian pelaku usaha dalam negeri yang merasa khawatir sudah menginginkan negoisasi untuk memodifikasi kembali kesepakatan ACFTA. Negosiasi antara lain bermaksud, kemungkinan mengundurkan diri dari ACFTA atau penundaan pelaksanaannya.

Mengenai keinginan melakukan negosiasi ini, Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukannya. Namun untuk pilihan menarik diri dari perjanjian, sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Karena di samping susah, sebagian kalangan menilai bahwa hal itu justru akan kontra-produktif terhadap sektor perdagangan dan industri nasional.

Pengamat ekonomi A Prasetyantoko misalnya, dalam seminar nasional bertema; "Peningkatan Daya Saing dan Kesiapan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Menghadapi ACFTA" di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta (17/3/2010) mengatakan, kesepakatan yang sudah dirajut bersama tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika dibatalkan sepihak, itu justru akan berisiko pada para pengusaha nasional sendiri, dimana produk Indonesia akan semakin tidak kompetitif jika dipasarkan di kawasan ASEAN dan China.

Sementara mengenai pembicaraan ulang modifikasi 228 pos tarif dari 1.696 pos yang sudah disepakati sebelumnya, sebanyak 150 pos tarif produk impor akan menjadi kompensasinya. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (Dirjen KPI) Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami dalam diskusi bertema; "ACFTA Madu atau Racun bagi Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan DPP Taruna Merah Putih di Jakarta, Minggu (14/3/2010) mengatakan, proses renegosiasi masih berjalan dengan fokus pada pos tarif yang diminta pengusaha.

Mengenai usulan penundaan kesepakatan juga tergolong sulit dilakukan. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, ada tiga alasan mengapa penundaan sulit dilakukan. Pertama, Indonesia sudah menandatangani Perjanjian Perdagangan Barang bersama negara-negara ASEAN yang tergabung dalam Kawasan Perdagangan Bebas AFTA. Sehingga, dalam perjanjian ACFTA, Indonesia bukan dalam kapasitas sebagai sebuah negara, tetapi atas dasar bagian dari AFTA. Sehingga dalam rangka upaya melakukan penundaan perjanjian ACFTA, Indonesia harus bisa mengajak negara-negara ASEAN lainnya agar satu suara. Sulitnya lagi, dalam melakukan hal ini harus melibatkan seluruh negara-negara anggota yang terlibat perjanjian.

Jika Indonesia berkeras membatalkan perjanjian, sementara China tidak menyetujuinya, ini bisa berujung pada sengketa yang akan menguras waktu dan energi. Sebaliknya, jika China setuju tetapi negara-negara ASEAN lain tidak setuju, juga akan tetap sulit.

Jadi, pilihan yang realistis menurut Hikmahanto Juwana adalah, Indonesia harus dapat memanfaatkan ACFTA untuk membangkitkan berbagai sektor strategis, sekaligus harus memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang tersedia untuk melindungi industri dalam negeri.

Dari penjelasan di atas, maka jika ada pun perjanjian yang sudah disepakati padahal oleh sebagian pihak dianggap merugikan pengusaha lokal, apa boleh buat, 'Nasi sudah menjadi bubur'. Guna mengantisipasi dampak yang lebih buruk ke depan, tidak ada jalan lain kecuali membenahi berbagai hal di dalam negeri agar biaya produk ditekan serendah mungkin.

Dalam perjanjian ACFTA ini, pemerintah diharapkan mengambil langkah yang benar-benar tepat. Sehingga, kalaupun tidak bisa dimanfaatkan untuk menggairahkan industri lokal, tapi paling tidak pengusaha lokal, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor-sektor yang kena dampak perjanjian ACFTA ini dapat bertahan.

Untuk itu, dukungan terutama dalam hal modal pada pengusaha lokal ini perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, perbankan misalnya dapat lebih berperan dengan memberikan pembiayaan dengan bunga rendah. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan dan terminal juga hendaknya semakin dipercepat. Juga mempermudah pengurusan perizinan, serta memperluas pemasaran produk UMKM di dalam dan di luar negeri. Dengan demikian, produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk luar, dan kerugian yang lebih besar pun kemudian bisa dicegah. ■ SIT

foto: vivanews.com

Solusi yang Dinamis

Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ), satu-satunya alat transportasi massal yang mampu mengangkut 450 hingga 500 ribu orang penumpang per hari, perannya makin dominan sebagai alternatif mengatasi tingkat kemacetan di Jakarta.

Secara dinamis menyatukan pergerakan lalu lintas perekonomian di Jawa Barat, Banten dan Jakarta. Bahkan secara bertahap, pola ini dikembangkan menjadi inspirasi bagi kota lain, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Palembang.

Dirut KCJ Bambang Wibianto mengaku, saat ini daya tampung kereta dan *demand* (permintaan) kurang memadai. Diharapkan, sebelum akhir 2010 ini ada pembelian 88 kereta bekas yang layak pakai dari Jepang oleh KCJ, dan 8 gerbong bantuan pemerintah hasil produk INKA. Sehingga seluruhnya 96 gerbong.

"Perhatian terhadap keselamatan merupakan yang utama. Di mana penambahan armada, tujuan utamanya ke arah itu. Selanjutnya, komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terus dilakukan. Kami menghimbau agar tidak ada lagi penumpang yang naik di atap-atap gerbong. Ini solusi mengatasi tingkat pengguna jasa KA Jabodetabek yang semakin meningkat," kata Bambang.

Obsesi yang dibangun, ungkap dia, menuju kenyamanan pengguna jasa KA berupa kondisi kereta yang makin bersih dan nyaman. Dan yang penting, dapat mengurangi tingkat kepadatan penumpang. Selain itu, turut merangsang pengguna jasa untuk beralih menggunakan KA. Secara internal, peremajaan kereta yang tidak layak operasional juga terus dilakukan. Ini bagian membangun keandalan.

Bambang menyatakan, bahwa KCJ juga berusaha menyeimbangkan jumlah penumpang dan armada. Untuk itu, kapasitas listrik serta letak gardu listrik disesuaikan dengan supply listrik yang memadai. "Pengaturan waktu, pengendalian operasional kereta, serta pengaturan sarana dan prasarana menuju ketepatan berangkat dan tiba di tujuan semakin dioptimalkan," tuturnya.

Bambang berharap, bagaimana perjalanan kereta makin lancar dan tingkat kenyamanannya seperti yang diharapkan, khususnya kereta-kereta yang menggunakan AC. Perhatian lain, membangun kemandirian, makin eksis, akuntabel dan mendapat kepercayaan masyarakat pengguna jasa kereta api Jabodetabek dan *stakeholder*. ■ RI

Bambang Wibianto

Kereta Regional

Sebagai satu-satunya produsen kereta api di Indonesia, PT INKA semakin siap terhadap pengembangan desain rancang bangun, prototype dan teknologi.

Seperti diungkapkan Gunesti Wahyu Handiko, Direktur Komersial PT INKA, tahun 2009 lalu merupakan tahun inovasi, dimana produk INKA mendapat predikat kereta regional, seperti prototype, KRD-E, KRD-I dan 2 set Rail Bus. Segera meyusul pembuatan lokomotif, diharapkan 2011 siap produksi.

Kami berani mengklaim, kata Gunesti, kereta jenis KRD-E di kawasan Asia, baru INKA yang meluncurkan kereta jenis itu. Jepang dan Korea Selatan yang produksinya diakui internasional tidak memiliki KRD-E. Sementara di negara Eropa, kereta jenis ini banyak dijumpai.

"Teknologi KRD-E seperti teknologi yang digunakan di lokomotif. Maka pembuatan lokomotif itu sudah ada partnernya, yaitu KRD-E. Bahasa sederhana, karekteristiknya seperti motor AC. INKA siap memproduksi lokomotif, sertifikatnya dari tahun lalu. Sekarang tahap desain, ini made in Indonesia," ungkapnya.

Gunesti Wahyu Handiko

Pembuatan lokomotif menggunakan bogi baru dan bukan cor. Beberapa manufaktur produk luar negeri menginginkan INKA sebagai basis produksi maupun desain engineering. Seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, bahkan Australia dan Bombarder (Jerman).

Berbagai perubahan, kata dia, detail desain KA ekonomi non AC menjadi ekonomi AC. Sesuai yang dicanangkan oleh Dirjen Perkeretaapian, angkutan lebaran 2010 ini para pemudik bisa menikmati kereta ekonomi AC. Fasilitas AC di KRD-I dan KRD-E regional siap diluncurkan.

INKA memiliki pengalaman dimaki-maki customer akibat kereta mogok. Kita akui itu pernah terjadi, ungkapnya. Saya berharap customer secara jujur mengatakan, seperti KA Prameks Solo-Yogjakarta, sejauh ini berjalan lancar dan ada salah satu penumpang pernah mengatakan, kereta ini mampu melesat dengan kecepatan 100 km/jam.

Dan kita ingin buktikan, jelasnya, bahwa produk INKA adalah andal dan kompetitif. Maka kami berharap pemerintah maupun PTKA untuk membeli produk INKA lagi. Seperti KRD-I yang dioperasionalkan di Medan, keandalannya sudah menjadi brandmark.

Sebelumnya, kereta produk INKA banyak beroperasi di Jawa, sekarang sudah menyebar di Sumatera. Dimana ada rel kereta, di situ ada produk INKA melayani pengguna jasanya. ■ RI

foto-foto: ist

Lebih Cepat dengan Smart Card

Perkawinan antar-moda dalam satu sistem yang memacu lebih cepat, lancar, mudah, terintegrasi dan barometer efisiensi waktu.

Formulasi terukur dan terstruktur serta desain integrated antar-moda, KA, bus, pelabuhan, sungai, bandara dan kereta gantung, bagaikan satu kesatuan. Aplikasi pertama dan target 2010 digelar di Joglo (Yogyakarta-Solo).

Menyatukan kemudahan dalam perjalanan melalui tiket terusan di kartu smart card. Model yang dibangun ini merupakan solusi dari pengalaman di negara maju, pola yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan dengan sistem perkawinan antar-moda.

Sebagaimana dikatakan Wakil Menteri Perhubungan RI Bambang Susantono, "Saya berupaya mengawinkan beberapa moda transportasi, bus, kereta api dan angkutan laut, termasuk kapal ferry yang terintegrasi. Sementara ini, yang menjadi prioritas, bus dan kereta api."

Beberapa konsep sedang dibuat, yang pelaksanaannya tidak sesederhana seperti yang digambarkan, sambil menyebutkan fokusnya adalah mengintegrasikan sistem tiket, fisik, stasiun dan jadual.

Proyek percontohan dilakukan di beberapa stasiun di Jakarta, Yogyakarta dan Solo. Nantinya, penumpang yang turun di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta bisa melanjutkan perjalanan dengan KA Prameks atau bus TransYogya dan berlanjut ke Solo, semua dalam satu tiket.

"Masyarakat butuh model yang riil, efektif dan efisien. Kita berharap agar masyarakat ikut mendorong terciptanya transportasi umum yang semakin harmonis," ungkapnya.

Secara terpisah, Elly Sinaga, Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengatakan, hal penting adalah menyatukan antardaerah satu provinsi dan antar-provinsi. Namanya Aglomerasi sesuai UU LLAJ no. 22/2009 dan definisi tentang perkotaan dan UU tata ruang, bukan *single city* tapi terdiri dari beberapa kota

Sistem transit antar-moda, menurut Elly, diawali perkawinan tiket busway dengan tiket KA di Jabotabek. Ini termasuk dalam program 100 hari KIB II. Di beberapa daerah dilakukan hal yang sama seperti di Sumatera Utara, Medan-Binjai- Deli Serdang. Di Bali meliputi, Denpasar-Badung-Tabanan dan Gianyar. Integrasi yang dibuat dalam satu sistem, dia terintegrasi di dalam ruangnya.

"Bulan April ini akan diresmikan Trans Batik Solo yang integrated dengan KA Prameks, Trans Jogya dan Bandara Adi Sucipto-Jogyakarta. Serta peluncuran kartu Smart Card, satu kartu dipakai untuk tiket KA, Trans batik Solo dan Trans Jogya," kata Elly.

Penggunaan *e-tikecting system transit*, kata Elly, telah digelar di Pekanbaru, Gorontalo, Manado, Semarang dan di Palembang. Perkawinan Trans Musi satu tiket dengan bus air. Ke depan, semua satu tiket atau *one to all* seperti di Singapore, setiap masuk kawasan di moda lain, kartu langsung di debet, dia naik bus, naik ferry, naik KA dengan satu tiket.

Sementara Bandung metropolitas area, sambung Elly, 3 tahun ke depan perkawinan KA dengan kereta gantung, dari salah satu stasiun KA memanjang 7 km ke Lembang. Sekarang sedang tahap studi. Topografi itu, seperti di Papua, jadi kenapa menggunakan jalan padahal kereta gantung lebih dimungkinkan sebagai alat transportasi.

Permintaan

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Nugroho Indrio, mengatakan, ide dasar dari moda transportasi terintegrasi ini adalah tingginya *demand* pengguna akses Yogja-Solo dan sebaliknya. "Untuk itu, kita membuat suatu *connectivity* dari Bandara Adi Sucipto, lalu naik KA Prameks ke Solo. Kemudian untuk mempermudah pelayanan, akan ada Smart Card yang digunakan untuk layanan tersebut," tuturnya.

Sementara ini, kata Nugroho, pihaknya masih dalam proses persiapan, termasuk pendataan pembiayaan yang dibutuhkan. Persiapan lain, di antaranya sistem pengintegrasian beberapa moda angkutan tersebut, hingga pemasangan alat pendeteksi Smart Card di bandara maupun di KA Prameks. Penggunaan Smart Card ini bisa digunakan untuk langganan atau harian.

Diakui Nugroho, program integrasi ini menjadi proyek percontohan yang pertama kali di Indonesia. "Harapannya, agar pengguna jasa kereta api mendapat pelayanan yang lebih baik. Bila meneruskan perjalanan menggunakan moda lain, melalui tiket terusan, lebih cepat dan menghemat waktu," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Yosca Herman Soedradjad, Kepala Dinas Perhubungan Solo, sistem integrasi menggunakan Smart Card dilakukan bertahap. "Sistem ini dilakukan oleh Pemkot Solo dan bekerjasama dengan Pemkot Yogyakarta. Kemungkinan penerapannya tidak bersamaan. Namun tahun ini diharapkan bisa berjalan secara keseluruhan. ■ RI

Perkawinan: *Antar moda.*

foto: ist

Kabupaten Humbahas

Mempertanyakan SK Menhut

Suasana hutan di Humbahas

Jika tanah adat diklaim sebagai tanah negara maka rumah warga dan tempat ibadah terancam digusur.

Dalam rangka mewujudkan Hutan "Mas" (Masyarakat Mandiri dan Sejahtera), yang merupakan visi Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) itu untuk memajukan pembangunan di berbagai sektor. Namun, usaha tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal karena terbentur beberapa hal. Salah satunya adalah dengan adanya SK Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Register di Sumatera Utara.

Menurut data statistik tahun 2006, luas kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara ini sekitar 251.765,93 ha. Dari luas itu, wilayah hutannya sekitar 95.512,84 ha yang terdiri dari hutan lindung 1.280 ha, lahan penghijauan 1.634 ha, lahan kritis 41.568,8 ha. Namun di dalam kenyataannya di lapangan, luas kawasan hutan per kecamatan tidak sesuai dengan SK.44/MENHUT-II/2005 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan M.S Kaban saat itu. Hal inilah yang dipertanyakan kemudian, yakni peta asli kehutanan waktu di Tapanuli Utara dengan peta setelah pemekaran.

Salah satu contoh, Kecamatan Pollung. Menurut data, luas keseluruhan kecamatan ini 32.736,64 ha. Wilayah di luar kawasan hutan seluas 26.674,26 ha, sedangkan luas hutannya sekitar 6.062,20 ha. Anehnya, menurut peta kehutanan Kabupaten Humbahas, Kecamatan Pollung mulai dari Desa Aek Nauli sampai Desa Hutagalung masih termasuk hutan register (hutan negara). Karena itu, tidak satu pun rumah atau lokasi yang dapat disertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Alasan BPN, kawasan yang dimaksud masih hutan register, termasuk hutan milik masyakarat yang masih terletak di sekitar itu.

Selain Kecamatan Pollung, masih banyak kecamatan lain di Kabupaten yang dimekarkan berdasarkan UU No. 9/2003 dan diresmikan pada tanggal 28 Juli 2003 ini yang bermasalah seperti itu. Antara lain, Kecamatan Paranginan, sebagian di Kecamatan Lintong, Desa Saitnihuta Kecamatan Dolok Sanggul dan Kecamatan Parlilitan. Hal seperti ini pulalah yang menyebabkan terjadinya demonstrasi tahun 2009 di Desa Pandumaan Sipituhuta Kecamatan Pollung. Mereka menuntut hak mereka atas tanah yang telah diwariskan nenek moyang mereka sejak tujuh bahkan puluhan generasi sebelumnya.

Terkait persoalan ini, beberapa tokoh masyarakat daerah ini menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijaksanaan pemerintah mengeluarkan SK.44/MENHUT-II/2005 tersebut. Manganju Tampubolon S.Pd, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Pollung misalnya, kepada Parasian Manalu dari *Berita Indonesia* mengatakan kecurigaannya akan adanya permainan politik para birokrat ketika pemekaran Humbahas dari Kabupaten Tapanuli Utara.

Pertanyaannya, apakah dengan otonomi daerah, SK Menhut No.44 tersebut tidak dapat direvisi kembali? Atau apakah dengan menunjukkan pelepasan kawasan hutan merupakan syarat pembentukan Humbahas saat itu? Menurut Tampubolon, jika permasalahan ini tidak dijernihkan sekarang, tentu ini akan jadi bumerang bagi generasi mendatang.

Dia menambahkan, keluarnya SK Menhut No.44 tanggal 16 Februari 2005, ada kemungkinan tanpa disurvei oleh Pemkab atau Bappeda Sumatera Utara terlebih dahulu. Indikasinya, setelah SK 44 dikeluarkan, luas hutan register di Humbahas menjadi 174.524,39 ha, padahal sebelumnya hanya 95.512,84 ha. Itu berarti, di tengah pertambahan penduduk yang membutuhkan pemukiman dan lahan pertanian, luas hutan justru bertambah sekitar 60.00 ha. Sesuatu yang tidak masuk akal.

Di samping itu, tugu/patung sebagai budaya orang Humbahas sudah beratus-ratus tahun berdiri tegak di daerah ini. Gereja juga sudah merayakan pesta jubileum (ulang tahun ke-100), jadi di luar logika jika tanah tempat berdirinya bangunan itu dikatakan masuk hutan register. Karena itu, menurut Manganju, persoalan ini bisa menyebabkan masalah besar di kemudian hari. Sebab, pemukiman penduduk, tempat ibadah dan lainnya akan ikut tergusur berdasarkan SK Menhut ini.

"Indonesia merdeka tahun 1945, SK 44 baru dikeluarkan tahun 2005 untuk merampas tanah rakyat sekaligus melanggar HAM di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam UUD 1945 pasal 28 A-Z menjelaskan bahwa hak-hak masyarakat atau penduduk dilindungi oleh negara. Dengan demikian sudah selayaknya pemerintah mempertimbangkan kebijaksanaan atas SK 44 tersebut, namun dalam waktu dekat tim kita akan ke pusat untuk menanyakan langsung ke DPR pusat dan Menhut," ungkap Manganju.

Menyikapi persoalan ini, DPRD bersama Pemkab Humbahas hendaknya bersikap pro aktif menyelesaikannya. Usulan yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat terkait masalah ini seyogianya terus ditindaklanjuti demi masa depan Humbahas.

Seperti diketahui, 24 kabupaten di Sumatera Utara sudah pernah mengusulkan perubahan kawasan hutan seluas total 1,3 juta ha sesuai SK Menhut No.44 itu menjadi kawasan bukan hutan. Umumnya perubahan yang diusulkan adalah menjadi perkebunan sawit dan permukiman penduduk. Namun, hingga kini usulan itu belum mendapat tanggapan yang jelas. ■ **PM**

foto: repro

Pupuk cair dalam jerigan di dalam pabrik udang PT Bonanza Pratama Abadi Tarakan.

Tanpa Izin Tapi Bisa

Orang asing ternyata dapat memproduksi pupuk tanpa izin. Padahal, mereka tidak memiliki izin kerja. Penghinaan, kata berbagai pihak, undangan DPRD pun tidak dihiraukan.

Nasib Rahim bin Tiro (36) tidak sebaik Thiong In Ping alias Aping. Lelaki yang tinggal di Juata Laut, Tarakan Utara, Kalimantan Timur ini harus meringkuk di penjara selama enam bulan karena kasus pembuatan minuman syrup tanpa izin. "Ketika itu, polisi melakukan razia gula asal Tawau (Sabah, Malaysia Timur). Kebetulan, mereka menemukan alat pembuat minuman. Tapi, karena tidak punya izin, langsung diambil," ujar Esli, isteri Rahim.

Berbeda dengan nasib orang-orang asing yang bekerja di PT Bonanza Pratama Abadi Juata Tarakan, Kalimantan Timur. Di areal perusahaan yang sejatinya pengalengan ikan menjadi *cool storage* udang, Thiong In Ping manager perusahaan, bersama orang-orang Cina asal Serawak, Malaysia Timur, bebas memproduksi pupuk cair yang kemudian dijual kepada petani tambak.

Suatu keresahan kini sedang melanda di Wilayah Utara Kalimantan Timur. Beberapa petani tambak khawatir bahwa pupuk yang diproduksi perusahaan itu telah membuat hasil panen mereka merosot. Sementara Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan beserta instansi terkait tampaknya enggan melakukan tindakan. Soalnya, perusahaan yang diduga mempekerjaan puluhan tenaga asing ini merupakan usaha patungan dengan mantan pejabat beken di Tarakan.

Perusahaan yang dulunya pengalengan ikan ini jelas termasuk investasi asing yang izinnya diterbitkan oleh Badan Penanaman Investasi Daerah (BPID) Provinsi. Bukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop) Kota Tarakan. Tapi, kalau mau tahu - apakah ada penambahan investasi, karena pembuatan pupuk itu sendiri merupakan penambahan investasi. "Secara logika memungkinkan untuk berkembang, atau bisa saja berkurang. Tapi, untuk jelasnya, kita dapat cek di BPID Kaltim di Samarinda," ujar Solikatin, Kabid Industri Disperindagkop Tarakan, kepada SL Pohan dari *Berita Indonesia* Tarakan beberapa waktu lalu.

Tapi, bukan pupuk itu saja yang jadi permasalahan. Sejumlah tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan ini - disinyalir tidak memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa karyawan mengatakan, jumlahnya cukup banyak, ada belasan orang. Mereka keluar-masuk Tarakan-Tawau, Malaysia dengan menggunakan transportasi perusahaan. "Bahan baku untuk pembuatan pupuk dibawa dari Malaysia," ujar beberapa karyawan.

Sementara untuk tenaga asing, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Tarakan, Drs Tadjuddin Tuwo, berjanji akan melakukan pengecekan ke lapangan. Soalnya, Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dikeluarkan oleh pusat di Jakarta dan provinsi. Sedang kalau hanya menggunakan visa kunjungan yang menentukan dari Imigrasi. "Bagaimana kita mau tindak. Mungkin mereka keluarga - isteri atau anak, *buyer* atau konsuler," kata Tajuddin Tuwo menjawab pertanyaan media ini.

Berapa jumlah orang asing yang berada di perusahaan yang berlokasi di ujung pulau Tarakan itu? Sejumlah karyawan yang ditanyai menyebut belasan orang dan yang memiliki izin kerja hanya lima orang. Tapi, pihak Imigrasi Tarakan yang dikonfirmasi menolak jika dikatakan jumlahnya belasan orang. "Orang asing hanya 6-7 orang, dan mereka punya izin dari Depnaker yang disebut IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing). PT Bonanza kan perusahaan modal asing (PMA) yang sahamnya banyak asing," ujar Romy Yudianto, SH, Kasi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Tarakan.

Konon, yang sangat menderita adalah karyawan. Perusahaan bertindak sewenang-wenang dan tidak manusiawi. Semua hak pekerja tidak ada satu pun yang terlindungi, seperti kelebihan jam kerja, pengobatan kepada karyawan sakit dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, sehingga ada kesan bahwa hukum yang berlaku dalam tembok perusahaan dengan penjagaan ketat pengamanan itu adalah hukum rimba.

Adalah Aries Sarta, Ketua LSM Pembangunan KKPD Tarakan yang merasa kecewa. Sejumlah karyawan yang di PHK membawa kasusnya ke DPRD Kota Tarakan. Apa yang terjadi selanjutnya? "Kami sangat kecewa atas penolakan pimpinan perusahaan terhadap undangan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Tarakan," ujar Aries Sarta, Ketua LSM Pembangunan Tarakan.

Pernyataan itu memang hanya menanggapi pengaduan karyawan kepada wakil rakyat yang diberhentikan secara tidak manusiawi. Namun, melihat sepak terjang yang dilakukan, seperti mempekerjakan tenaga kerja asing, perlakuan terhadap hak-hak karyawan, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semena-mena, "Kehadiran perusahaan ini sepertinya memiliki keistimewaan dan kekebalan hukum, sehingga patut dipertanyakan," kata Abu Bakar, Ketua RT 16 Juata Laut.

Kendati demikian, apa jawaban pihak PT Bonanza terhadap semua permasalahan di atas? *Berita Indonesia* bersama sejumlah media daerah dan pusat yang ada di Tarakan berusaha mengkofirmasi kepada Mr Thiong In Ping selaku pimpinan menolak. "Pimpinan yang kami hubungi menolak berjumpa dengan wartawan," ujar Maliki S.H, petugas sekuriti di pos pintu penjagaan. ■ **SLP**

foto: sl pohan

APBD Purwakarta 2010

Lebih Cepat dari Biasanya

Kota Purwakarta terus berbenah

Pemda Kabupaten Purwakarta memperbaiki alokasi dan penyaluran APBD 2010.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta tahun 2010 ditetapkan lebih cepat dari biasanya. Bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi, SH, bahkan menilainya paling cepat dan cermat sepanjang sejarah pembangunan Purwakarta. Jika selama ini APBD disahkan antara Januari dan Februari, namun pada APBD tahun 2010 ini, tahap pembahasannya selesai pada bulan November 2009 dan sukses ditetapkan menjadi Perda No.25 tahun 2009 tertanggal 31 Desember 2009.

Sekilas gambaran APBD-nya, pendapatan ditetapkan sebesar Rp926.967. 776.703 sedangkan belanja sebesar Rp979.822.813.256. Anggaran ini menurun dibanding Anggaran Perubahan tahun 2009 sebesar 4,30 % dengan nilai Rp33.342.988.193. Tapi penurunan itu, menurut Bupati, akan diupayakan dicapai kembali melalui Anggaran Perubahan tahun 2010. Dari segi penyaluran atau alokasi, tahun ini ada sedikit perubahan demi pemerataan dan profesionalitas.

Mengenai penurunan anggaran, Bupati mengatakan, tidak akan berdampak pada program proyek pembangunan. Bahkan khusus anggaran publik terjadi kenaikan. Hal itu dapat dilihat dari besaran anggaran belanja modal. Terkait peningkatan belanja publik di tengah penurunan anggaran ini, Dedi Mulyadi mengaku menyiasatinya melalui keteladanan pegawai negeri sipil. Dimana tahun 2010 ini, anggaran belanja pegawai diturunkan melalui efisiensi belanja barang dan jasa termasuk pemberian honorarium kepada bupati, wakil bupati dan segenap perangkat pemda. Namun, khusus alokasi belanja

Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta

desa seperti kesejahteraan Kepala Desa, Rt-Rw, ditingkatkan secara signifikan.

Sedangkan di bidang keagamaan, menyikapi adanya stigma bahwa bupati kurang memperhatikan kepentingan keagamaan, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pola berpikir makna religiusitas jangan hanya dipahami lewat makna simbolistik semata. Paradigma masyarakat religi yang cenderung diukur dari banyaknya lembaga pendidikan serta tempat-tempat ibadah, menurutnya harus diubah. Religiusitas diukur dari kedekatan manusia dengan Allah penciptanya sebagai hak esensi setiap individu. Religiusitas harus diisi oleh tingginya kesolehan sosial seorang umat. Oleh sebab itulah, menurutnya pemerintahan yang dibangunnya diarahkan menuju religiusitas dengan kesolehan sosial yang *hablum minannas*.

Pemda Purwakarta melakukan perbaikan sistem, seperti pendidikan yang diarahkan berbasis Al-Qur'an. Penataan lingkungan juga didesain mencerminkan religiusitas. Kemudian untuk jemaah haji dari Purwakarta, biaya operasional daerah seperti bis dan keamanan tahun 2010 ini akan ditanggung oleh Pemkab Purwakarta.

Pembangunan simbol keagamaan yang bermakna dan berfungsi luas juga tetap dilakukan. Contohnya, pembangunan Islamic Center akan dimulai tahun 2010 ini.

Perubahan yang agak menonjol adalah alokasi anggaran keagamaan yang sebelumnya dikendalikan oleh Bupati dalam bentuk bantuan sosial di bidang Kesra, tahun 2010 ini disebar secara merata kepada masyarakat melalui Dana Alokasi Desa. Jadi yang memberikan bantuan sarana keagamaan adalah para kepala desa secara bergiliran setiap tahun. Dengan demikian, pemerataan diharapkan terjadi. Sementara itu, Bidang Kesra akan memberi bantuan pembangunan simbol religiusitas seperti pesantren yang menjadi skala prioritas.

Tahun ini, dana kepemudaan dan olahraga juga meningkat signifikan. Namun pengelolaannya berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau dulu hanya dikelola oleh Bagian Kesra, pada tahun 2010 ini sebagian dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Tujuannya, agar pengelolaannya lebih profesional.

Proteksi terhadap masyarakat miskin, tahun ini diberi bantuan melalui sekolah gratis sampai tingkat SLTA. Anak yang meneruskan kuliah di kedokteran, teknik sipil dan lainnya juga akan diberi beasiswa.

Khusus hal pendidikan ini, bupati mengharapkan masyarakat punya komitmen seutuhnya bagi kecerdasan anak. Rakyat diharapkan punya kesadaran bahwa membesarkan anak adalah kewajiban orangtua yang merupakan aset masa depan keluarganya dan bangsa.

Disebutkan, perlu disadari bahwa tugas negara hanyalah memberikan fasilitas. Negara boleh saja menyayangi rakyatnya, tetapi tidak boleh memanjakan. Jadi, jangan sampai terjadi misalnya, setiap anak disubsidi negara Rp 50 ribu/bulan tetapi anak itu menghabiskan pulsa Rp 150 ribu/bulan hanya untuk kepentingan sia-sia. Jadi, kasih sayang pemerintah terhadap rakyat kiranya diimbangi oleh komitmen rakyat untuk menyayangi anak-anaknya secara cerdas.

Sedangkan pada bidang infrastuktur, Pemda Purwakarta tahun ini masih memberikan anggaran porsi terbesar. Menyikapi kritikan soal besarnya alokasi anggaran untuk jalan, bupati menjelaskan bahwa hal itu dilakukan untuk merespon usulan anggota Dewan dan kelompok masyarakat. Menurutnya, di sini perlu pemahaman aspek keadilan. Kalau di kota menikmati hot mix dari dulu, sedangkan desa masih banyak yang baru merasakan jalan aspal. ■ **BND**

foto-foto: repro

Obama dan UU Reformasi L

Meski sudah disahkan, UU Reformasi Layanan Kesehatan masih mendapat tentangan dari banyak pihak karena bersifat sosialis. Padahal, sesuai UU ini, layanan kesehatan akan merata bagi 97 persen warga AS di tahun 2015.

Para siswa dan anggota fakultas dari Northern Virginia Obama saat ia menandatangani UU Reformasi Layana

Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyadari betul pentingnya jaminan kesehatan bagi setiap warganya. Meski negara adidaya tersebut sedang mengalami pasang surut ekonomi akibat krisis finansial, Presiden Obama mempertaruhkan reputasi dan mencurahkan segenap energi demi meloloskan rancangan undang-undang (RUU) reformasi layanan kesehatan bagi masyarakat AS. Setelah melalui proses yang cukup alot di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, RUU reformasi layanan kesehatan tersebut akhirnya lolos, diputuskan melalui pemungutan suara dengan kemenangan tipis 219-212. Suara yang menolak adalah seluruh anggota dari Partai Republik ditambah 34 anggota dari Partai Demokrat. RUU ini menjadi UU setelah ditandatangani Presiden Obama di Gedung Putih (23/3/2010).

Obama yang tidak jadi berkunjung ke Indonesia pada akhir Maret lalu karena lebih memprioritaskan mengawal pemungutan suara rancangan undang-undang reformasi kesehatan di Dewan Perwakilan Rakyat DPR, lantas memberikan pujian dan berterimakasih kepada DPR yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Reformasi Kesehatan. "Ini bukan reformasi radikal, tetapi reformasi besar. Peraturan ini tidak akan memperbaiki seluruh hal yang salah dalam sistem perlindungan kesehatan kita. Tetapi ini membawa kita ke arah yang benar... ini adalah bentuk dari perubahan," kata Obama mengenai disetujuinya rancangan undang-undang pelayanan kesehatan tersebut.

Lolosnya UU Reformasi Kesehatan bernilai US $ 938 miliar dalam 10 tahun ini menjadi pencapaian penting Obama dalam menerapkan kebijakan dalam negeri, yang sebelumnya mendapat tentangan banyak pihak. "Setelah melalui upaya yang berliku, lobi-lobi, akhirnya kita bisa melakukan hal yang besar ini," kata Obama setelah menandatangani UU itu di Gedung Putih, Washington. Ia dikelilingi sejumlah anggota DPR dan Senat AS dari kubu Demokrat yang mendukungnya.

Berhasil lolosnya RUU reformasi layanan kesehatan ini tidak lepas dari nuansa historis dan sekaligus merepresentasikan ekspansi terbesar dalam jaring pengaman sosial sejak program Medicare dan Medicaid yang pernah diberlakukan tahun 1965 semasa pemerintahan Presiden Lyndon B Johnson.

Adanya jaminan kesehatan dalam pemerintahan Obama ini sekaligus merealisasikan janjinya saat kampanye pilpres lalu. Usaha Obama untuk memperjuangkan reformasi layanan kesehatan semakin intens ia lakukan pasca kemenangan pada pemilu 4 November tahun lalu. Di hadapan kongres 9 November 2009, ia juga menyuarakan pentingnya undang-undang baru layanan kesehatan.

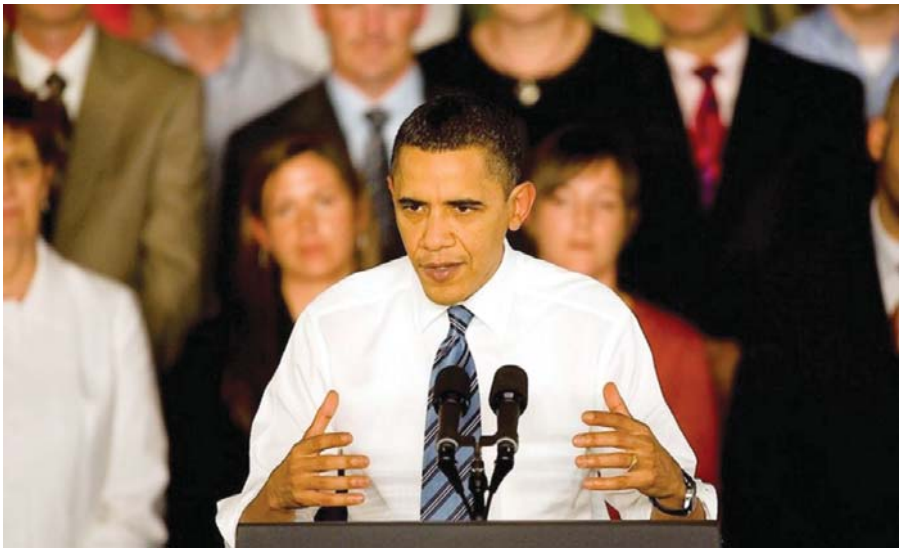

Obama terus melakukan promosi UU Reformasi Layanan Kesehatan kepada rakyat Amerika

Sebelum pemerintahan Obama, presiden pendahulunya juga telah melakukan hal yang sama, berupaya mereformasi layanan kesehatan masyarakat AS. Presiden Jimmy Carter pernah menyerukan sistem asuransi kesehatan nasional komprehensif. Kemudian pada tahun 1993, Presiden Bill Clinton mengupayakan reformasi kesehatan, tapi gagal di Kongres. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan terjadi pada masa pemerintahan George W Bush dimana program Medicare diperluas hingga mencakup resep obat.

Saat ini sekitar 47 juta warga Amerika tidak memiliki asuransi kesehatan. Hanya 25 juta orang memiliki asuransi kesehatan. Harga premi yang terlalu tinggi diduga menjadi penyebabnya. Bagi warga yang kurang mampu tampaknya sulit memiliki asuransi kesehatan pribadi. "Kami akan loloskan undang-undang baru sehingga seluruh warga Amerika bisa menikmati biaya kesehatan murah, memiliki pilihan dan perlindungan kesehatan yang memadai," kata Obama dalam pidatonya di Washington (18/3/2010).

Reformasi layanan kesehatan yang

foto-foto: daylife.com

ayanan Kesehatan

Community College, pembuat UU, dan Nancy Felosi (ketiga dari kanan) mendampingi Presiden
an Kesehatan di Virginia, 30 Maret 2010

sudah ditandatangani itu bertujuan memperluas perlindungan kesehatan bagi 32 juta warga AS, mengembangkan rencana kesehatan pemerintah bagi warga miskin, memberlakukan pajak baru bagi warga kaya, dan melarang praktik asuransi seperti penolakan pemberian perlindungan bagi orang yang sudah memiliki masalah kesehatan. Bagi mereka yang kontra dengan UU ini, perihal orang-orang yang sakit pun berhak mendapatkan asuransi kesehatan, dianggap suatu hal yang tidak mungkin terjadi di dalam industri asuransi yang sangat kapitalistik. Obama dianggap sosok sosialis yang ingin merealisasikan campur tangan negara di wilayah privat yang haram hukumnya di dalam dunia liberalisme.

UU baru ini juga akan memberi kekuasaan bagi pemerintah Amerika untuk melarang perusahaan asuransi kesehatan menaikkan harga premi terlalu tinggi. Serta mendorong semua warga mendapatkan asuransi yang lebih murah dan menyediakan subsidi agar rencana asuransi publik itu bisa terlaksana. Program asuransi publik ini juga ditujukan bagi warga Amerika yang kesehatannya tidak dijamin tempat kerjanya. Memang kebanyakan warga AS mendapatkan asuransi melalui perusahaan tempat mereka bekerja, lainnya mendaftar dengan skema asuransi swasta.

Dengan adanya UU ini, biaya yang akan dikeluarkan pemerintah AS akan semakin membengkak. Data menunjukkan pada tahun 2007 saja, biaya untuk layanan kesehatan kesehatan mencapai 2,2 triliun dolar AS. Jumlah itu hampir dua kali lipat rata-rata negara lain dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Artinya belanja Pemerintah AS untuk kedua program, Medicare (yang lanjut usia) dan Medicaid (untuk yang miskin) akan lebih besar. Yang diperkirakan naik, dari 4 persen dari produk domestik bruto (GDP) tahun 2007 menjadi 7 persen GDP tahun 2025 dan 12 persen GDP tahun 2050. Hal itu membuat biaya layanan kesehatan salah satu faktor penyumbang terbesar defisit anggaran AS.

Sehingga tidaklah mengherankan bila langkah yang ditempuh pemerintahan Obama ini mendapat kritik. Partai Republik dan industri asuransi mengkritik bahwa reformasi layanan kesehatan tersebut akan menelan biaya 940 miliar dollar AS. Dana talangan pemerintah sebesar itu semakin membengkakkan defisit anggaran. Sementara pemerintah sudah mengeluarkan uang yang sangat besar untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis perbankan dan kini anggaran negara harus digerogoti kembali demi menyediakan asuransi publik yang murah.

Meskipun telah diloloskan, Partai Republik terus menentang undang-undang reformasi layanan kesehatan itu. Ketua Minoritas Republik di Senat Mitch McConnell mengatakan, Republik akan melakukan segala cara untuk menentang undang-undang tersebut dan menyusun rencana untuk "mengepungnya dengan ratusan amandemen". Kritikan juga datang dari Rival Obama dalam pemilu presiden, Senator John McCain dengan mengatakan bahwa Obama akan membayar harga sangat mahal akibat perbuatannya. Dalam sebuah wawancara dengan ABC, senator Arizona itu mengatakan, kini "tidak akan ada lagi kerja sama bipartisan".

Bahkan Jaksa Agung Florida, Bill McCollum memimpin 14 negara bagian AS memasukkan gugatan konstitusional yang menganggap Kongres tak punya hak konstitusional memaksa warga untuk mendapat asuransi kesehatan. Juga disebutkan pemerintah federal melanggar Konstitusi dengan mendorong sebuah mandat kepada negara tanpa menyediakan sumber-sumber dana cukup untuk membiayai kebijakan tersebut.

Namun mengenai hal itu, pihak Gedung Putih menyikapinya dengan tenang. "Tentang hal itu, saya bilang silakan saja," kata Kepala Kebijakan Domestik Gedung Putih, Melody Barnes. Dia juga mengutip tuntutan serupa atas UU Jaminan Sosial dan UU Hak Voting saat disahkan dulu. "Jika Anda ingin melihat wajah seorang tua yang anaknya sekarang mendapat asuransi jaminan kesehatan dan bilang bahwa kami keberatan hal itu ... ya silahkan saja."

Meski pro dan kontra terus timbul, Presiden Obama terus melakukan promosi UU Reformasi Layanan Kesehatan yang bersejarah kepada rakyat Amerika. Dia memulai dari Negara Bagian Iowa (25/3), negara bagian yang mencalonkannya menuju Gedung Putih dan meyakinkan para pemilih mengenai manfaat perundangan itu.

Sebab bila undang-undang gagal diterapkan bisa berdampak negatif pada kepresidenan Obama. Obama mengakui, peringatan Republik tentang harga politik tinggi yang harus dibayarnya pada pemilu November mendatang yang akan menentukan pemegang kontrol di Kongres. Sebab banyak warga AS yang tidak yakin apakah undang-undang layanan kesehatan yang baru bisa menyeimbangkan perluasan cakupan, pengendalian biaya, dan pengaturan perusahaan asuransi. Obama harus bekerja ekstra mengubah skeptisisme itu dan ia memiliki waktu selama tujuh bulan ke depan. ■ **RIE**

Layanan Berbasis Lokasi Buatan Lokal

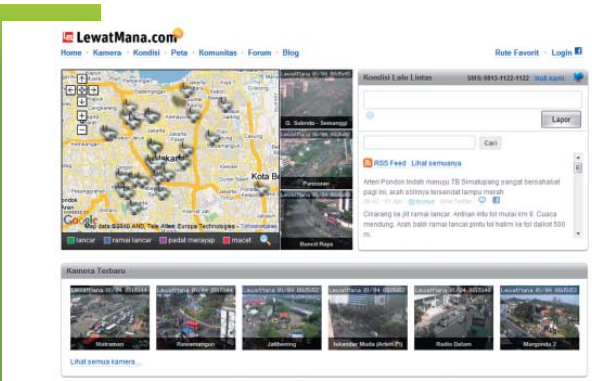

Kini mulai bermunculan situs-situs lokal yang tidak kalah canggihnya dengan situs luar. Uniknya, situs-situs tersebut tidak hanya bersifat *user-generated content* dan *community building*, namun juga menyediakan layanan berbasis lokasi (*location-based web service*).

Di jaman sekarang ini, mobilitas seseorang semakin cepat. Pindah lokasi dari satu tempat ke tempat lain dilakukan dalam tempo singkat. Untuk menunjang mobilitas itu, keberadaan peta, direktori, dan buku panduan sangat penting. Masalahnya semua informasi itu harus tersedia dengan cepat dan mudah diakses dari manapun. Maka solusi *online* menjadi jalan keluarnya.

Di Amerika Serikat, situs-situs berbasis lokasi (*location-based web service*) seperti Foursquare, Yelp, dan Gowalia cukup terkenal dan banyak dikunjungi. Kesuksesan situs-situs penyedia informasi itu, membuat Twitter, Facebook, dan Google berlomba-lomba ingin mengikutinya.

Tak ketinggalan pengembang web di Indonesia. Beberapa situs web lokal mulai hadir memberikan layanan informasi lokasi. Tujuannya jelas untuk melayani kebutuhan informasi lokasi para pengguna internet. Selain itu mereka juga melirik potensi bisnis di bidang ini.

Seperti situs LewatMana.com yang menyediakan infomasi jalan-jalan di tiga kota besar yaitu Jakarta, Depok, dan Tangerang. Ide awal munculnya situs ini adalah kemacetan yang parah di kota-kota besar di Indonesia.

Pendiri LewatMana.com, Hendry Soelistyo, mengatakan alangkah enaknya bila di jalan-jalan utama dilengkapi dengan kamera-kamera pemantau untuk melihat kondisi lalu-lintas. Pengguna jalan tidak perlu menebak-nebak atau kebingungan menentukan rute yang harus diambil agar terhindar dari kemacetan.

Pria lulusan University of Manitoba, Canada, ini cukup jeli melihat kebutuhan masyarakat perkotaan. Jiwa bisnis yang ia miliki membuatnya maju dengan LewatMana.com, penyedia layanan informasi lalu lintas online.

Situs LewatMana.com mengandalkan laporan teks langsung dari pengguna jalan. Melalui Facebook dan Twitter, pengguna jalan dapat memberikan informasi situasi di jalan. Semua kiriman akan dimoderasi oleh administrator sebagai proses filterisasi. Hanya informasi yang valid dan bermanfaat yang akan di-update kepada followers/fans.

Fasilitas visual live report situs ini menjadi kekuatan dari situs ini. Bentuk yang tersedia, selain foto ada pula rekaman video. Foto dan rekaman video berasal dari IP camera yang terdapat di 26 titik strategis di Jakarta, Depok dan Tangerang. Laporan visual ini biasanya menyala 24 jam dan terus di-update. Foto diperbaharui tiap 30 detik, sedangkan rekaman video berdurasi 8 detik diperbaharui tiap 2-3 menit. Situs ini dapat diakses dengan cepat, karena data-data di-hosting di server lokal IIX.

Kalau Anda perhatikan tulisan di bawah feature kamera, di sana tertera nama perusahaan, toko, atau lembaga tertentu. Inilah bentuk iklan yang terpampang di situs LewatMana.com. Para pemilik bisnis yang mengizinkan bangunannya dipasangi kamera atau berkenan memasang kamera sendiri, berhak memasang iklan dalam situs ini. Dengan memasang logo atau nama bisnis di bawah foto atau video, merek dagangnya akan semakin dikenal bahkan diingat pengguna LewatMana.com. Dengan kata lain, orang menjadi tahu ada toko atau bisnis tersebut di jalan itu".

Usia situs LewatMana.com masih seumur jagung. Konsep bisnis yang diusung pun masih tergolong baru dan belum disadari benar potensinya. Hal ini membuat para staf pemasaran cukup sulit menggandeng para pemilik usaha. Padahal kerja sama yang ditawarkan sangat mudah. Pemilik usaha hanya menyediakan tempat untuk pemasangan kamera. Semua logistik dan pemeliharaan alat menjadi tanggung jawab pengelola LewatMana.com.

Secara teknologi, mereka terus mengembangkan feature-feature baru. Misalnya forum komunikasi pengguna jalan, direktori tempat, dan rekomendasi rute. Versi mobile LewatMana.com juga sedang diupgrade agar pengguna dapat meng-upload foto dan video langsung dari ponsel.

Situs lain yang mulai banyak diminati adalah Koprol.com. Lewat situs ini, pengguna dapat check-in di suatu tempat, memberitahu posisinya kepada teman-teman, sekaligus mengetahui orang-orang

foto-foto: dok.berindo

yang berada di tempat tersebut. Review singkat pun dapat ditulis pengguna.

Satya Witoelar, Chief Creative Officer Koprol, mengakui inspirasi didapat dari kebiasaan berpindah-pindah masyarakat kita terutama di kota-kota besar. Bersama dua rekannya, Fajar A. Budiprasetyo dan Daniel Armanto, ia terjun di SkyEight, software house tempat lahirnya Koprol.

Sejak diluncurkan ke publik Februari 2009, pengguna Koprol telah mencapai 35 ribu lebih. Mereka merupakan sasaran para pengiklan di Koprol. Dengan slogan "Targeted Advertising", pemilik Koprol menjanjikan cara promosi yang lebih tepat sasaran bagi pemilik bisnis sekaligus penawaran yang lebih bermanfaat bagi pengguna.

Misalkan, jika seseorang check-in di Pondok Indah Mal, ia akan memperoleh pesan atau SMS otomatis mengenai promosi atau event yang sedang berlangsung di sana. Pesan yang dikirimkan pun bisa disesuaikan tergantung jenis kelamin, usia, hobi, atau kebiasaan pengguna tertentu. Hal ini terlaksana berkat user profiling yang sudah dikerjakan sebelumnya.

Bagi para pemilik usaha, Koprol menyediakan akun khusus berlabel business account mulai dari yang gratis hingga berbayar dengan fasilitas yang bervariasi tentunya.

Di tahun 2010 ini, Koprol berencana menambah jumlah anggota dan merilis native apps untuk Blackberry dan J2ME. "Pengembangan ke depan akan terfokus pada versi mobile karena itulah tujuannya, 40% akses Koprol saat ini dilakukan dari ponsel," jelas Satya.

Tantangan klasik yang dihadapi tim kecil ini adalah kekurangan sumber daya manusia dan finansial. Selain tiga orang inti, ada 3 orang sifatnya membantu. Oleh sebab itu, Koprol membuka pintu kerja sama bagi web developer lokal untuk sama-sama belajar dari sisi model bisnis, teknis, dan cara memahami keinginan pengguna.

Bila LewatMana.com menyediakan informasi jalan dan Koprol.com menyediakan informasi tentang si penggunanya sendiri, Urbanesia.com sedikit berbeda dengan mengutamakan fungsi direktori bisnis dan memudahkan orang dalam mencari toko atau jenis usaha lainnya.

Meski demikian, Urbanesia tak hanya menyediakan daftar nama toko dan jenis usahanya tapi juga menyandingkannya dengan teknologi berbasis lokasi. Artinya, kita dapat mengetahui toko terdekat yang berada dalam jangkauan kita. Daftar SPBU, ATM, restoran, sekolah, halte busway, rumah sakit, dan tempat publik lainnya juga tersedia layaknya kita membuka Yellow Pages.

Selina Limman, co-founder Urbanesia.com, mendapat ide situs ini dari pengalaman pribadinya ketika berbelanja. Ada toko yang memiliki produk yang bagus tapi sulit diakses sehingga terkesan tidak laku. Sebaliknya, banyak orang yang bingung membeli barang di lokasi sekitar karena tidak tahu.

Berbekal pengalamannya memanfaatkan situs Yelp! dan Citysearch saat menjalani studi di AS, Selina berniat membangun situs direktori bisnis di Indonesia. Kebetulan, rekannya Natali Ardianto, memiliki pemikiran yang sama. Dan lahirlah Urbanesia.com pada bulan Mei 2009.

Sedikitnya ada seribuan anggota di Urbanesia.com. Sebagian besar anggota masih berstatus sebagai pengguna biasa, tapi ada pula yang sudah mulai membuat profil bisnis miliknya.

Mengusung konsep web berkekuatan user-generated content, profil usaha dalam situs ini diungguh sendiri oleh pemiliknya. Dilengkapi dengan fasilitas testimonial toko dimana pemilik bisnis dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan. Inilah salah satu kelebihan Urbanesia dibanding direktori online lokal lainnya.

Daya tarik Urbanesia lainnya adalah rubrik Urban's Notes yang berisi artikel seputar gaya hidup dan review tempat kiriman para anggota. Anggota yang aktif menulis artikel, membuat profil bisnis, mengisi testimonial, sampai berbagi info promo berhak mendapat poin. Poin yang terkumpul, nantinya dapat ditukar dengan merchandise atau voucher belanja di toko-toko anggota Urbanesia.

Kini Urbanesia mulai dilirik para staf online marketing perusahaan kelas korporat. Perusahaan yang ingin bermitra diwajibkan membayar dan sebagai timbal baliknya, Urbanesia memberikan layanan kustomisasi tampilan dan pengelolaan profil. Mereka juga diberi URL khusus, http://urbanesia.com/<nama-perusahaan>. Bagi para web developer, Urbanesia.com menyediakan API (Application Programming Interface).

Jadi, tunggu apa lagi? Buruan buka ketiga situs ini dan rasakan kedahsyatannya! Buktikan kalau situs buatan dalam negeri tidak kalah bermutunya dengan situs luar seperti Facebook, Twitter, atau Foursquare. ■ **CID**

Teknologi di Balik Avatar

Sinema layar lebar besutan James Cameron berjudul Avatar menjadi buah bibir para penikmat film dalam beberapa bulan terakhir. Kehandalan James Cameron sebagai sutradara film memang tidak diragukan lagi. Beberapa film yang ia garap seperti Titanic (1997), The Terminator dan Aliens, sarat dengan special effect yang dibuat dengan komputer.

Dalam karyanya yang terbaru, Avatar, keberadaan komputer semakin dominan. Ini bisa dibuktikan dari isi film Avatar yang sekitar 90% diisi oleh animasi CGI (Computer-Generated Imagery). Meski dalam film The Terminator dan Aliens, animasi CGI sudah digunakan, namun tidak secanggih yang diterapkan di Avatar. Belum lagi pemanfaatan teknologi 3 dimensi membuat Avatar semakin istimewa.

Pemanfaatan teknologi komputer yang intensif membuat Avatar membutuhkan biaya hingga US$300 juta. Meski demikian, hanya satu bulan sejak dirilis 17 Desember 2009, film ini sudah mencatat pendapatan kotor lebih dari US$1 miliar, lebih dari tiga kali lipat biaya pembuatannya.

Membuat animasi CGI berefek 3D menjadi

terlihat realistis memerlukan perangkat lunak tingkat lanjut (advanced) dengan banyak fitur dan mampu menangani grafis-grafis rumit seperti 3DS Max, Maya dan Blender (open source).

Peran perangkat keras berspesifikasi tinggi jelas sangat diperlukan untuk menghasilkan animasi CGI yang realistis. Itulah sebabnya, James Cameron memilih rumah produksi Weta Digital – yang pernah menggarap King Kong dan Lord of The Rings – untuk mewujudkan tampilan visual bangsa Na'vi, robot, pesawat tempur, serta pesona lanskap hutan dan pulau-pulau di Pandora. Di markas mereka di wilayah suburban Miramar, kota Wellington, Selandia Baru, terdapat peranti-peranti keras berukuran raksasa, meliputi studio, fasilitas produksi, server farm, dan data center.

Menurut majalah Information Management, Weta Digital memiliki ruangan data center seluas sekira 929 m2. Di dalamnya terdapat lebih dari 4.000 server blade HP Proliant BL2x220c berkekuatan34 racks, masing-masing memiliki 4 chassis dengan 32 mesin. Komputasi inti ini mengandung kurang lebih 40.000 prosesor dan 104 TB RAM.

Untuk media penyimpanan, Weta memanfaatkan network area storage berkecepatan tinggi sebesar 3 petabytes dari BlueArc dan NetApp. Untuk penghubung antar perangkat, dipakai jaringan ethernet 10 Gigabit dari Foundry. Tidaklah mengherankan bila Weta Digital menduduki posisi ke-197 dalam 500 besar superkomputer paling bertenaga di dunia versi situs Top500.org.

Rumah produksi berusia 17 tahun ini mengungkapkan, untuk mengerjakan Avatar, selama 24 jam sehari superkomputer miliknya bisa mengerjakan data sampai 8 gigabytes memori setiap detiknya. Ketika versi final film Avatar dirilis, jika dihitung mereka telah menyelesaikan data sebesar 17,28 gigabyte memori per menit.

foto: repro

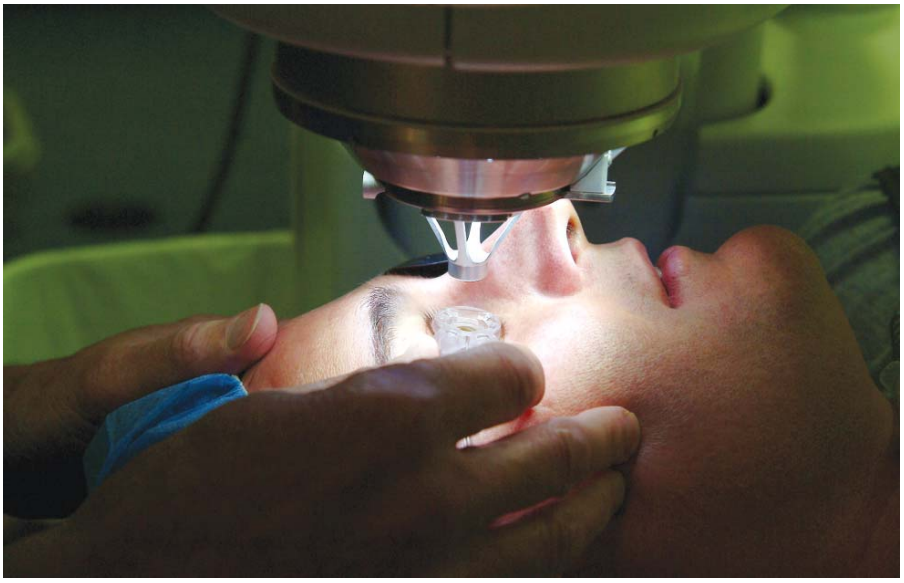

Seorang pasien sedang menjalani tindakan LASIK

Menikmati Teknologi LASIK

Memakai kacamata untuk mengatasi gangguan penglihatan merupakan solusi yang paling mudah, murah dan paling umum bagi kebanyakan orang. Tapi bila Anda ingin bergerak bebas tanpa kacamata atau lensa kontak, LASIK adalah solusinya.

Gangguan penglihatan seperti rabun jauh (miopia), rabun dekat (hypermetropia) atau silinder (astigmatisma) akan membuat mata tak berfungsi dengan normal. Contohnya saja pada orang dengan rabun jauh (miopia) dimana bayangan dari benda yang dilihat akan jatuh di depan retina sehingga untuk mendapatkan penglihatan yang lebih jelas orang itu harus mendekatkan benda ke matanya.

Hal inilah yang dulu dialami oleh Ramos saat membaca buku atau menonton televisi. "Sejak SD Ramos selalu membaca buku dengan jarak baca sekitar 15 cm, dan kalau menonton TV harus duduk dekat dengan TV," jelas ibunya. Melihat kejanggalan tersebut, ibunya membawa sang anak memeriksakan matanya ke dokter.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, diketahui Ramos yang baru berusia 10 tahun itu mengalami minus 2 pada mata kanan dan minus 1,5 pada mata kiri. Untuk mengatasinya Ramos dianjurkan memakai kacamata. Seiring pertambahan umur dimana mata juga mengalami pertumbuhan, minus pada mata Ramos semakin bertambah. Terakhir pemeriksaan diketahui mata kanan minus 8,25 dengan silinder 1,5 dan mata kiri minus 7,75 dengan silinder 1.

Kondisi itu membuat Ramos semakin tergantung dengan kacamata. Sejak bangun pagi sampai mau tidur malam, kecuali mandi, kacamata selalu dipakainya. Padahal pria yang bekerja di perusahaan media ini cukup dinamis dan aktif. Saat disarankan untuk memakai lensa kontak, Ramos menolaknya dengan alasan takut memasukkan benda asing ke dalam matanya.

Kehadiran teknologi LASIK (*Laser-Assisted In situ Keratomileusis*) yang katanya bisa menyembuhkan mata rabun jauh menarik perhatian Ramos. Teknologi LASIK adalah suatu tindakan bedah mata dengan laser refraktif yang dilakukan oleh oftalmologis (dokter ahli mata) untuk memperbaiki miopi, hipermetropi, dan astigmatisma.

Dr.Ferdiriva Hamzah, SpM yang bekerja di sebuah klinik mata LASIK menjelaskan, tidak semua pasien dapat di-lasik. Kriteria umumnya antara lain berusia 18 tahun ke atas, kedua mata harus dalam keadaan sehat, ukuran kacamata stabil minimal 6 bulan, tidak sedang hamil, melepas *soft lens* selama 14 hari atau *hard lens* selama 30 hari sebelum lasik.

Tak hanya itu, kandidat lasik harus menjalani pemeriksaan awal. Kornea pasien diperiksa menggunakan pakimeter untuk diukur ketebalannya dan dengan sebuah topografer untuk mengukur kontur permukaannya dan mendeteksi astigmatisma serta kelainan bentuk kornea lainnya. Dengan menggunakan informasi ini, dokter dapat menghitung jumlah dan lokasi jaringan kornea yang akan dihilangkan dengan sinar laser.

Bila seluruh kriteria memenuhi syarat, barulah pasien dapat menjalani operasi lasik. Proses lasik memiliki dua tahap, yakni pembuatan flap dan penyinaran laser untuk mengikis kornea. Sebuah *corneal suction ring* diletakkan pada bola mata, membuat mata tetap pada tempatnya (supaya tidak bergerak). Lalu mikrokeratom, semacam pisau elektrik, digunakan untuk memotong lapisan permukaan kornea secara melingkar (disebut flap). Flap dibuka lalu bola mata ditembak sinar laser untuk mengikis jaringan/stroma kornea. Setelah itu, flap dikembalikan ke tempat semula/ditutup.

Teknologi yang lebih maju adalah pembuatan flap tanpa pisau mikrokeratom, tapi dengan *femtosecond laser* (intraLASIK). "Flap yang dibuat dengan laser memang lebih tipis, lebih aman, lebih akurat dan lebih cepat dalam pemulihan pasca lasik," jelas Dr. Ferdiriva. Ini sangat berguna bagi kandidat lasik yang korneanya tipis.

"Beberapa pasien yang saya lasik menggunakan teknik intraLASIK. Ada yang karena ingin lebih *safety*, tapi ada juga yang karena terpaksa akibat korneanya kurang tebal. Kornea yang tebal diperlukan untuk tiga hal yaitu dibuat flap, dibuang sebagian dengan laser, dan disisakan agar mata dapat berfungsi baik," kata dokter yang telah banyak menangani operasi LASIK ini.

Dengan beberapa kelebihan teknik intraLASIK ini, tak heran bila penggunaan teknologi intraLASIK ini disetujui lembaga-lembaga terkemuka di dunia, seperti US Army, US Navy, US Air Force, Marine Corps dan NASA.

Namun demikian, Dr. Ferdiriva mengatakan setiap tindakan operatif ada komplikasinya, begitu pula lasik. *Subconjunctival hemorrhage* (perdarahan pada bagian putih mata) adalah komplikasi minor yang umum setelah tindakan lasik. Kemungkinan terjadinya *under* atau *overcorrection* juga ada walau lebih jarang. Sedangkan komplikasi paling umum dari tindakan bedah refraktif adalah mata kering dan silau.

Setelah mendapat informasi lengkap baik dari internet dan ahlinya langsung, Ramos pun menjalani operasi lasik di sebuah klinik mata awal Maret lalu. "Saya memilih lasik konvensional dengan mikrokeratom karena lebih terjangkau biayanya," akunya. Dari segi biaya, lasik termasuk mahal. Kisarannya antara 12-25 juta untuk 2 mata tergantung klinik matanya dan teknik yang digunakan (intraLASIK lebih mahal).

"Mulai masuk ke ruang operasi sampai selesai lasik hanya 30 menit saja, dan saya dapat langsung pulang," kata Ramos. "Awalnya mata saya diberi obat tetes (anestesi topikal) beberapa kali. Lalu saya berbaring dengan posisi kepala tepat di bawah mesin yang akan mengoperasi

foto-foto: repro

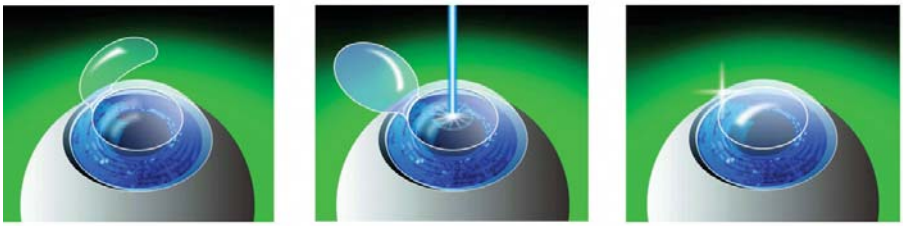

Tahap-tahap pembukaan flap di mata

mata saya. Ujung kaki saya diberi bantalan dan kedua tangan saya diberi bola kenyal untuk dikepal".

"Saat berbaring, saya diminta melihat lurus ke depan sambil menatap satu titik cahaya berwarna merah. Ketika mikrokeratom memotong, saya bisa merasakan ada objek yang lewat di mata saya. Setelah itu, saya merasa seperti ada sesuatu yang diangkat dari mata saya. Rupanya itulah saat dimana flap dibuka. Setelah flap dibuka, saya cuma melihat warna putih dengan banyak titik. Dan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi belakangan setelah melihat video rekaman operasi, di saat itulah mata saya sedang dilaser," cerita pria berumur tiga puluh satu tahun itu.

Setelah operasi, Ramos diberikan tetes mata antibiotik, anti-inflamasi, dan tetes mata yang berfungsi seperti air mata buatan untuk digunakan selama beberapa minggu. Ia juga disuruh tidur lebih banyak dan memakai kacamata hitam untuk melindungi mata dari cahaya, tidak menggosok atau mengucek mata. Ketika tidur diharuskan memakai *eye shield*/penutup mata untuk mencegah mengucek mata secara tak sadar saat tidur.

Keesokan harinya, Ramos kembali kontrol ke Dr. Ferdiriva. Kontrol hari pertama ini dimaksudkan untuk melihat posisi flap apakah letaknya sudah kembali normal dan mengetahui tajam penglihatan pasca lasik. Hasil yang ideal bila sesuai penglihatan normal yang memiliki skor 6/6 (20/20 dalam ukuran feet) yang berarti mampu melihat jelas huruf dengan jarak baca 6 meter dari *Snellen chart* (poster yang dipakai untuk pemeriksaan).

Jadual kontrol berikutnya adalah seminggu setelah lasik. Dalam kurun waktu tersebut, semua obat tetes harus diberikan secara teratur. Karena produksi air mata sangat berkurang sehingga dapat timbul sindroma mata kering. Hal ini dapat menyebabkan penurunan daya pandang, kabur, silau terutama pada malam hari, dan tidak nyaman. Pada kontrol kedua ini, dokter akan melihat apakah flap telah melekat cukup kuat. Sekaligus menguji kembali tajam penglihatan pasien apakah sudah lebih baik.

Selanjutnya pasien dianjurkan kontrol secara rutin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun setelah lasik untuk mengetahui kondisi retinanya. Pada saat kontrol itu pasien juga dapat mengetahui apakah koreksi pada matanya cukup (dapat kurang atau lebih).

Ramos adalah satu dari puluhan juta orang di seluruh dunia yang sudah merasakan manfaat lasik. American Society of Cataract and Refractive (ASCR) mempelajari tiga ribu artikel jurnal yang dikumpulkan komite, 95% mengatakan puas dengan hasil operasi. Namun demikian, seperti dilansir dari *Los Angeles Times*, Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat (FDA) telah menerima 140 laporan serius mengenai efek samping lasik sampai tahun 2006.

"Sekarang tidak perlu lagi repot mengenakan kacamata atau terbatas bergerak karena kacamata. Mau baca enak, mau berlama-lama di depan komputer bisa, mau main basket juga ok. Pokoknya saya benar-benar menikmati teknologi lasik," kata Ramos menutup pembicaraan dengan *Berita Indonesia*. ■ **DGR**

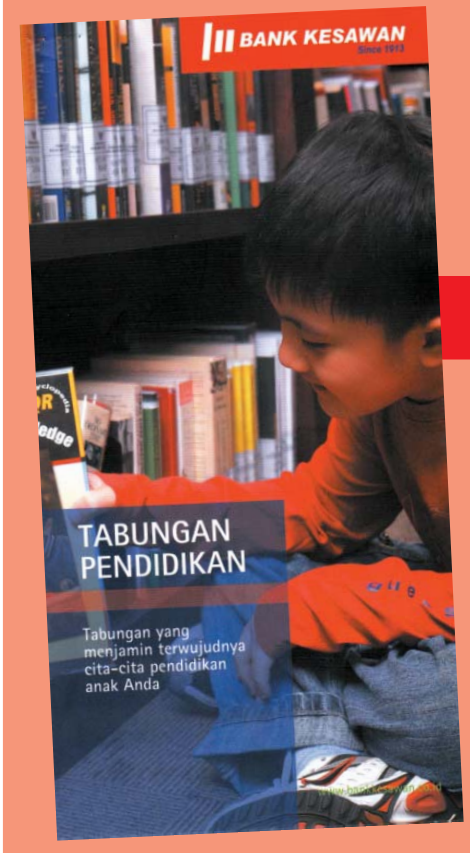

Bank Kesawan Luncurkan Tabungan Pendidikan

Guna melengkapi kebutuhan nasabah yang kian beragam dalam perencanaan biaya pendidikan, Bank Kesawan meluncurkan produk baru Tabungan Pendidikan. Penandatanganan MOU Kerjasama antara Bank Kesawan dengan Asuransi Mega Life di Jakarta tanggal 21 Juni 2008.

Business Director Bank Kesawan - Entjik S.Djafar menjelaskan, melalui Tabungan Pendidikan diharapkan nasabah dapat merencanakan biaya pendidikan anak lebih baik. Jangka waktu yang diberikan sangat fleksibel yaitu mulai dari 1 tahun sampai 20 tahun dan usia penabung pada saat jatuh tempo adalah 65 tahun, dan setoran rutin setiap bulan besarnya mulai dari Rp. 100.000,- atau kelipatannya dengan maksimum sampai dengan Rp5 juta. Mudah melakukan setoran rutin karena secara otomatis Bank Kesawan akan mendebet rekening Tabungan atau Giro setiap bulannya.

Selain kemudahan-kemudahan di atas, Tabungan Pendidikan Bank Kesawan juga memberikan perlindungan asuransi jiwa. Dalam hal ini apabila penabung meninggal dunia maka setoran rutin bulanannya akan diteruskan oleh Asuransi Mega Life. Jika nasabah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan santunan duka sebesar 250% dari kumulatif saldo tabungan atau maksimum Rp500 juta, dan manfaat santunan rawat jalan/inap sebesar biaya rumah sakit atau maksimum 25% dari saldo Tabungan Pendidikan.

Sesuai dengan visi Bank Kesawan untuk menjadi Bank terdepan di kelasnya, kini lebih memantapkan posisi dalam kancah persaingan perbankan nasional. Hal ini didukung oleh 32 jaringan layanan yang tersebar di 10 kota di Indonesia dan ATM Kesawan yang siap untuk memberikan pelayanan selama 24 jam sehari serta bebas biaya transaksi ATM untuk info saldo, tarik tunai dan transfer antar rekening Bank Kesawan. Akses jaringan ATM Kesawan tersebar di lebih dari 12.000 mesin ATM yang berlogokan ATM Bersama di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Pendidikan Bank Kesawan, dapat menghubungi Customer Service kami yang terdekat di kota Anda:

JAKARTA: 021-350.8888; MEDAN: 061-415.2929; BANDUNG: 022-422.0618; SURABAYA: 031-568.7530; DENPASAR: 0361-233.777; PEKANBARU: 0761-33308; BATAM: 0778-456.112; TANJUNG BALAI: 0623-92688 dan PEMATANG SIANTAR: 0622-29666.

Dendy Hendrias

Selamat Pulang Sobat

Redaktur Senior yang merangkap tugas sebagai ilustrator dan karikaturis Majalah Berita Indonesia, Dendy Hendrias telah berpulang ke hadirat Allah, pukul 6.30 Wib, Selasa, 30 Maret 2010.

Mengejutkan! Tidak menduga sobat kami, Dendy Hendrias, kelahiran Cirebon, 21 Oktober 1950, yang kesehariannya bersahaja, berpulang sedemikian cepat. Berita itu kami terima dari puteri kesayangannya, Devi, sekitar pukul 9.00. Kendati, memang, sudah dua pekan, dia terbaring dalam perawatan akibat hepatoma, kami tidak menyangka penyakit itu membawanya menghembuskan nafas terakhir.

Dua pekan sebelum meninggal, Pak Dendy, panggilan akrabnya, masih menyatakan tetap ikut terlibat dalam penulisan buku seorang tokoh serta tetap menulis dan mengisi karikatur dan ilustrasi di Majalah *Berita Indonesia*. Dia juga masih menyimpan sejuta cita-cita.

Namun, manusia berencana, kehendak Allah jualah yang jadi. Persis saat Majalah Berita Indonesia di puncak *deadline*, berita duka itu masuk ke ruang redaksi. Serta merta kami menundukkan kepala dan bersujud kiranya Sobat kami diterima Allah di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan dilindungi dan diberi penghiburan. Kami ikhlaskan keberpulanganmu Sobat!

Saat melayat di rumah duka Jl. Megah Raya Blok C4/1 Taman Narogong Indah kota Bekasi, kalimat itu juga yang kami haturkan kepada Isteri dan putera-puterinya. Dia meninggalkan seorang isteri bernama Henny Nurdini (55 tahun) dan putera-puteri, Devi Andriani Wulansari (30, menikah), Eric Putera Nalendra (28), Yessy Hendriana Puspita (25), dan Gia Muhamad Agusta (20). Setelah disolatkan di masjid dekat rumahnya, sekitar pukul 13.00 wib, jenazahnya dimakamkan di TPU Kartini, Poncol-Bekasi.

Devi Andriani Wulansari, puteri sulungnya yang juga pemilik situs devi-collection.com ini mengutarakan sedikit kesan tentang ayahnya. “Papah itu seorang pekerja keras, idealis, memiliki darah seni yang kental, dan berwawasan luas. Beliau tempat bertanya, tempat bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah dan juga bersenda gurau, karena pada dasarnya beliau sangat humoris. Beliau ayah sekaligus sahabat,” ucap Devi sambil terbata-bata.

Sehari setelah kepergian Dendy, suasana *deadline* majalah ini diliputi duka. Terutama selama ini, dialah satu-satunya pengisi karikatur dan ilustrasi majalah ini. Memang, dia yang menginspirasi penampilan majalah ini sejak pertama kali terbit, Juli 2005, dengan tampilan karikatur dan ilustrasi cover, Bung Warto dan Karikatur Berita.

Kreasinya di bidang karikatur dan ilustrasi telah menjadi andalan. Sebab, dialah peraih Trophy Adinegoro 1987 bidang karikatur dan Juara I Lomba Karikatur Hari Pers Nasional th 1985. Saat itu, dia masih bertugas sebagai reporter dan karikaturis di Harian Jayakarta (1982-1986).

Ketidakhadiran Pak Dendy, saat deadline kali ini, terasa sekali ada sesuatu yang hilang. Siapa yang akan mengisi karikatur dan ilustrasi? Memang, Pemred sebelumnya sudah mengantisipasi dengan mengajak seorang sobat muda bergabung, tetapi rasa kehilangan tetap terasa tak tergantikan.

Dendy bergabung dengan Majalah *Berita Indonesia* sejak awal (Juli 2005) bersama rekan-rekan yang sebelumnya sudah aktif di Majalah Tokoh Indonesia dan Website TokohIndonesia.com, sejak Mei 2002. Sebelumnya, dia bertugas sebagai Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Garda (1998-2005), Redaktur Majalah Dharmais (1995-1998). Pernah juga menjadi Pemred Tabloid BebekMania, kontributor/wartawan di Majalah VIP, Majalah Infomas, Majalah Metropolitan, Legislatif Jaya dan Fokus.

Setelah meniti karir jurnalistik di Harian Jayakarta (1982-1986), dia sempat hampir tujuh tahun berkiprah sebagai manager produksi Perusahaan Public Relations Ganesia PR (1985-1991) - mengantarnya ke beberapa kota seperti Tokyo dan Seoul - dan Perusahaan PR PT Pena Kencana (1993-1995).

Selain kreatif di bidang karikatur dan ilustrasi, dia juga seorang reporter dan penulis produktif. Dia telah menulis buku “Perjalanan Garuda Indonesia”, buku biografi Brigjen TNI (Purn) H. Zahid Husein (1995) dan buku biografi Mayjen Ryacudu.

Selain itu, dia juga berkiprah di bidang *broadcasting* dan *video shooting*. Bersama pengelola TokohIndonesia, telah memproduksi Video Company Profile Terminal Petikemas Koja Tahun 2005, sebagai penulis skenario, sutradara/*storyboard* dan editor.

Juga dalam posisi yang sama, dalam produksi iklan layanan masyarakat Departemen Kelautan & Perikanan RI tentang sosialisasi Investasi Kelautan Tahun 2005, sosialisasi Gemar Makan Ikan Tahun 2006, dan Manfaat Ikan Bagi Pertumbuhan & Kecerdasan Tahun 2007. Juga produksi Video Company profile PT Pundi Farm dan PT Pama Persada. Selain itu, dia juga pernah menjadi presenter sebuah dialog di TPI.

Dendy, sebagaimana juga dikemukakan puterinya, Devi, masih menyimpan sejumlah cita-cita. Dia seorang jurnalis bersahaja, menikmati hidup ’tahan menderita’ dengan hasil keringatnya sendiri. Tidak pernah tergiur menerobos jalan pintas. Prinsipnya, lebih baik menikmati hidup seadanya daripada ikut dalam gerombolan garong, pemeras, makelar kasus dan koruptor. Prinsip inilah salah satu peninggalan berharganya kepada generasi muda. Selamat berpulang, Sobat!

■ **Mangatur L. Paniroy**

foto: dok.berindo

Film Clash of Titans menampilkan teknologi 3D yang akan memukau penonton

Pertempuran Dewa "Kosmopolit"

Teknologi memancarkan keindahan pertempuran paling dahsyat dalam mitologi Yunani.

Dalam *Premier* edisi tutup tahun 2003, para sineas Amerika ditantang untuk lebih berani menggarap besar-besaran mitologi Yunani. Serangkai menyambut rilisan film *Troy* (2003), majalah film paling disegani di Amerika itu menulis, "Hollywood paling enggan keluar duit untuk menghidupkan kembali kejayaan mitologi Yunani. Sumber (bahan) cerita yang kaya, tapi ironis dengan jumlah judul yang sangat sedikit. Hanya segelintir *filmmaker* yang serius dan berani memutar otak untuk itu..."

Dalam hitungan 30 tahun terakhir, *Premier* (2003) mencatat film berlatar-belakang cerita mitologi Yunani adalah tema paling miskin dengan jumlah sembilan judul (bandingkan dengan film perang tema Vietnam berjumlah 56 judul dan pertempuran/kerajaan di Asia sejumlah 106 judul). Dan akhirnya, tahun ini sutradara Louis Letterier yang pernah menggarap *Incredible Hulk* (2008) akhirnya menambah jumlah film bertema mitologi Yunani dari daur ulang film *Clash of the Titans* (1981).

Filmnya babonnya sendiri telah digarap dengan apik oleh sutradara spesialis film kolosal, Desmond Davis, dan di zamannya film ini menjadi salah satu ikon era 80-an di Barat sana. Kali ini, Adam Schroeder, seorang mogul Hollywood kenamaan berencana membuat ulang *Titans* di tahun 2002 yang ternyata lebih dulu beberapa tahun sebelum rencana pembuatan *Troy* (2004) arahan sutradara Wolfgang Peterson. Berita besar pembuatan *Titans* ini akhirnya terlibas oleh kemegahan *Troy* yang duluan *nongol* sekaligus berjaya di gelanggang Oscar 2004.

Titans versi baru ini sangat patuh dalam *plotting* dan naskah film aslinya. Kekuatan teknologi 3D menjadi pembedanya. Sebagai jaminan, simak komentar *New York Time* yang menulis, "Saat Desmond Davis membuat *Titans*, kekuatan naskah dan *casting* menjadi kekuatan utama. Dan tepat sekali (ketika) Louis Leterrier diangkat sebagai sutradara *Titans* versi baru dengan menonjolkan efek visual, sinematografi kelas premium, dan perangkat 3D. Film sejarah pertempuran yang berselera..."

Kisah filmnya sendiri berporos pada Perseus (diperankan Sam Worthington) yang tak lain manusia setengah dewa (hasil perkawinan antara Dewa Zeus dan Putri Danae). Dalam khazanah mitologi Yunani, perjalanan Perseus menumpas musuh Zeus seperti Medusa, Kraken, dan Titan adalah bagian paling berkilau. Ada banyak intrik dan perseteruan di sana. Dalam film, Perseus yang tengah bertarung dengan Medusa si Dewi berambut ular itu seperti mencampur ketegangan dan keindahan visual. Silakan simak saat pedang terlempar, pancaran mata sang Medusa, kelebatan bayangan juga percikan cahaya yang berpendaran dalam *screen* gelap, dan terutama saat Perseus berhasil menuntaskan perlawanannya dengan Medusa. Semua adegan mencampur gerak tubuh dan keindahan pertempuran yang penuh energi.

Selain musuh bebuyutan Zeus, masih ada lagi sejumlah musuh berupa binatang raksasa. Tidak seperti film yang mengandalkan efek 3D lainnya, film *Titans* menyuguhkan gerak dari efek editing yang cepat. Kita bisa melihat bagaimana empat titik kamera bergerak memecah pertarungan antara Perseus dan kalajengking raksasa. Efek editing berpacu simultan dengan visual efek. Gerak bukan lagi dalam obyek tapi dalam titik mata kita yang menyaksikan *screen* itu. Istilahnya, canggih tapi masih punya sentuhan seni yang tinggi.

Adalah Sam Worthington bintang paling bersinar tahun ini. Setelah mengejutkan banyak orang lewat penampilannya di *Avatar* (2009), tak berselang lama ia menjadi Perseus yang mengalahkan sejumlah nama besar seperti Matt Damon, Eric Bana, dan Gerard Butler. *Avatar* pun memberi efek yang besar terhadap film ini, di mana kebetulan Perseus kini berambut cepak, mirip dengan sosok Jake Sully yang ia perankan dalam Avatar.

"Tak ada niat untuk membonceng *image* (film) *Avatar* ke dalam diri Perseus. Plot dan naskah yang otentik harus diberi perspektif yang berbeda, tak ada rujukan yang akurat dalam mitologi (Yunani) bahwa penampilan Perseus punya tatanan rambut tergerai sebahu. Saya memberikan sentuhan kosmopolit terhadap mitos," ujar sang sutradara dalam Premier edisi pembuka tahun 2010.

Peran teknologi 3D dalam Titans telah memancarkan keindahan pertempuran paling dahsyat dalam mitologi Yunani. Perseus yang menurut deskripsinya begitu agung, berwajah tegas, sekaligus bersifat pemberontak telah menjelma dalam sosok yang lebih kalem, inheren dan dingin. Seperti ingin memunculkan idiom "from zero to hero", dipilihnya Sam menjadi alasan yang masuk akal untuk memperluas calon penonton di dunia yang telah tidak berselera lagi dengan mitos Yunani.

Penggemar film ini tentu akan melebar. Selain yang fanatik dengan cerita/mitologi Yunani, penonton film aksi laga juga akan duduk nyaman menikmati keindahan film berdurasi 118 menit ini. ■ **CHUS**

foto: repro

Potret Bahasa Generasi "Ilfil"

Dari kata "jomblo" sampai '*retrospektif*", berbahasa mengalami perubahan sesuai zaman, yang ..."Gw banget!"

"*Wakil rakyat @ senayan lebay smua. Brantem di depan kamera gak taw malu. Alaaaaaaaaayy*!" begitulah salah satu pernyataan/*status* sebuah akun di jejaring sosial, Facebook beberapa pekan silam saat Sidang Paripurna terkait kasus Bank Century berakhir ricuh.

Jangan terburu-buru menyalahkan perkembangan teknologi, jika kebiasaan menulis pesan singkat (SMS) serta gaya menulis dalam *blog* dan situs jejaring pertemanan mengalami perubahan dalam berbahasa. Jauh, bahkan sangat jauh dari perkembangan teknologi, medio 70-an kita mengenal 'bahasa okem' yang cukup meresahkan orang tua dan kalangan pendidik kala itu.

'Bahasa okem' sendiri punya gejala yang mirip dengan 'bahasa gaul' yang muncul di akhir era 90-an. Jika 'bahasa okem' mulanya dipakai oleh preman yang identik dengan kriminalitas di lingkungan terminal dan perkampungan kumuh, maka 'bahasa gaul' di awal 2009-an semulanya banyak dipakai oleh kaum waria di salon serta di pusat pertokoan.

Dengan cara berbahasa demikian, mereka bisa merahasiakan perbincangan berkaitan dengan hal-hal negatif tanpa perlu takut dimengerti orang lain. Mereka menciptakan sandi, mereka berkreasi, terus menciptakan kata baru, berinovasi kata, atau mengganti arti kata yang lama menjadi istilah baru dan seterusnya.

Hanya karena kebiasaan itu terbawa ke luar komunitasnya dan ketertarikan manusia yang selalu memberi respons positif terhadap kedinamikaan, maka 'bahasa okem' dan 'bahasa gaul' lebih mudah menyebar, dan menjadi sebuah perayaan kebahasaan sesuai zamannya.

Buku *Geliat Bahasa Selaras Zaman* ini sebenarnya hasil kompilasi dari lokakarya "Perubahan Konfigurasi Kebahasaan di Indonesia Pasca-Orde Baru" di kampus Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 9-11 Juni 2008. Salah satu wacana besar yang dihasilkan, bahwa bahasa-bahasa di Indonesia *telah* dan *sedang* berubah setelah Soeharto lengser pada tahun 1998.

Terdapat 14 makalah yang kesemuanya menyoroti perkembangan bahasa di Indonesia dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi dan budaya. Baik bahasa daerah, bahasa asing, perkembangan bahasa keseharian dan terutama bahasa Indonesia itu sendiri yang selalu bergeliat, 'berjuang' mencari arah.

Menurut Mikihiro Moriyama dalam kata pengantarnya (hal. xi-xii) terdapat dua penyebab perubahan tersebut. Penyebab pertama adalah berkurangnya kekuasaan pemerintahan pusat beserta kekuasaan presiden dan bertambahnya otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi. Perubahan politik ini ternyata mengurangi tekanan bahasa Indonesia sebagai alat pengikat "kebhinekaan" yang menjadi simbol bahasa nasional.

Dengan kondisi seperti ini, bahasa daerah dan bahasa asing mempunyai keleluasaan semisal bahasa daerah akan muncul di siaran televisi lokal, bahkan bahasa Inggris dan Mandarin mulai mempunyai jatah di sejumlah program televisi.

Penyebab kedua adalah arus globalisasi. Perkembangan teknologi seperti penggunaan telepon genggam dan internet yang telah menyebar di masyarakat luas. Seluruh masyarakat Indonesia sampai di pelosok pun bisa merayakan 'kebebasan' berbahasa secara global, yang menyebabkan rembesan bahasa daerah dan asing muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Pasca reformasi, ternyata bahasa Indonesia telah menunjukkan fenomena bagaimana bahasa Indonesia memamerkan globalitas dengan menyerap berbagai ekspresi dan kosakata bahasa mancanegara, terutama bahasa Inggris. Tim Hassall dalam makalahnya "Fungsi dan Status Kata Pinjaman Barat" menelisik penggunaan kata asing yang sering digunakan, misalnya, seringnya penggunaan kata '*retrospektif*' sebagai kata ganti dari kata '*surut*' yang semulanya lazim digunakan. Sedangkan Maneke Budiman memaparkan lewat sejumlah fenomena dalam novel sastra Indonesia mutakhir, misalnya dalam novel *Supernova* karya Dee dan novel *Geni Jora* karya Abidah El Khalieqy.

Untung Yuwono dalam makalahnya berjudul "Ilfil Gue Sama Elu – Sebuah Tinjauan atas Ungkapan Serapah dalam bahasa gaul Mutakhir" (hal. 60-87) menangkap perkembangan 'bahasa gaul' sebagai bahasa sehari-hari. Yuwono memperlihatkan bahwa diksi (pilihan kata) dan gaya bahasa generasi kiwari berkembang sangat mencolok, bahkan berbeda dari generasi Lupus (80-an), dan generasi Motinggo Busye (70-an) yang mempopulerkan bahasa 'okem/prokem' lewat novelnya. Kata-kata seperti *lebay* (berlebihan), *alay* (kampungan), *jomblo* (tidak mempunyai pasangan), *ilfil* (mati rasa), *bete* (bad mood), *bajigur* (bajingan), atau kata (seru) serapah lain seperti *anjrit-sompret-kampret* dan sebagainya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam percakapan sehari-hari yang kemudian menjadi bahasa ungkapan tertulis yang menyebar melalui SMS, *blog*, dan *e-mail*.

Menikmati buku ini seperti menikmati potret kebahasaan kita saat ini. Apakah munculnya bahasa asing, kesadaran berbahasa daerah, juga perkembangan 'bahasa gaul' di ruang publik akan mempengaruhi konfigurasi bahasa Indonesia? Dan, yang perlu diingat, jangan terburu menyalahkan arus (global) komunikasi lewat perkembangan teknologi dulu.

Buku ini menyimpan kunci jawabannya. Ia jadi lebih menarik lagi untuk disimak semua kalangan, terutama para siswa, mahasiswa dan para orangtua, yang dalam kehidupan lingkup terkecil mereka di sekolah, di lingkungan pergaulannya, dan terutama di rumah sehari-hari di mana mereka bisa menjadi agen perubahan. Apalagi dari sanalah mulanya kebahasaan bermula, lalu berkembang, berubah dan terus menggeliat. ■ **CHUS**

Judul Buku:
Geliat Bahasa Selaras Zaman
Penyunting:
Mikihiro Moriyama dan Maneke Budiman
Tebal:
423 halaman
Penerbit:
KPG, 2010

foto: repro

TokohINDONESIA

MAJALAH BERBASIS WEBSITE

www.tokohindonesia.com

THE EXCELLENT BIOGRAPHY

Al-Zaytun

SARANA MANGUN KARSA

PARAMADINA

BUDHY MUNAWAR-RACHMAN

ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid

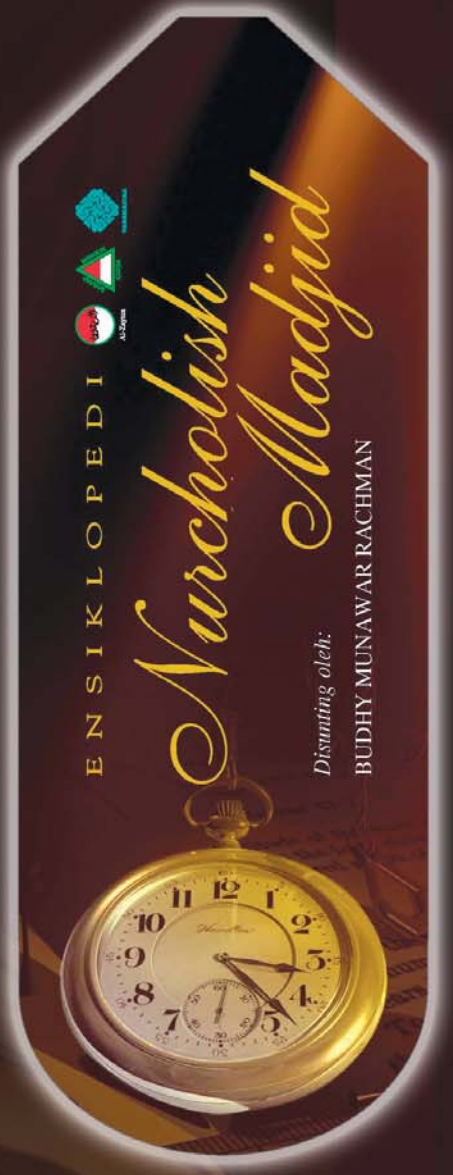

Untuk Pemesanan Hubungi:

Mahad Al-Zaytun
(0234) 742815

Majalah Berita Indonesia
(021) 8292735